ASIA PACIFIC DEFENSE

VOLUME 40, TERBITAN KE-4, 2015

# FORUM

## WARISAN REZIM

## Apakah Memahami Kim Jong Un Menjadi Kunci Stabilitas Regional?

18

# tajuk utama


**10 Menarget Hubungan Teroris dengan Senjata Pemusnah Massal**
Mengapa penting untuk menghentikan proliferasi senjata pemusnah massal.

**14 Menghentikan Lalu Lintas Senjata Pemusnah Massal**
Cara mengembangkan layanan dukungan teknis.

**18 Efek Kim Jong Un**
Analis Korea Utara mengamati dengan cermat pemimpin negara ini untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang dirinya dan membatasi ketegangan di Semenanjung Korea.

**24 Tindakan Politik**
India mengganti nama kebijakan "Berpaling ke Timur" menjadi "Bertindak ke Timur" dan mendorong lebih banyak agenda tindakan dengan mitra regional.

**28 Blok Kekuatan yang Sedang Bangkit**
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mewujudkan dirinya menjadi masyarakat dan kekuatan aktif — secara ekonomi dan lainnya.

**34 Klaim Laut & Pergeseran Kekuatan**
Perubahan hubungan dan tindakan tidak konsisten Tiongkok mengungkapkan motif yang patut dipertanyakan.

**42 Mengurangi Ancaman Teror Pejuang Asing**
Ekstremis militan yang kembali dari Suriah dan Irak harus direhabilitasi dan diintegrasikan kembali.

**48 15 Praktik Hukum yang Baik untuk Mengatasi Terorisme**
Cara-cara utama untuk meningkatkan sistem peradilan pidana nasional.

**52 Biometrik Membangun Keamanan Perbatasan**
Pembagian data memperkuat kemampuan penindakan.

60

# bagian-bagian


**4 Pasifik Selayang Pandang**

**5 Kontributor**

**6 Seluruh Kawasan**
Berita dari Asia dan Pasifik.

**8 Perkembangan Teroris**
Malaysia mengesahkan undang-undang anti-teror untuk mengekang militan Islam.

**56 Profil Pemimpin Penting**
Bapak pendiri Singapura meninggalkan warisan stabilitas.

**58 Suara**
Tiongkok dan Rusia: Persahabatan sekejap?

**60 Budaya & Adat Istiadat**
Ledakan surat kabar regional di India.

**62 Media & Teknologi**
Bencana di masa lalu menginspirasi alat inovatif untuk respons di masa depan.

**64 Cakrawala Dunia**
Berita dari berbagai penjuru dunia.

**65 Renungan**
Ponsel cerdas mengubah interaksi otak dan ibu jari.

**66 Serba-Serbi**
Berita-berita menarik, tak lazim, dan menghibur.

**66 Kata Terakhir**
Barisan kehormatan Republik Korea tampil di Monumen Peringatan Perang Korea di Seoul.

**DI SAMPUL MAJALAH:**
Desain sampul ini menyampaikan intrik yang kurang menyenangkan dari pemimpin korea utara, kim jong un.

ILUSTRASI *FORUM*

KOMANDO PASIFIK A.S.

Para Pembaca
yang Terhormat,

Selamat datang di edisi kuartal keempat *Asia Pacific Defense FORUM* tahun 2015, yang berfokus pada titik kilas. Terbitan kali ini membahas dinamika regional di Indo Asia Pasifik dan mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap eskalasi, perluasan, dan konflik militer.

Selama bertahun-tahun, peningkatan aktivitas ekonomi di Indo Asia Pasifik telah membantu mengangkat jutaan orang dari kemiskinan dan memungkinkan banyak negara untuk meningkatkan anggaran belanja infrastruktur, teknologi, dan keamanan. Akan tetapi, peningkatan kesejahteraan ini juga telah meningkatkan kompetisi dan permintaan sumber daya alam, terutama di lingkungan maritim. Banyak negara telah melaksanakan strategi untuk mengamankan kepentingan nasional mereka sebagai upaya untuk menanggapi masalah ini. Beberapa negara memilih strategi yang meningkatkan stabilitas keseluruhan di Indo Asia Pasifik, sementara negara lain telah menjadi konsumen keamanan tersebut melalui tindakan agresif dan terkadang provokatif.

Lingkungan keamanan yang ada saat ini di Indo Asia Pasifik sebagian besar merupakan hasil dari kehadiran berkelanjutan Amerika Serikat, jaringan aliansi dan kemitraannya yang kuat, dan organisasi multilateral yang didedikasikan untuk keamanan kawasan. Lingkungan keamanan ini telah memungkinkan banyak negara untuk mengatasi tantangan keamanan secara diplomatis dan menghambat negara yang lebih besar untuk memaksakan kehendaknya pada negara yang lebih kecil.

Upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kerja sama dan pemahaman multilateral dalam arsitektur keamanan ini merupakan kunci untuk mengembangkan solusi keamanan regional yang fleksibel demi mengatasi potensi titik kilas dan ancaman di wilayah ini. Sengketa teritorial, organisasi ekstremis kekerasan, proliferasi senjata, narkoba dan perdagangan manusia, serta ambisi nuklir Korea Utara harus diatasi secara kooperatif untuk mengurangi ancaman yang ada dan yang sedang berkembang.

Saya berharap edisi ini mampu menambah wawasan dan menggugah pemikiran Anda, dan saya menantikan komentar Anda. Silakan hubungi kami di **contact-apdf@apdforum.com** untuk menyampaikan perspektif Anda.

Salam hangat,

HARRY B. HARRIS, JR.
Laksamana AL A.S.
Komandan, Komando Pasifik A.S.

APD FORUM

**Titik Kilas**

Volume 40, Terbitan ke-4, 2015

**KEPEMIMPINAN USPACOM**

HARRY B. HARRIS, JR.
*Laksamana AL A.S.*
*Komandan*

ANTHONY G. CRUTCHFIELD
*Letnan Jenderal, A.S.*
*Wakil Komandan*

ERIC P. WENDT
*Mayor Jenderal, A.S.*
*Kepala Staf*

MARK C. MONTGOMERY
*Laksamana Muda, A.L. A.S.*
*Direktur Operasi*

**PENANGGUNGJAWAB PROGRAM**

CHRISTOPHER D. STANGLE
*Mayor, A.S.*

HUBUNGI KAMI

APD FORUM

*Asia Pacific Defense FORUM*
Program Manager, HQ USPACOM
Box 64013
Camp H.M. Smith, HI 96861 U.S.A.

**http://apdforum.com**

email:
**contact-apdf@apdforum.com**

***Asia Pacific Defense FORUM*** adalah sebuah majalah militer profesional yang diterbitkan triwulanan oleh Komandan Komando Pasukan Amerika Serikat di Pasifik (USPACOM) untuk menyediakan sebuah mimbar internasional bagi personel militer di wilayah Asia dan Pasifik. Pendapat yang dituangkan dalam majalah ini tidak mewakili kebijakan-kebijakan atau pandangan dari komando ini maupun dari lembaga pemerintah Amerika Serikat yang lain. Semua naskah ditulis oleh staf *FORUM* kecuali bila disebutkan. Menteri Pertahanan A.S. yakin bahwa penerbitan majalah ini perlu adanya bagi upaya pendekatan pada masyarakat sebagaimana yang dikehendaki oleh Departemen Pertahanan A.S.

ISSN 2333-1631 (cetak)
ISSN 2333-164X (online)

APCSS

**DR. ALFRED OEHLERS** adalah profesor di Pusat Studi Keamanan Asia Pasifik di Honolulu, Hawaii. Ia merupakan spesialis di bidang ekonomi politik pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indo Asia Pasifik. Sebelumnya dia menjabat sebagai guru besar madya di Auckland University of Technology, Selandia Baru. Dr. Oehlers memperoleh gelar doktor di bidang ekonomi politik dari University of Sydney. Ia memegang gelar master dan sarjana di bidang ekonomi dari Macquarie University, Australia. Dr. Oehlers telah menulis mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengan pesatnya pembangunan di kawasan Asia Timur dan Tenggara, dan pada topik antara lain terkait tata kelola, demokratisasi, korupsi, kesehatan masyarakat, dan konflik etnis. Ditampilkan pada Halaman 10

SIDDHARTH SRIVASTAVA

**SIDDHARTH SRIVASTAVA** adalah jurnalis, konsultan, dan penulis independen yang berbasis di New Delhi, India. Dia meliput urusan luar negeri dan strategis, keamanan, politik, pertahanan, energi, dan topik terkait Asia Selatan dan Tenggara. Dalam karier selama lebih dari 20 tahun, dia telah menjadi koresponden surat kabar *The Times of India* dan artikel-artikelnya telah dipublikasikan secara luas di surat kabar dan majalah lainnya di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Ditampilkan pada Halaman 28

**LETKOL. FRANKLIN ROSENBLATT** dari Angkatan Darat A.S. adalah penasihat hukum di Komando Operasi Khusus, Pasifik, di Hawaii. Dia meraih gelar Bachelor of Arts dari James Madison University, gelar sarjana hukum dari University of Virginia School of Law , dan gelar magister hukum dari The Judge Advocate General's Legal Center and School. Ditampilkan pada Halaman 48

**TOM ABKE** dan **JIRI KOMINEK** menulis tentang biometrik dan keamanan perbatasan untuk terbitan *FORUM* ini. Abke adalah peneliti dan penulis lepas yang berbasis di Bangalore, India. Dia telah memberikan kontribusi untuk artikel dan laporan penelitian tentang beragam topik mulai dari pertambangan hingga migrasi paksa. Lahir dan dibesarkan di Barbados, Abke pernah tinggal dan bekerja di Aljazair, Mali, Tunisia, dan Libia. Kominek adalah wartawan independen yang berbasis di Republik Ceko. Dia meliput masalah ekonomi, pertahanan, dan keamanan di Eropa Tengah dan Timur, Rusia, dan Negara Pecahan Uni Soviet, serta Asia untuk sejumlah publikasi dan organisasi, termasuk IHS Jane's, Business New Europe, The Jamestown Foundation, dan CNBC European Business. Ditampilkan pada Halaman 52

# Gabung dengan Bahasan Ini

## Kami ingin mendengar dari ANDA!

*Asia Pacific Defense FORUM* melayani personel militer dan keamanan di kawasan Indo-Asia-Pasifik. Majalah triwulanan produk Komando Pasifik A.S. ini menyediakan konten berkualitas tinggi dan mendalam mengenai topik-topik yang memengaruhi upaya keamanan di seluruh kawasan — mulai dari kontraterorisme hingga kerja sama internasional dan bencana alam.

*FORUM* membangkitkan bahasan-bahasan yang mendalam dan mendorong suatu pertukaran gagasan-gagasan yang sehat. Ajukan tulisan, foto-foto, pokok-pokok bahasan, atau tanggapan-tanggapan lainnya kepada kami lewat dunia maya atau ke:

**Program Manager**
***Asia Pacific Defence FORUM***
**HQ USPACOM, Box 64013**
**Camp. H.M. Smith, HI**
**96861-4013 USA**

*Asia Pacific Defense FORUM* juga menawarkan tulisan yang luas di dunia maya di

**www.apdforum.com**

**Para pengunjung dapat:**

- **Membaca tulisan khusus di dunia maya**
- **Menengok kembali terbitan sebelumnya**
- **Ikut serta dalam jajak pendapat**
- **Mengirim umpan balik kepada kami**
- **Minta berlangganan**
- **Mempelajari cara untuk mengajukan tulisan**

FORUM

*Menjelajahi hal-hal yang memengaruhi sekian banyak jiwa.*

**Pindai gambar ini dengan pembaca kode telepon Anda untuk dibawa ke jaringan situs kami.**

THE ASSOCIATED PRESS

INDIA

# DEBUT KAPAL SELAM SERBU BARU

Angkatan Laut India menurunkan kapal selam serbu jenis Scorpene yang pertama kalinya dibuat di dalam negeri ke dalam air di Galangan Mazagon, Mumbai pada April 2015. Menteri Pertahanan India, Manohar Parrikar, dan Menteri Utama Negara Bagian Maharashtra, Devendra Fadnavis, melepas tambatan kapal selam bertenaga listrik dan diesel, yang akan menjalani uji coba di laut sebelum mendapatkan persetujuan untuk bergabung dengan armada. India sedang membuat enam kapal selam lewat kemitraan dengan Direction des Constructions Navales Prancis. Kapal selam pertama akan diserahkan pada tahun 2016.

The Associated Press

FILIPINA

# Aturan kokpit dua awak ditetapkan

Filipina pada April 2015 menjadi negara terbaru yang mewajibkan dua awak maskapai penerbangan untuk selalu berada dalam kokpit setelah kopilot pesawat Jerman dengan sengaja menabrakkan pesawatnya pada Maret 2015.

Otoritas Penerbangan Sipil Filipina mengumumkan keputusannya setelah penyidik menyimpulkan bahwa kopilot Germanwings, Andreas Lubitz, dengan sengaja menabrakkan pesawatnya ke Pegunungan Alpen Prancis setelah mengunci pintu kokpit sehingga tidak bisa diakses koleganya. Total 150 penumpang tewas.

"Untuk pesawat yang disertifikasi untuk dua pilot, satu anggota awak penerbangan, sebaiknya laki-laki tetapi tidak harus pilot, wajib berada di dalam dek penerbangan seandainya salah satu pilot meninggalkan dek penerbangan untuk alasan pribadi," demikian bunyi peraturan.

Direktur jenderal Otoritas Penerbangan Sipil Filipina, William Hotchkiss, mengatakan bahwa semua operator pesawat udara harus merevisi pedoman operasi mereka untuk mematuhi peraturan baru ini.

Banyak maskapai penerbangan di seluruh dunia telah memperkenalkan aturan dua orang sejak tragedi 24 Maret 2015. Penyidik kecelakaan udara Prancis mengumumkan pada April 2015 bahwa informasi dari perekam data penerbangan pesawat yang naas itu telah mengonfirmasi temuan sebelumnya bahwa kopilot bertindak dengan sengaja.

Agence France-Presse

THE ASSOCIATED PRESS

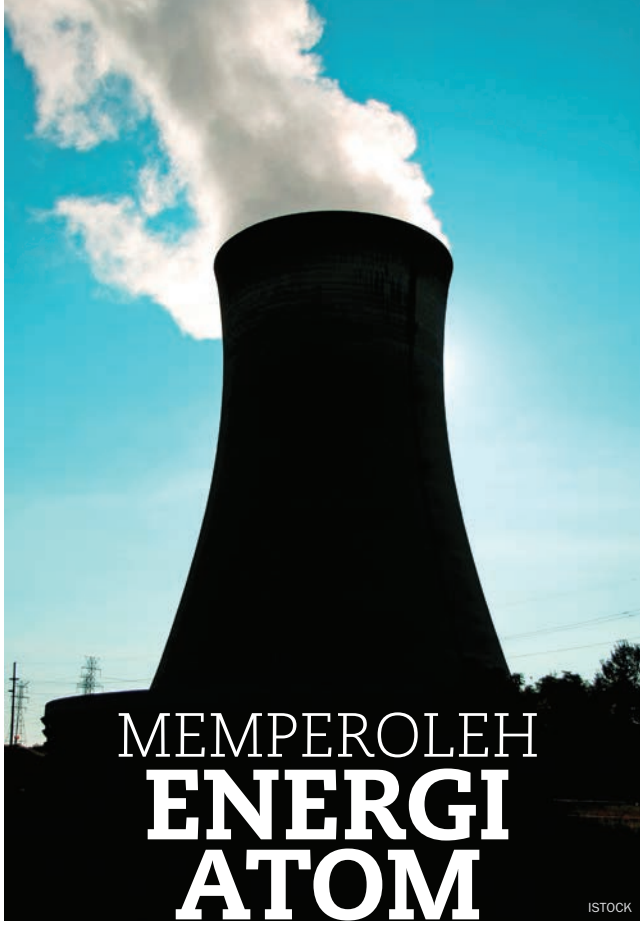

# MEMPEROLEH ENERGI ATOM

ISTOCK

## SRI LANKA

Sri Lanka dan Pakistan menandatangani enam perjanjian termasuk satu perjanjian tentang energi atom pada April 2015, kata pemimpin kedua negara, ketika negara pulau yang penting secara strategis ini berupaya membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya.

Rincian perjanjian tidak segera diungkapkan, tetapi perjanjian ini terjadi setelah India menyetujui pada Februari 2015 untuk membangun infrastruktur energi atom Sri Lanka, termasuk pelatihan personel.

Presiden baru Sri Lanka, Maithripala Sirisena, meraih kekuasaan pada Januari 2015, mengakhiri satu dekade pemerintahan di tangan Mahinda Rajapaksa, dan telah berupaya mengurangi pengaruh Tiongkok di negaranya, yang telah membuat India kesal.

Pakistan dan Sri Lanka secara tradisional memiliki ikatan yang kuat, khususnya di bidang pertahanan, lewat pemberian bantuan militer oleh Islamabad selama perang melawan gerilyawan Macan Tamil yang berakhir pada tahun 2009.

Berbicara pada konferensi pers dengan Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, Sirisena mengatakan: "Pada saat-saat kritis dalam sejarah pasca-kemerdekaan, kami telah menjalin solidaritas dengan satu sama lain," dan menambahkan bahwa ia "sangat berterima kasih atas dukungan yang kuat dalam memerangi terorisme" yang diberikan oleh Pakistan.

"Kami membahas perjanjian regional dan internasional serta menandatangani enam perjanjian di bidang manajemen bencana, olahraga, pengapalan, energi atom ... dan dalam bidang narkoba serta kerja sama akademik," tambahnya.

Pakistan mengoperasikan tiga pembangkit listrik tenaga nuklir yang menghasilkan total sekitar 740 megawatt listrik dan telah mulai membangun dua PLTN lainnya, termasuk PLTN 2.200 megawatt yang akan dibangun dengan bantuan teknis Tiongkok di pesisir Laut Arab di Pantai Paradise, 40 kilometer sebelah barat Karachi. Agence France-Presse

## TIONGKOK

# TINDAKAN TEGAS TERHADAP *korupsi pejabat tinggi*

Jaksa penuntut mendakwa mantan kepala keamanan nasional Zhou Yongkang untuk kasus korupsi dan pembocoran rahasia negara, menjadikannya politisi tingkat tertinggi yang akan diadili di Tiongkok dalam lebih dari tiga dekade terakhir.

Kejaksaan Agung Tiongkok mengumumkan dakwaan yang sudah diharapkan sejak lama itu di situs webnya pada Maret 2015 setelah penyelidikan panjang yang juga memeriksa mantan sekutu Zhou di pemerintah dan industri minyak, tetapi tidak memberikan rincian substansial baru tentang tuduhan terhadap dirinya.

Zhou, pria berwajah masam dan dulunya sangat ditakuti yang merupakan mantan anggota Komite Tetap Politbiro yang berkuasa penuh di Partai Komunis, telah menjalani penyidikan sejak akhir tahun 2013 dan tidak memberikan komentar sejak saat itu.

"Mengumumkan dakwaan terhadap dirinya berarti awal dari tamatnya riwayat Zhou," kata Dali Yang, ilmuwan politik di Universitas Chicago, merefleksikan pandangan yang diyakini secara luas bahwa Zhou tidak dapat mengelak lagi dari hukuman.

Zhou, 72 tahun, merupakan pejabat tingkat tertinggi yang didakwa sebagai bagian dari kampanye anti-korupsi

THE ASSOCIATED PRESS

Presiden Xi Jinping yang dimulai pada akhir 2012. Dia akan menjadi politisi tingkat tertinggi yang dihadapkan ke pengadilan sejak persidangan kasus pengkhianatan pada tahun 1981 terhadap istri Mao Zedong dan anggota lain dari "Gang of Four" (Empat Sekawan) yang menindas lawan politik mereka selama Revolusi Kebudayaan 1966-1976.

Meskipun kasus terhadap Zhou disebut-sebut oleh media pemerintah sebagai menunjukkan tekad partai untuk memerangi korupsi tanpa memandang pangkat seseorang, kasus ini juga banyak dianggap sebagai bagian dari politik faksi di eselon teratas partai yang berkuasa ini dan pelenyapan saingan potensial Xi.

"Korupsi umum terjadi di kalangan pejabat senior partai, jadi terlihat sepertinya Zhou adalah contoh lain dari pecundang dalam perebutan kekuasaan," kata Zhang Lifan, komentator dan sejarawan yang berbasis di Beijing.

The Associated Press

# Malaysia

## MENGESAHKAN UNDANG-UNDANG ANTI-TEROR UNTUK MENGEKANG MILITAN ISLAM

THE ASSOCIATED PRESS

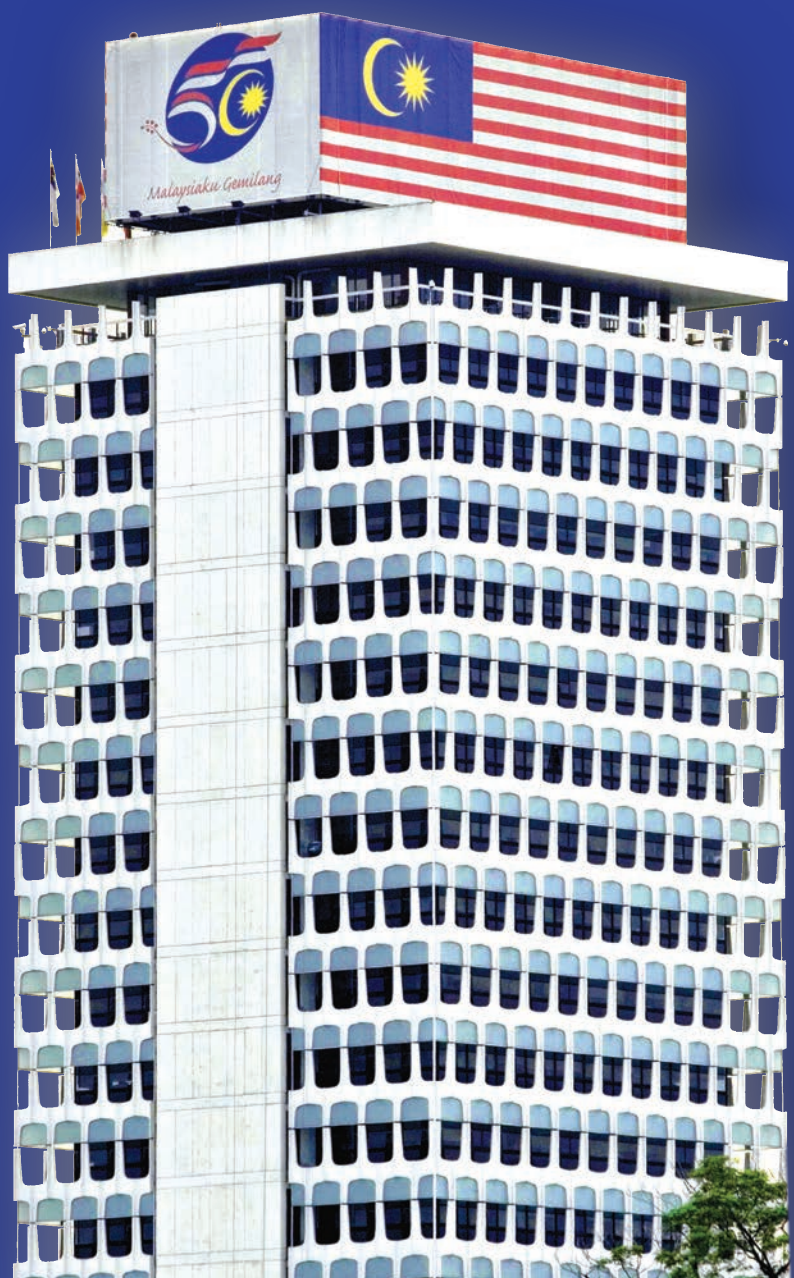


**Gedung Parlemen Malaysia di Kuala Lumpur**
AFP/GETTY IMAGES

Malaysia menghidupkan kembali penahanan tanpa persidangan ketika anggota parlemen menyetujui undang-undang anti-teror pada April 2015. Pemerintah mengatakan bahwa undang-undang ini diperlukan untuk memerangi militan Islam.

Pemerintah mengatakan pada akhir tahun 2014 bahwa dibutuhkan langkah-langkah baru setelah penangkapan 100 warga Malaysia yang diduga mendukung kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah. Lebih dari 60 warga Malaysia diyakini telah bergabung dengan perang di Suriah dan Irak, dan 10 warga lainnya telah terbunuh.

Undang-undang Pencegahan Terorisme disahkan oleh majelis rendah parlemen pada dini hari setelah perdebatan selama berjam-jam, dengan 79 suara setuju dan 60 suara menentang. Undang-undang ini mengizinkan pihak berwenang untuk menahan tersangka selama periode waktu tidak terbatas tanpa persidangan, dan larangan membawa kasus penahanan ini ke pengadilan.

Kritikus mengecam undang-undang ini sebagai kebangkitan undang-undang keamanan kontroversial yang dicabut pada tahun 2012, dan mereka memperingatkan bahwa undang-undang ini bisa sangat membatasi kebebasan sipil.

Undang-undang Pencegahan Terorisme, yang mulai dipertimbangkan oleh Parlemen pada Maret 2015, menekankan bahwa masyarakat tidak dapat ditahan hanya karena keyakinan atau aktivitas politik mereka.

Undang-undang kedua, Tindakan Khusus terhadap Terorisme di Luar Negeri, memberdayakan pihak berwenang untuk menangguhkan atau mencabut dokumen perjalanan setiap warga negara atau orang asing yang diyakini terlibat dalam atau mendukung aksi terorisme.

Media lokal mengutip Menteri Dalam Negeri Ahmad Zahid Hamidi yang mengatakan pada Maret 2015 bahwa dua rancangan undang-undang ini ditujukan untuk mengekang terorisme dan mencegah Malaysia menjadi tempat transit bagi teroris asing.

Bagian lain dari undang-undang ini menyerukan peningkatan hukuman bagi tindakan yang terkait dengan teror, termasuk hingga 30 tahun penjara bagi mereka yang diketahui menerima pelatihan atau instruksi, bepergian ke atau dari Malaysia untuk melakukan terorisme di negara asing, dan pembangunan "sarana transportasi" yang digunakan dalam aksi teror.

Kepemilikan barang-barang yang terkait dengan terorisme juga bisa menyebabkan dikenakannya hukuman tujuh tahun penjara, dan orang-orang yang diketahui hadir di tempat pelatihan teror bisa dikirim ke penjara selama 10 tahun.

Kritikus merasa khawatir bahwa undang-undang baru ini bisa membatasi hak-hak dasar dan disalahgunakan untuk menghukum seseorang secara tidak adil. Mereka mengatakan bahwa Undang-undang Pencegahan Terorisme mirip dengan Undang-undang Keamanan Dalam Negeri atau Internal Security Act (ISA) yang dihapus pada tahun 2012.

**Pemandangan di dalam Gedung Parlemen Malaysia di Kuala Lumpur pada Juli 2014** AFP/GETTY IMAGES

ISA diberlakukan pada tahun 1960 setelah pemberontakan komunis untuk memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mencegah ancaman keamanan nasional. Akan tetapi, selama beberapa dekade, lawan-lawan politik dan kritikus pemerintah kadang-kadang ditahan selama berbulan-bulan tanpa persidangan. "Saya merasa tidak ada bedanya antara ISA dan [RUU baru itu]. Seperti anggur lama dalam botol baru," kata anggota parlemen Wong Chen.

Kelompok hak hukum Lawyers for Liberty (Pengacara untuk Kebebasan) mengatakan pemberlakuan kembali "undang-undang preventif yang bersifat menindas dan ketinggalan zaman" tidak akan menyelesaikan bahaya militansi. Kelompok itu memperingatkan bahwa undang-undang tersebut memungkinkan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh polisi dan membuat tahanan hanya bisa mengandalkan belas kasihan dari pihak berwenang.

# *Menarget Hubungan* TERORIS *dengan Senjata Pemusnah Massal*

*Mengapa penting untuk menghentikan proliferasi senjata pemusnah massal*

DR. ALFRED OEHLERS

Ketika melakukan perjalanan di Asia, saya sering kali terkejut dengan rendahnya kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh proliferasi senjata pemusnah massal. Percakapan yang saya lakukan baru-baru ini dengan cendekiawan muda yang tampak cerdas dan sering melakukan perjalanan di sebuah bandara besar memberikan banyak pengalaman. Sambil menunggu penerbangan, kami membicarakan tantangan keamanan terbesar yang dihadapi negara-negara Asia saat ini. "Hah? Proliferasi?" Dia mengerutkan alisnya. "Tapi itu bukan masalah kami, kan? Itu masalah kalian!" Saya pastinya telah memberikan jawaban yang membingungkan. "Ya, iyalah," dia melanjutkan, "kalian di dunia maju, dunia pertama — kalian yang membuat semua ini dan menjualnya ke seluruh dunia. Lalu jatuh ke tangan yang salah dan diperdagangkan ke orang-orang jahat. Semua itu ulah kalian sendiri — tidak ada hubungannya dengan kami!"

Menetapkan masalah ini sebagai hal yang hanya terjadi di negara maju dan oleh karenanya tidak perlu dikhawatirkan oleh negara-negara berkembang di Asia adalah salah satu dari banyak alasan mengapa proliferasi memiliki peringkat rendah dalam imajinasi publik dan sering kali tetap menjadi prioritas yang rendah di kalangan pengambilan keputusan. Akan tetapi, ada pihak lain yang percaya bahwa karena negara mereka bukanlah negara sumber atau negara tujuan senjata pemusnah massal (WMD), mereka tidak akan pernah menjadi target proliferator atau penjahat yang ingin mengeksploitasi kerentanan tersebut. Jadi, mengapa repot-repot? Bahkan meskipun ada kehendak untuk mengatasi masalah ini, kalangan lain menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sangat teknis, canggih, dan kompleks sehingga membuat mereka kewalahan mengingat kemampuan yang mereka miliki terbatas. Penyebabnya terletak pada kurangnya peralatan deteksi, keterampilan, dan pelatihan yang diperlukan, serta diperparah dengan aturan hukum yang usang dan kurang tegas, sehingga membuat operator keamanan yang peduli sering kali sayangnya mengabaikan masalah ini. Tanpa adanya rasa urgensi dan prioritas tingkat tinggi seputar masalah ini dan apa lagi sudah dibanjiri serangkaian ancaman signifikan lainnya dan kemampuan yang sangat terbatas, apa yang bisa dilakukan?

Beberapa kendala dan tantangan yang sering kali disinggung merupakan hal nyata dan mengganggu kemampuan pihak-pihak yang bermaksud baik yang berkomitmen untuk mengatasi masalah proliferasi. Akan tetapi, kesalahan informasi dan informasi yang menyesatkan merongrong diskusi yang dalam dan upaya ke depan untuk mengatasinya. Sebagian besar masalah ini timbul karena kurangnya keakraban dengan topik ini. Keterlibatan dan dialog yang sabar dapat membantu membangun minat dan pemahaman yang seiring berjalannya waktu dapat diterjemahkan menjadi dukungan yang lebih kuat. Akan tetapi, penjangkauan seperti ini harus mencakup pembicaraan tentang bagaimana proliferasi dapat secara diam-diam merongrong keselamatan, keamanan, dan kedaulatan negara yang terkena dampak. Sering kali, mengingat sifatnya sebagai ancaman transnasional, diskusi tentang dampak negatif dari proliferasi dilakukan di tingkat supranasional — bagaimana hal ini merongrong keamanan, perdamaian dan stabilitas regional atau internasional, keamanan masyarakat dunia, dan sebagainya. Masalah ini harus dibawa lebih dekat ke intinya untuk negara-negara yang bersangkutan. Pada akhirnya, apa intinya? Bagaimana proliferasi akan memengaruhi ekonomi mereka, masyarakat mereka, pembangunan masa depan mereka, jika dibiarkan tidak terselesaikan? Apa untungnya bagi mereka? Mungkin

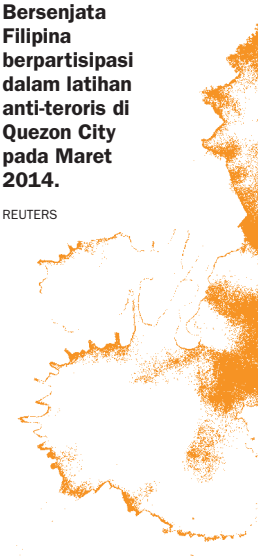

**Anggota unit bahan peledak kimia, biologi, radiologi, dan nuklir Angkatan Bersenjata Filipina berpartisipasi dalam latihan anti-teroris di Quezon City pada Maret 2014.**

REUTERS

kemudian, dengan narasi yang lebih menggugah tentang bagaimana proliferasi dapat menggagalkan pencapaian pembangunan signifikan mereka, akan ada alasan yang lebih kuat untuk mendorong aksi kerja sama.

## *Mendefinisikan fenomena*

Proliferasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran kemampuan senjata pemusnah massal. Penyebaran ini mungkin pada tingkat antar negara, tetapi juga dapat terjadi di antara pelaku negara dan non-negara atau bahkan di antara kelompok pelaku non-negara, semuanya ini didefinisikan secara luas. Kemampuan tidak hanya mengacu pada kepemilikan perangkat senjata pemusnah massal yang sudah jadi tetapi juga mencakup teknologi yang digunakan untuk memproduksi perangkat tersebut, materi dan bahan yang diperlukan, dan keahlian intelektual yang membimbing konsepsi dan pengembangan senjata tersebut.

Ada banyak jenis senjata pemusnah massal. Seperti tersirat dari namanya, ini adalah senjata yang mampu membunuh banyak orang dan menyebabkan kerusakan jangka panjang dan meluas. Biasanya terdapat empat kategori: nuklir, kimia, biologi, dan radiologi (meskipun disertakannya radiologi terkadang bisa diperdebatkan, seperti yang dijelaskan di bawah ini).

Senjata pemusnah massal nuklir mungkin yang paling dikenal, mengandalkan fisi atau fusi untuk melepaskan sejumlah besar energi dan kekuatan destruktif. Walaupun kita biasanya menganggapnya sebagai senjata strategis, senjata ini dapat dibuat dalam skala kecil untuk pengerahan di medan tempur taktis (dalam artileri, misalnya) atau sebagai perangkat yang bisa dibawa oleh manusia. Penyebaran terlarang senjata dan komponen strategis selalu menjadi perhatian, tapi sekarang yang menjadi lebih dikhawatirkan adalah bahwa perangkat taktis lebih kecil mudah disembunyikan dan diangkut, mungkin dengan daya tarik yang lebih luas, terutama bagi kelompok non-negara.

Senjata kimia menyebabkan kematian, bahaya permanen atau cacat sementara melalui efek racun dari beberapa bahan kimia. Ini mencakup, misalnya, zat penyebab iritasi paru-paru (klorin dan fosgen), zat darah (hidrogen sianida), zat pelepuh (zat mustard), dan zat saraf (sarin, tabun, VX). Dengan beberapa pengecualian, zat kimia ini mudah diperoleh dan diakses di hampir semua negara yang memiliki sektor industri yang cukup besar. Dari perspektif proliferasi, kategori ini memberikan tantangan berat karena prekursor dasar untuk setiap jenis campuran beracun mudah didapat oleh banyak penjahat.

Senjata biologi membunuh dan melukai manusia dan hewan serta menghancurkan tanaman dan hasil panen dengan memaparkannya pada zat biologis hidup. Contohnya termasuk patogen (bakteri, virus, dan jamur seperti antraks, kolera, pes, dan cacar) dan berbagai toksin (zat kimia beracun yang dihasilkan oleh sistem hidup — misalnya, risin dan toksin botulinum).

Terakhir, ada perangkat radiologi (atau "bom kotor"). Perangkat ini terdiri dari bahan radioaktif yang dilekatkan pada bahan peledak konvensional yang bila diledakkan, menyebarkan kontaminasi radioaktif. Senjata ini merupakan senjata rakitan, biasanya dibuat oleh kelompok teroris, dengan dampak nyata yang terbatas sehubungan dengan kematian dan kehancuran. Itulah mengapa masih diperdebatkan apakah senjata ini seharusnya dimasukkan sebagai senjata pemusnah massal. Akan tetapi, jika efek guncangan ekonomi dan psikologis dari senjata ini dipertimbangkan, malapetaka yang diakibatkannya tidak boleh dianggap remeh.

Karena bahaya mengerikan yang dapat disebabkan oleh senjata pemusnah massal, makin banyak dilakukan upaya internasional untuk menghentikan penyebaran senjata tersebut dan melenyapkannya dengan tuntas. Protokol internasional yang mengatur senjata nuklir, biologi, dan kimia telah dibentuk untuk menghentikan penyebaran senjata tersebut dan diberlakukan dengan ketat. Untuk mencegah pelemahan protokol ini dan perdagangan gelap, perjanjian kontraproliferasi juga diberlakukan, seperti kontrol ekspor nasional, Prakarsa Keamanan Proliferasi (Proliferation Security Initiative), dan di tingkat internasional, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1540.

Meskipun adanya upaya internasional ini, risiko proliferasi mengalami peningkatan. Sungguh kontradiktif, kekuatan globalisasi yang bertanggung jawab untuk membawa kemajuan terhadap sebagian besar dunia memiliki sisi lebih gelap, sehingga memudahkan proliferator untuk melaksanakan perdagangan mereka. Meningkatnya keterkaitan global, baik melalui peningkatan jaringan transportasi, komunikasi atau bahkan pertukaran ide, telah mempermudah akses ke materi dan komponen senjata pemusnah. Sekarang ini sudah ada beberapa pasar gelap atau abu-abu yang dikenal secara luas menyediakan materi atau keahlian dalam senjata pemusnah massal, baik dalam arti fisik (terutama di ruang yang kurang mendapatkan pengawasan) dan ranah virtual. Kemajuan ilmiah dan teknologi yang cepat menghasilkan inovasi tiada henti, beberapa inovasi ini memiliki potensi efek destruktif. Kejahatan terorganisir internasional telah berkembang di dunia global ini, menyusupkan dirinya ke dalam posisi yang berpengaruh dalam rantai pasokan senjata pemusnah massal yang menguntungkan. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, kelompok non-negara seperti Negara Islam Irak dan Suriah telah menguasai wilayah yang pernah memiliki fasilitas untuk pembuatan dan penimbunan bahan-bahan senjata pemusnah massal. Penggunaan atau pemindahan bahan-bahan tersebut oleh kelompok-kelompok ini

***MENGATASI PROLIFERASI AKAN SELALU MENJADI TANTANGAN.*** *Proliferator terus mengadaptasi permainan mereka, mencari cara untuk menghindari deteksi dan terus berada satu langkah di depan penegak hukum.*

menambah kekhawatiran lebih lanjut terhadap masalah yang sudah merepotkan ini.

Di sebagian besar kawasan, kemampuan penegak hukum dalam deteksi, pencegatan, dan penuntutan masih belum bisa mengikuti kecepatan perkembangan yang meluas ini. Banyak negara — termasuk negara-negara di Asia — masih sangat rentan terhadap eksploitasi oleh proliferator. Sifat eksploitasi tersebut bervariasi, tergantung pada negara yang bersangkutan dan kebutuhan proliferator. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa ada banyak sekali pilihan yang tersedia. Sebuah negara dapat digunakan sebagai pangkalan untuk mendapatkan barang untuk proliferasi atau sebagai lokasi perakitan senjata parsial atau senjata jadi. Atau mungkin berfungsi sebagai bagian dari rantai penipuan yang lebih luas yang dirancang untuk menyembunyikan pergerakan kargo terlarang — tempat tujuan palsu untuk membuat dokumen komersial palsu, melibatkan atau menipu pialang dan bisnis setempat untuk membuat bisnis samaran, titik pemindahan pengangkutan atau transit, titik mudah untuk mengakses layanan perbankan atau layanan intermediasi keuangan lainnya.

Jika dibiarkan begitu saja, seiring berjalannya waktu proliferasi akan menimbulkan beberapa efek merusak pada negara-negara yang terkena dampaknya. Proliferator, misalnya, sering kali memanfaatkan korupsi di negara-negara ini sehingga mempercepat penurunan kualitas tata kelola dan supremasi hukum. Seiring dengan jatuhnya keyakinan terhadap lembaga pemerintah dan posisi pemerintah, perdagangan yang sah tergerogoti dan perdagangan sah suku cadang, materi, teknologi, dan ide tentunya akan paling terancam. Reputasi perusahaan, pelabuhan, dan pihak berwenang di negara-negara yang terkena dampak akan mengalami konsekuensi buruk. Kepercayaan dan keyakinan — yang sangat diperlukan untuk memajukan perdagangan — akan melemah dan mungkin menghambat kemakmuran bangsa. Negara-negara yang merupakan bagian dari rantai pengembangan senjata pemusnah massal juga terkena risiko insiden yang terkait dengan senjata pemusnah massal. Meskipun mungkin dikatakan risiko tersebut kecil kemungkinannya, biaya "kecelakaan" yang melibatkan materi senjata pemusnah massal, baik jangka pendek (yang meliputi hilangnya nyawa dan kerusakan fisik) maupun jangka panjang (yang meliputi dekontaminasi, reputasi, dan biaya lainnya), tidak boleh diabaikan. Lintasan positif kemajuan bangsa pun akan mengalami kemunduran yang signifikan.

Mengatasi proliferasi akan selalu menjadi tantangan. Proliferator terus mengadaptasi permainan mereka, mencari cara untuk menghindari deteksi dan terus berada satu langkah di depan penegak hukum. Proliferator terus-menerus mencari pemasok alternatif baru, jaringan dan perusahaan samaran yang lebih rumit, penipuan dokumen yang semakin canggih, dan semakin banyak titik pemindahan pengangkutan dan rute yang berbelit-belit. Dengan kecanggihan teknologi, proliferator juga akan mencari barang baru yang ingin diperoleh yang masih belum dicantumkan pada daftar larangan. Negara-negara yang mengejar target-target bergerak ini akan membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat dari seluruh kalangan pemerintah. Kurang meluasnya penyebaran informasi di kalangan pihak berwenang dan cara berpikir tentang proliferasi perlu diatasi untuk menyatukan pihak-pihak terkait dari seluruh rantai pasokan proliferasi untuk mengatasi masalah ini. Pembentukan jaringan kerja yang lebih kuat di tingkat regional dan internasional juga dapat memainkan peran penting, terutama dalam berbagi informasi atau partisipasi dalam proyek bersama seperti Prakarsa Pengamanan Peti Kemas (Container Security Initiative). Kewaspadaan adalah kuncinya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan proliferasi dan mengembangkan kepedulian masyarakat secara aktif mengenai risiko yang ditimbulkan oleh proliferasi akan menjadi hal yang sangat penting.

# MENGHENTIKAN LALU LINTAS SENJATA PEMUSNAH MASSAL

## *Cara mengembangkan layanan dukungan teknis*

DEPARTEMEN ENERGI A.S.

Menarget secara efektif hubungan terorisme dengan senjata pemusnah massal (Weapons of Mass Destruction - WMD) dalam jangka panjang mengharuskan pemerintah mengatasi faktor-faktor penyebab yang memicu dan mendukung ekstremisme kekerasan. Akan tetapi, dalam jangka pendek, pemerintah harus berupaya membatasi akses ke senjata dan komponen yang ingin digunakan oleh kelompok teroris guna mencapai sasaran mereka. Ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah, karena inovasi teknologi dan cepatnya penyebaran pengetahuan telah menempatkan senjata pemusnah massal dan senjata kimia, biologi, radiologi, dan nuklir (CBRN) rakitan dalam jangkauan kelompok teroris yang berniat menggunakannya untuk menciptakan kekacauan dan korban jiwa. Kewaspadaan dan kerja sama antara militer, penegak hukum, petugas patroli perbatasan, dan pejabat teknis — dikombinasikan dengan perundang-undangan yang sesuai untuk melarang kegiatan teroris dan mengatur komoditas sensitif — diperlukan untuk memerangi terorisme senjata pemusnah massal secara efektif dan proaktif.

Selain peningkatan penyebaran pengetahuan dan informasi, berkembang pesatnya ekonomi dan industri global membuat materi dan komoditas penggunaan ganda yang terkait dengan CBRN menjadi lebih banyak dan mudah diakses. Meskipun pembuatan dan produksi skala besar program senjata pemusnah massal masih memerlukan investasi yang sangat besar dalam pengembangan modal industri dan manusia yang sebagian besar membatasi akuisisi bagi negara berdaulat, saat ini banyak materi, komponen, dan teknologi penting yang tersedia dan dapat diimprovisasi pada skala kecil dengan sumber daya yang relatif sedikit. Teroris secara rutin memanfaatkan aliran informasi bebas dan barang-barang yang mudah diakses untuk memutakhirkan taktik dan senjata mereka dengan menyertakan inovasi ilmiah dan teknologi terbaru ke dalam rencana mereka.

**Tentara Filipina berpartisipasi dalam latihan anti-teror di Kamp Aquinaldo, Manila, pada Maret 2014.**

AFP/GETTY IMAGES

LBC

***TERORIS SECARA RUTIN MEMANFAATKAN ALIRAN INFORMASI BEBAS** dan barang-barang yang mudah diakses untuk memutakhirkan taktik dan senjata mereka dengan menyertakan inovasi ilmiah dan teknologi terbaru ke dalam rencana mereka.*

Mengingat aksesibilitas barang-barang tersebut dan keterbatasan sumber daya, organisasi teroris cenderung berupaya mendapatkan perangkat CBRN atau senjata pemusnah massal rakitan berskala kecil — mulai dari bahan kimia industri beracun yang digunakan untuk tujuan lain, seperti amonia atau klorin, hingga senjata seperti antraks dan perangkat penyebar radiologi (juga dikenal sebagai bom kotor).

Ketika barang, teknologi, dan keahlian sensitif mudah diperoleh, komoditas tertentu lebih mungkin dieksploitasi daripada komoditas lain untuk senjata CBRN. Misalnya, materi, komponen, dan peralatan biologi dan kimia yang terkait dengan senjata pemusnah massal memiliki risiko terbesar untuk digunakan oleh organisasi teroris karena mudah diperoleh. Meskipun senjata nuklir belum digunakan oleh teroris dan akan lebih sulit untuk dikembangkan, organisasi teroris telah mengatakan bahwa mereka ingin menggunakan senjata ini, dan beberapa telah mempekerjakan ahli teknis dan mengambil langkah-langkah untuk meneliti senjata tersebut. Belum ada organisasi teroris yang menggunakan senjata radiologi, tetapi telah ada upaya untuk melakukannya. Selain itu, isotop radioaktif curian atau terlantar tetap menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Menurut laporan Database Perdagangan Gelap Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tahun 2014, 125 negara peserta melaporkan lebih dari 2.477 insiden bahan nuklir di luar kendali regulasi antara tahun 1993 dan 2013. Dari jumlah tersebut, 424 adalah insiden kepemilikan kriminal termasuk upaya untuk memindahkan, membeli atau menjual sumber radioaktif. Selama periode waktu yang sama, dilaporkan adanya 664 insiden lain terkait materi radioaktif hilang atau dicuri, demikian menurut database tersebut. Materi yang dilaporkan berkisar dari isotop yang tidak begitu berbahaya hingga yang sangat berbahaya seperti cesium-137 dan amerisium-241.

Memerangi ancaman CBRN membutuhkan pemahaman tentang komponen dan teknologi yang biasanya tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, penting bagi penegak hukum untuk memelihara hubungan kerja yang erat dengan ahli di bidangnya dan instansi teknis yang dapat

**Anggota unit bahan peledak kimia, biologi, radiologi, dan nuklir Angkatan Bersenjata Filipina membantu korban simulasi dalam latihan anti-teroris di Quezon City pada Maret 2014.**

REUTERS

memberikan pelatihan mengenai efek, dampak, dan spesifikasi teknis komoditas yang terkait dengan CBRN. Pencegahan terorisme senjata pemusnah massal secara efektif membutuhkan pembiasaan diri aparat penegak hukum tidak hanya dengan komoditas CBRN, tetapi juga dengan lembaga dan pakar nasional yang dapat membantu mengidentifikasi, mengamankan, mengangkut, mengelola, menanggapi, dan menyelidiki insiden senjata pemusnah massal. Selain itu, ahli teknis memiliki posisi yang lebih baik dalam meminta bantuan internasional dari IAEA dan organisasi lainnya seandainya diperlukan sumber daya tambahan. Layanan dukungan teknis yang diberikan lembaga-lembaga ini kepada aparat penegak hukum garis depan sangatlah berharga dan seharusnya menjadi elemen tak terpisahkan dari upaya nasional untuk mencegah proliferasi dan menarget terorisme senjata pemusnah massal.

Upaya teroris untuk mendapatkan senjata pemusnah massal merupakan ancaman nyata dan berkesinambungan bagi keamanan internasional. Kerja sama di antara lembaga militer, bea cukai, penegak hukum, dan teknis untuk lebih memahami ancaman terorisme senjata pemusnah massal dan komoditas CBRN sangat penting untuk melawan upaya teroris dalam memperoleh, mengembangkan, dan menggunakan senjata-senjata ini. Membangun kemitraan layanan dukungan teknis di antara organisasi teknis dan penegak hukum sejak dini sebagai bagian integral dari pelatihan dapat merampingkan komunikasi pada saat insiden CBRN yang kritis dan sensitif terhadap waktu. Pendekatan antarlembaga terhadap pelatihan, dikombinasikan dengan perundang-undangan dan peraturan anti-teror yang kuat untuk komoditas yang terkait dengan CBRN, membangun kemampuan nasional untuk menarget dan mencegah tindak terorisme senjata pemusnah massal rakitan. □

# EFEK KIM JONG UN

ILUSTRASI *FORUM*

**ANALIS KOREA UTARA MENGAMATI DENGAN CERMAT PEMIMPIN NEGARA INI UNTUK MEMPELAJARI SEBANYAK MUNGKIN TENTANG DIRINYA DAN MEMBATASI KETEGANGAN DI SEMENANJUNG KOREA**

STAF *FORUM*

***Kim Jong Un muncul sebagai tanda tanya besar di panggung dunia pada Desember 2011, ketika dia mewarisi kediktatoran Korea Utara setelah kematian ayahnya, Kim Jong Il.***

Sebelum dia memegang tampuk kekuasaan, hanya segelintir orang yang mendapatkan konfirmasi bahwa Kim Jong Un merupakan sosok nyata. Debut resminya terjadi pada tahun 2010 ketika Kim diperkenalkan saat parade militer sebagai jenderal bintang empat dan wakil ketua Komisi Militer Pusat negara itu. Tidak ada yang tahu berapa usianya, meskipun Korea Utara merayakan ulang tahunnya pada tanggal 8 Januari. Sumber informasi tidak dapat memastikan apakah dia lahir pada tahun 1982, 1983 atau 1984.

Masa kecil dan masa remajanya begitu terlindungi sehingga hampir mirip dengan pemenjaraan, kata beberapa orang. Ketika menuntut ilmu di Swiss, dia menggunakan nama samaran "Un Pak" dan diklaim sebagai putra diplomat yang bekerja di Kedutaan Besar Korea Utara setempat.

"Secara resmi dia merupakan rahasia negara," kata Andrei Lankov, ahli sejarah Korea Utara dan profesor di Kookmin University, Seoul, Korea Selatan, kepada *FORUM*.

Sebagian besar kehidupan pribadi Kim tatkala dewasa tetap terselubung dalam kerahasiaan.

Istrinya, Ri Sol Ju, tidak tampil di depan umum selama empat bulan sampai dia muncul bersama suaminya pada April 2015 di perayaan ulang tahun almarhum Kim Il Sung, pendiri Korea Utara dan kakek dari Kim Jong Un.

Mantan pemain basket Dennis Rodman, orang Amerika, adalah orang yang mengumumkan nama putri Kim Jong Un kepada dunia, mengatakan pada bulan September 2013 bahwa dia menggendong bayi Ju Ae saat berkunjung ke Pyongyang. Rodman menyebut Kim sebagai "ayah yang baik."

Pengamat menyerap serpihan informasi dan gambaran sekilar dinasti Kim ini dengan harapan mampu belajar

**Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, ketiga dari kiri, memberikan penghormatan saat dia dan istrinya, Ri Sol Ju, berjalan melewati barisan kehormatan setelah tiba untuk menghadiri Kontes Penerbangan Tempur 2014 antara komandan Angkatan Udara Rakyat Korea di foto tak bertanggal yang dirilis pada Mei 2014.**

REUTERS

lebih banyak tentang orang yang dianggap kritikus sebagai orang yang paling tidak mungkin untuk memerintah negara itu di antara saudara-saudaranya. Hampir empat tahun setelah menjalani kediktatorannya, dunia tampaknya masih belum bisa menjawab pertanyaan tentang siapa sebenarnya Kim Jong Un.

"Dia tidak dapat diprediksi. Dia akan tetap tak terduga," kata Lankov, penulis buku, *The Real North Korea: Life and Politics in the Failed Stalinist Utopia*. "Dia orang yang masih muda, emosional, dan tidak sabaran yang membuat keputusan yang terlihat aneh."

Namun, hal itu tidak menghentikan peneliti atau kantor berita untuk menganalisis tindakan terbaru Kim dalam upaya untuk menilai pola pikirnya saat ini dan memprediksi langkahnya berikutnya.

Pejabat senior A.S. yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada blog Internet Security Clearance CNN bahwa meskipun Kim Jong Il "lebih dingin dan lebih banyak perhitungan" dalam tindakannya, tetapi dia tetap lebih mengetahui cara-cara untuk meredakan ketegangan daripada putranya.

"Tidak ada yang tahu apa yang dia [Kim Jong Un] rencanakan, apa yang dia pikirkan atau renungkan untuk dilakukan atau mengapa Korea Utara menggandakan retorika mereka tiga kali lipat," kata sumber yang tidak disebutkan namanya kepada CNN pada Maret 2013.

John Delury, ahli tentang Korea Utara di Yonsei University, Seoul, mengatakan bahwa Kim telah melampaui harapan dalam beberapa hal.

"Dia muncul sebagai kepala negara termuda di planet ini, dalam budaya yang menghargai usia dan senioritas dan dalam sistem politik dengan banyak orang-orang berkuasa yang berusia lebih dari 60 tahun," kata Delury kepada surat kabar *Stars and Stripes* pada Desember 2014. "Ini memberi tahu kita sedikit tentang dirinya dan sedikit tentang sistem mereka — meskipun Anda masih muda, siapa pun yang berada dalam garis keturunan penguasa — banyak orang akan menyukseskannya."

Kim Jong Il berada dalam posisi yang sama ketika dia mulai memegang tampuk kepemimpinan pada tahun 1980-an, kata Lankov. Kedua pria ini membuat kesalahan ketika mereka belajar cara untuk memimpin, tapi mereka membuat penyesuaian dengan cepat, katanya. "Manusia itu cerdas. Kita mampu belajar dari kesalahan kita. Kita ini tak pernah berhenti belajar," kata Lankov kepada *FORUM*.

## WARISAN KIM

Korea Utara benar-benar menuntut pemujaan sepenuhnya dan terang-terangan terhadap negara dan, khususnya, keluarga Kim.

Mural, patung, poster, dan museum memberitakan legenda keturunan Kim yang telah memimpin negeri ini — mungkin tidak ada yang bisa melebihi Kim Il Sung.

Lahir pada 15 April 1912, Kim Il Sung menjadi presiden Korea Utara pada tahun 1972 dan menjabat sampai meninggal pada 8 Juli 1994. Kim Il Sung juga menjabat sebagai pemimpin partai dan perdana menteri Republik Demokratik Rakyat Korea sejak tahun 1948.

Gelar-gelar yang dimiliki oleh Kim Il Sung adalah Bapak Rakyat, Pemimpin Besar, dan Presiden Abadi. Rakyat Korea Utara bahkan menyebutnya sebagai "Pemimpin Tercinta, yang merupakan perwujudan sempurna dari penampilan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin."

Karena kasih sayang yang tak tergoyahkan dari rakyat negara ini untuk Kim Il Sung, Kim Jong Un memilih untuk sebisa mungkin membuat banyak kemiripan dengan kakeknya, kata Lankov, sampai-sampai meniru gaya berpakaian kakeknya.

Rakyat Korea Utara pada umumnya menyalahkan Kim Jong Il atas kelaparan di negara itu selama periode 1990-an, sehingga Kim Jong Un berupaya sebaik mungkin untuk menjauhkan diri dari citra ayahnya karena kepahitan yang takkan pernah hilang itu, kata Lankov.

"Ada beberapa interpretasi politik mengenai kemiripan Kim Jong Un dengan Kim Il Sung. Salah satunya adalah bahwa Kim Jong Un sengaja meniru kakeknya dengan harapan bahwa warisan kakeknya akan membantunya meningkatkan basis kekuasaannya sendiri," demikian menurut analisis tentang kepemimpinan Kim Jong Un yang diterbitkan pada Desember 2014 di *The Hankyoreh*, surat kabar yang berbasis di Seoul.

Laporan itu mencakup penilaian tentang kepemimpinan Kim Jong Un dari Kementerian Unifikasi Korea Selatan: "Meskipun memainkan nostalgia masa lalu dengan meniru gerak-gerik dan penampilan kakeknya, Kim Il Sung, Kim Jong Un juga sedang mengembangkan gaya kepemimpinan uniknya sendiri."

## TEMAN, MUSUH, DAN SIAPA YANG TAHU

Lankov melihat lebih banyak kemiripan antara Kim Jong Un dan kakeknya daripada sekadar kemiripan fisik dan gerak-gerik nostalgia belaka, terutama terkait dengan hubungan Korea Utara saat ini dengan Tiongkok dan Rusia.

Tiongkok telah menjadi sekutu lama Korea Utara, tapi provokasi terbaru Kim Jong Un, terutama atas program nuklir Korea Utara, terkadang menyebabkan Beijing menjauhkan diri dari Pyongyang.

Berita utama tentang ketegangan yang memuncak antara kedua negara ini diterbitkan secara reguler di sepanjang tahun 2014. Pada akhir spekulasi tersebut muncul pengumuman bahwa Korea Utara telah menetapkan tahun 2015 sebagai "tahun persahabatan" dengan Rusia ketika Pyongyang menggandeng Moskow untuk menjalin kerja sama ekonomi dalam rangka mengurangi ketergantungan pada Beijing, tulis *Financial Times* pada April 2015.

"Hubungan politik antara negara kami berkembang lebih produktif daripada sebelumnya," kata Im Cheon Il, diplomat Korea Utara yang berbasis di bagian timur Rusia, demikian menurut *Financial Times*.

Pada Oktober 2014, Rusia setuju untuk memperbaiki rel kereta api sepanjang 3.500 kilometer di Korea Utara sebagai imbalan atas akses ke batu bara dan mineral lainnya.

Apakah ketegangan yang dirasakan di antara Tiongkok dan Korea Utara adalah katalis bagi hubungan antara Pyongyang dan Moskow masih menjadi hal yang diperdebatkan. Selain itu, investasi antara Korea Utara dan Tiongkok masih terjalin dengan baik sehingga hubungan ekonomi ini akan memastikan tetap stabilnya hubungan diplomatik, meskipun kadang-kadang mungkin muncul ketegangan akibat tindakan Kim Jong Un.

"Beijing dan Pyongyang terlalu penting bagi satu sama lain dan tidak mungkin mengakhiri hubungan kedua negara dalam waktu dekat," karena Tiongkok membukukan 57 persen impor Korea Utara dan 42 persen ekspor Korea Utara, demikian menurut laporan pada Maret 2015 di majalah *The Diplomat* berjudul, "No, China Isn't Abandoning North Korea." "Korea Utara sangat bergantung pada perdagangan dan energi Tiongkok, dan Korea Utara juga merupakan bagian sentral dari sasaran strategis regional Beijing. Oleh karena itu, posisi Beijing mengenai program nuklir Pyongyang tidak seharusnya dianggap sebagai refleksi dari sikapnya terhadap Pyongyang secara umum."

Lankov memiliki pendapat yang sama, meskipun dia tidak melihat hubungan antara Korea Utara dan Rusia berjalan seperti yang diinginkan oleh Kim Jong Un.

"Dia mungkin sebentar lagi akan kecewa," kata Lankov kepada *FORUM*. "Dia berharap untuk mendapatkan bantuan, yang tidak akan memerlukan kewajiban dari pihaknya."

Lankov mengatakan bahwa Rusia akan berinvestasi di Korea Utara selama Rusia menerima imbalan dari investasi itu. Begitu hubungan itu memburuk — dan Lankov memprediksi hal itu akan terjadi — Korea Utara pada akhirnya akan kembali menjalin hubungan baik dengan Tiongkok.

"Tiongkok pada dasarnya sudah bosan dengan Korea Utara," kata Lankov. "Meskipun demikian, Tiongkok masih membutuhkan negara penyangga yang dapat diandalkan."

## PERBAIKAN SOSIAL DAN STATUS QUO

Lankov menekankan bahwa Korea Utara bukanlah negara miskin seperti yang pernah diyakini secara luas. Reformasi yang terjadi saat ini telah mendorong negara itu ke dalam tahap pemulihan, dan tanda-tanda perbaikan ekonomi telah tumbuh.

"Banyak dari revolusi paling penting dari sebuah negara dimulai ketika negara itu dalam kondisi biasa-biasa saja," kata Lankov. "Korea Utara memang miskin tapi tidak putus asa. Semuanya menjadi lebih baik, tapi tidak berarti adanya kemapanan."

Meskipun ada reformasi struktural internal, tapi jangan berharap adanya perubahan kebijakan, baik luar negeri maupun domestik. "Dia tidak akan berkompromi pada apa pun," kata Lankov tentang Kim Jong Un.

Tentang reunifikasi, Lankov mengatakan bahwa Tiongkok kemungkinan akan menerima Korea bersatu namun percaya bahwa Beijing lebih suka semenanjung yang tetap terbagi tapi stabil, terutama mengingat penilaiannya bahwa perang kecil kemungkinannya untuk terjadi.

"Korea Selatan tidak akan memulai perang. Mereka kemungkinan akan menang, tetapi dengan biaya yang sangat besar," kata Lankov, menjelaskan bahwa Korea Selatan kemungkinan akan mengorbankan Seoul dalam pertempuran hanya untuk mewarisi area yang luas, sangat miskin, dan rusak di perbatasan. "Tidak akan menjadi kemenangan yang murah dan mudah bagi Korea Selatan."

Jujur saja, Korea Utara kecil kemungkinannya untuk memulai perang, karena mereka tahu bahwa mereka akan kalah dalam peperangan, kata Lankov. □

**Rakyat Korea Utara mengibarkan bendera dan berjalan melewati patung mantan pemimpin Kim Jong Il pada parade militer di Alun-Alun Kim Il Sung, pada Juli 2013.**

AFP/GETTY IMAGES

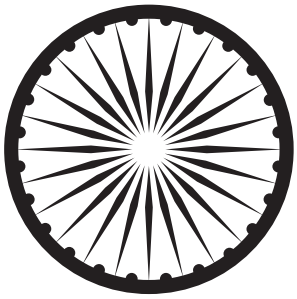

# **TINDAKAN** POLITIK

*India mengganti nama kebijakan "Berpaling ke Timur" menjadi "Bertindak ke Timur" dan mendorong lebih banyak agenda tindakan dengan mitra regional*

STAF *FORUM*

Salah satu kebijakan eksternal terlama di India telah mengalami perubahan nama, dan para pemimpin negara ini ingin segera menyebarluaskannya — terutama kepada negara-negara tetangga di bagian timur.

"Era baru pembangunan ekonomi, industrialisasi, dan perdagangan telah dimulai di India," kata Perdana Menteri Narendra Modi dalam KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)-India pada November 2014, hanya enam bulan setelah menjabat melalui kemenangan telak dalam pemilu bersejarah.

Untuk menyambut era baru ini, nama kebijakan "Berpaling ke Timur" yang berusia hampir 25 tahun diubah menjadi "Bertindak ke Timur." Perubahan nama ini memberikan sinyal ke kawasan ini, dan dunia, bahwa akan ada keterlibatan strategis baru.

Dalam perjalanan baru-baru ini, Modi sengaja membuat komentar untuk menekankan kebijakan yang lebih berorientasi pada tindakan ketika berhubungan dengan ASEAN dan negara-negara di timur laut. Pemerintahnya tidak menyia-nyiakan waktu untuk membuktikan bahwa mereka akan menindaklanjutinya dengan tindakan.

Modi mengunjungi Jepang dalam perjalanan pertamanya di luar Asia Selatan sebagai perdana menteri; dia menyambut Perdana Menteri Australia Tony Abbott sebagai pemimpin asing pertama yang mengunjungi New Delhi; dan pemerintahan Modi telah melakukan pertukaran diplomatik dengan Vietnam.

"Visi dan komitmen kami adalah mengutamakan kemajuan negara, posisinya di dunia, dan kebahagiaan rakyat," kata Modi kepada surat kabar *Hindustan Times* pada April 2015. "Kami mengambil serangkaian langkah yang memulihkan kepercayaan akan kemampuan kami untuk bekerja dengan mengutamakan transparansi, efisiensi, dan kecepatan."

Analis menyebut kebijakan Bertindak ke Timur dari Modi ini pragmatis dan mengatakan bahwa selain meningkatkan hubungan ekonomi, India berharap untuk memanfaatkan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pengaruh Tiongkok di kawasan itu.

"Dalam beberapa tahun terakhir, India mengisyaratkan kesediaan untuk memainkan peran strategis yang lebih besar di kawasan tersebut, memperdalam hubungan dengan mitra seperti Jepang, Vietnam, dan Australia," demikian menurut

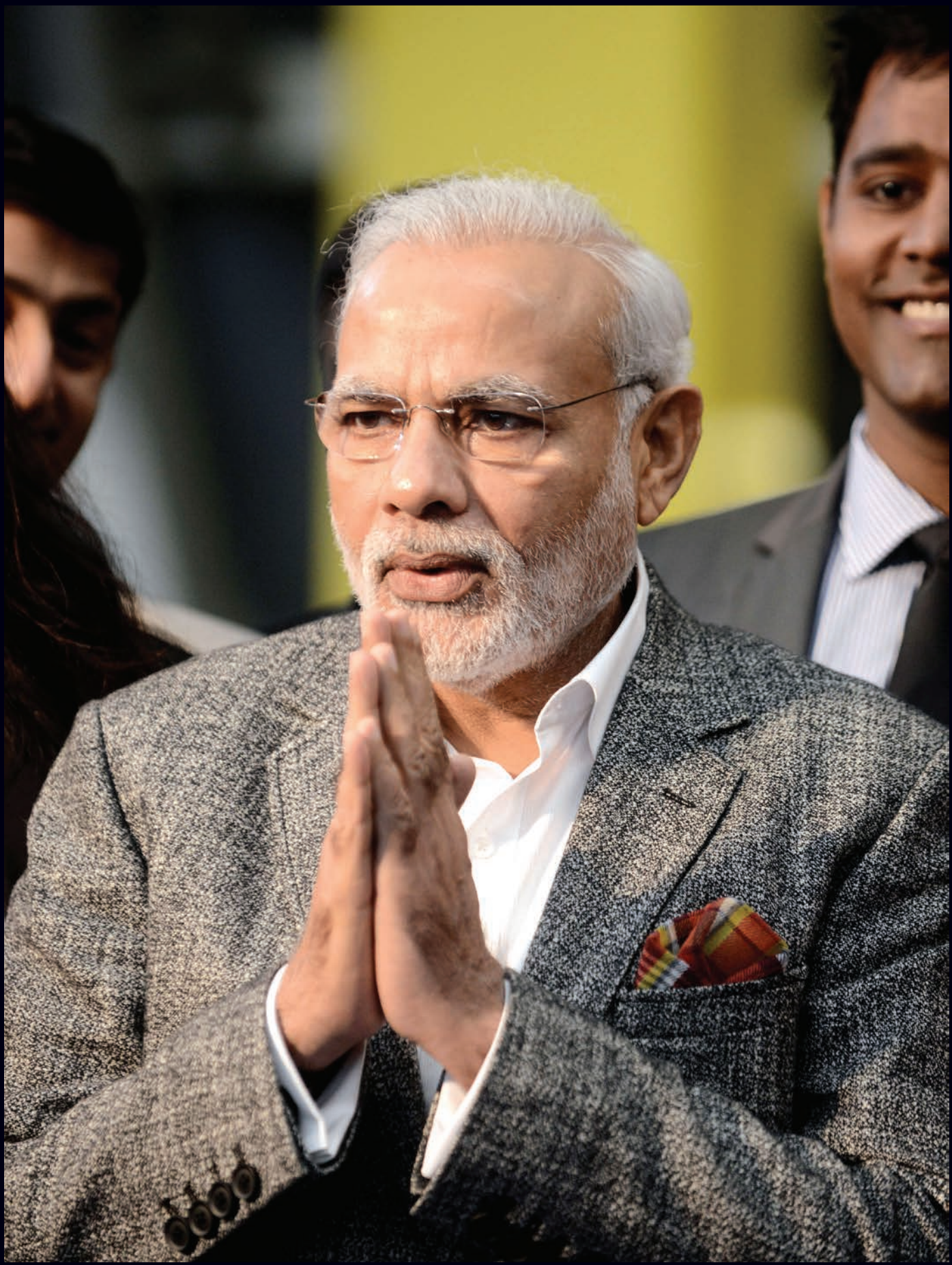

**Perdana Menteri India Narendra Modi** AFP/GETTY IMAGES

**DARI KIRI:**

**Presiden Singapura Tony Tan Keng Yam memeriksa barisan kehormatan pada acara resepsi seremonial di Istana Presiden, New Delhi, pada Februari 2015. Para pemimpin India mengatakan bahwa Singapura adalah salah satu mitra terkuatnya.** AFP/GETTY IMAGES

**Gedung Kementerian Keuangan India diterpa cahaya matahari terbenam di New Delhi pada April 2015. Sebagai bagian dari kebijakan "Bertindak ke Timur" India, negara ini berupaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi.** REUTERS

**Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung, kedua dari kanan, dan istrinya, Tran Thanh Kiem, tengah, berdoa pada kunjungan mereka ke kuil Buddha di India pada Oktober 2014. Vietnam telah meminta bantuan India dalam melatih petugas intelijen.** THE ASSOCIATED PRESS

laporan terbitan Desember 2014 dari Lowy Institute for International Policy yang berbasis di Sydney berjudul "India's New Asia-Pacific Strategy: Modi Acts East." "Kebijakan ini telah didorong oleh strategi India untuk menciptakan keseimbangan eksternal terhadap Tiongkok dan termotivasi oleh keinginan India untuk memainkan peran global yang lebih besar serta kebangkitannya sebagai negara perdagangan."

Terkait dengan Tiongkok, India ingin berbagi informasi dengan Jepang sebagai sarana untuk memantau kepentingan dan sumber daya di Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan — dan pada umumnya untuk mempertahankan kesadaran situasional tentang meluasnya kemampuan militer lintas perbatasan Tiongkok, ungkap surat kabar *The Times of India* pada Maret 2015.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan bahwa negaranya memiliki pandangan yang sama dengan India terkait dengan Laut Cina Selatan dan klaim ambisius Tiongkok. Dia menyarankan agar Australia dan India bekerja sama untuk mendorong dibuatnya pedoman perilaku, demikian laporan Indo-Asian News Service pada April 2015.

Para pejabat Tiongkok telah mendengar wacana tersebut dan mengamati kemitraan yang mulai terjalin. Menanggapi kekhawatiran yang makin meningkat atas ketegasan di Laut Cina Selatan, seorang pejabat Tiongkok membantah "ketidakamanan" atau pembatasan kebebasan untuk bernavigasi di kawasan tersebut, menurut laporan terbitan Maret 2015 di surat kabar *The Economic Times*.

"Masalah tersebut tidak terjadi," kata Duta Besar Tiongkok Le Yucheng mengenai masalah navigasi dan keamanan di Laut Cina Selatan. "Tiongkok jauh lebih tertarik daripada pihak lain dalam memastikan keamanan perairan tersebut."

## MEMPERDALAM HUBUNGAN PERTAHANAN

P. V. Narasimha Rao, Perdana Menteri India dari tahun 1991 hingga 1996, memprakarsai kebijakan Berpaling ke Timur ketika negara ini menghadapi situasi ekonomi dan politik dalam negeri yang memburuk. Ketegangan global sebelum Perang Teluk tahun 1990-1991 menimbulkan resesi ekonomi di India, kemudian berperan sebagai katalis bagi negara ini untuk mencari peluang ekonomi di tempat lain di Indo Asia Pasifik, demikian menurut analisis Lowy Institute.

Sekarang ini, lebih dari dua dekade kemudian, kebijakan Berpaling ke Timur/ Bertindak ke Timur dari India ini mencakup keterlibatan signifikan dengan mitra strategis di bidang ekonomi dan masalah pertahanan.

Pengamat — dan juga pemimpin India — mengatakan bahwa Singapura memainkan peran penting saat India mereposisi dirinya untuk meningkatkan keterlibatan regionalnya.

Pada Maret 2015, Modi menghadiri pemakaman bapak pendiri Singapura, Lee Kuan Yew. Modi menyebut Lee sebagai

"inspirasi" dan mengatakan bahwa mendiang memercayai potensi India "lebih dari yang kita semua percayai," demikian menurut *The Economic Times*.

"Hubungan India dengan Singapura adalah salah satu hubungan terkuat kami di dunia, dan Singapura merupakan pilar utama bagi Kebijakan 'Bertindak ke Timur' India," kata Modi.

Pada September 2014, kedua negara mengumumkan perubahan hubungan militer bilateral mereka dari latihan bersama menjadi kerja sama teknologi pertahanan, demikian menurut surat kabar *The Times of India*. Angkatan Bersenjata Singapura memiliki jumlah lahan dan wilayah udara terbatas untuk pelatihan. Selama beberapa tahun terakhir ini, pasukan Singapura berlatih di fasilitas militer India.

Singapura bukan satu-satunya negara tetangga di bagian timur yang mendapatkan manfaat dari hubungan pertahanan baru ini. Thailand juga telah memperkuat kerja samanya dengan India di bidang keamanan maritim dan kontraterorisme.

"Kedua negara ingin melihat jalur laut tetap bebas dan aman, dan masalah seperti pembajakan [dan] perdagangan manusia menjadi perhatian kedua belah pihak," kata Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval, demikian menurut laporan kantor berita Press Trust of India pada April 2015.

Selain itu pada April 2015, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung bertemu dengan Doval untuk meminta bantuan India dalam membantu Vietnam meningkatkan teknologi militer dan pertahanannya, terutama dengan melatih personel intelijen untuk Angkatan Udara dan Angkatan Laut.

## MENGIRIM PESAN YANG JELAS

Analis di Lowy Institute mengatakan bahwa dulu India kurang mahir dalam mengutarakan visi yang jelas untuk hubungannya dengan mitra Asia Timur dan Asia Tenggara. Pemerintah India saat ini memiliki kesempatan untuk membuat langkah lebih besar dalam waktu yang lebih singkat, ketika perkembangan hubungan ini terhambat selama dua dekade terakhir ini.

"Untuk membangun keseriusan komitmen India terhadap kawasan tersebut, pemerintahan Modi harus menunjukkan bahwa Bertindak ke Timur bukan sekadar perubahan nama dari kebijakan yang ada," ringkas Lowy Institute. "Dalam rangka untuk mencegah penundaan lebih lanjut, India harus bergerak cepat untuk memaparkan agenda yang jelas guna memperdalam hubungan ekonomi, kelembagaan, dan pertahanan dengan kawasan tersebut yang melampaui apa yang telah dijanjikan oleh pemerintahan sebelumnya. Jika pemerintahan Modi mampu mencapai hal ini, maka India memiliki potensi untuk mengambil peran sebagai pemain strategis signifikan di kawasan Indo Pasifik yang lebih luas." □

**"VISI DAN KOMITMEN KAMI ADALAH MENGUTAMAKAN KEMAJUAN NEGARA, POSISINYA DI DUNIA, DAN KEBAHAGIAAN RAKYAT,"**

Perdana Menteri India
*Narendra Modi*

ILUSTRASI *FORUM*

# BLOK KEKUATAN YANG SEDANG BANGKIT

## Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mewujudkan dirinya menjadi masyarakat dan kekuatan aktif — secara ekonomi dan lainnya

SIDDHARTH SRIVASTAVA

Dengan populasi gabungan lebih dari 600 juta orang, negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memiliki populasi yang lebih besar daripada Uni Eropa atau Amerika Utara. Didirikan pada tahun 1967, negara anggota ASEAN saat ini adalah Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ekonomi mereka memiliki rentang tahap pembangunan yang sangat berbeda, tetapi semuanya memiliki potensi pendapatan dan pertumbuhan yang sangat besar.

Tiongkok tak diragukan lagi masih menjadi raksasa pasar negara berkembang di Asia; India semakin makmur di bawah pemerintahan ramah bisnis yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Kedua raksasa ini mengamati ASEAN dengan cermat.

Investor juga tidak mau ketinggalan memperoleh potensi 10 pasar dinamis dari negara-negara ASEAN. Perusahaan dan pemerintah menyadari bahwa ketergantungan besar pada pasar Tiongkok yang sudah terlalu panas bisa menjadi proposisi berisiko di masa depan.

India adalah negara demokrasi yang semarak. Akan tetapi, mengelola tarikan dan tekanan dari berbagai pihak regional dan kelompok penekan yang signifikan secara elektoral kadang-kadang bisa menjadi mimpi buruk bagi setiap pemerintah. Hal ini sering kali melemahkan fokus pada tata kelola dan kebijakan yang sehat.

Dalam publikasi tahunannya "Asian Development Outlook for 2015," yang diterbitkan pada Maret tahun yang sama, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengatakan perekonomian Tiongkok sedang melambat, namun Asia akan tetap menjadi pusat pertumbuhan ketika ekonomi India dan Asia Tenggara tumbuh dengan pesat. Ekonomi negara berkembang Asia akan tumbuh 6,3 persen pada tahun 2015 dan 2016, tidak berubah dari tahun 2014, kata ADB. Menurut laporan perusahaan konsultan McKinsey & Company pada Mei 2014, jika ASEAN adalah satu negara, maka akan sudah menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia, dengan produk domestik bruto (PDB) gabungan senilai 32 kuadriliun rupiah (sekitar 2,4 triliun dolar A.S.) pada tahun 2013. ASEAN diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2050. Persaingan di dalamnya sangat besar. Meskipun Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tidak ada jaminan bahwa ekonomi negara ini akan tetap menjadi yang terbesar.

### DIVIDEN DEMOGRAFI

ASEAN menuai dividen demografi karena penduduknya yang masih muda, demikian menurut McKinsey. "Mungkin, yang paling penting, hampir 60 persen dari total pertumbuhan sejak tahun 1990 berasal dari keuntungan produktivitas, ketika sektor seperti manufaktur, ritel, telekomunikasi, dan transportasi tumbuh dengan lebih efisien." Akan tetapi, meskipun mengalami perjalanan panjang ke depan yang penuh

**Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Le Luong Minh, kiri, dan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman berbicara sebelum pertemuan di Putrajaya pada Januari 2015. Malaysia menjadi ketua ASEAN pada tahun 2015.**
AFP/GETTY IMAGES

**Pria Kamboja berlari di depan lokasi konstruksi di Phnom Penh pada Maret 2015. Bank Pembangunan Asia memprediksi ekonomi Kamboja akan tumbuh sebesar 7,3 persen pada tahun 2015.**
AFP/GETTY IMAGES

dengan keberhasilan selama beberapa dekade, ada tantangan yang perlu diatasi oleh ASEAN.

Tantangan ini mencakup penyelesaian proses integrasi ekonomi; mitigasi kecurigaan terkait dengan langkah-langkah proteksionis nontarif; memperluas cakrawala untuk bekerja sama dengan negara berkembang lain seperti India; dan mengatasi kekhawatiran tentang pelebaran kontur pengaruh Beijing dan ketegasan teritorial di seluruh kawasan, terutama Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya.

"ASEAN tidak perlu memperkenalkan upaya baru pada tahun 2015, tetapi sebenarnya berfokus pada pelaksanaan langkah-langkah yang tertunda dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau MEA," kata Daniel Wu, analis perdagangan internasional dan peneliti di Forum Pasisik Center for Strategic and International Studies (CSIS), dalam wawancara dengan *FORUM*. "Ketua ASEAN, Malaysia, mengambil langkah-langkah tertentu untuk memajukan agenda MEA sejalan dengan perkembangan perdagangan global akhir-akhir ini. Malaysia dilaporkan berupaya mencapai konsensus di antara negara-negara anggota ASEAN untuk memulai negosiasi menuju Perjanjian Fasilitasi Perdagangan ASEAN. Malaysia juga merupakan pendukung kuat dari Kartu Perjalanan Bisnis ASEAN, meskipun pembahasannya sedang berlangsung."

## PERAN MALAYSIA

Cara terbentuknya blok ASEAN di masa mendatang akan tergantung pada upaya diplomatik Malaysia. Kuala Lumpur yang mengemban tugas sebagai pimpinan ASEAN pada tahun 2015 telah menyatakan bahwa mewujudkan MEA pada akhir tahun akan menjadi tujuan utamanya.

Sasarannya adalah untuk merangsang gagasan tentang identitas ASEAN untuk mengatasi langkah nontarif yang merajalela, berlebihan, dan sering kali secara diam-diam yang menghambat perdagangan regional dan mendistorsi biaya. Dalam analisis baru-baru ini untuk Forum Asia Timur, Wu dari CSIS menyatakan, "Tidak realistis untuk mengharapkan Malaysia mengatasi penundaan dan perselisihan yang terjadi selama beberapa tahun atas ketidakpatuhan dalam proses implementasi MEA. Perspektif yang jelas dari menteri perdagangan dan industri internasional tentang perlunya kepemimpinan ASEAN menjadi dasar

untuk rasa optimisme bahwa ASEAN dapat memusatkan kehendak dan sumber dayanya untuk melaksanakan langkah-langkah integrasi 'ke tujuan akhir' yang diperlukan kawasan ini pada tahun 2015."

Dalam sambutannya kepada jurnalis di KTT ASEAN ke-25 di Myanmar pada November 2014, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak berbicara tentang mengisi kesenjangan informasi untuk menguraikan dengan jelas manfaat nyata dari liberalisasi di bawah MEA. Dia mengatakan bahwa upaya ini menciptakan persetujuan dari berbagai populasi yang berbeda, sehingga memungkinkan tercapainya konsensus keterlibatan politik yang luas. "Masyarakat harus memahami apa sesungguhnya ASEAN itu dan apa yang dilakukan ASEAN," kata Razak.

Mustapa Mohamed, menteri perdagangan dan industri internasional Malaysia, menjelaskan sasaran pemerintahnya dalam pernyataan yang diterbitkan pada pertengahan Januari 2015.

"Perdana Menteri secara terbuka menyatakan bahwa Malaysia tidak akan menghindar dari menangani masalah sensitif proteksionisme di antara negara-negara anggota ASEAN dan akan berusaha untuk meredakan meningkatnya retorika nasionalisme. Malaysia akan berusaha untuk menjelaskan secara persuasif perlunya anggota ASEAN untuk menerima perspektif regional, untuk tidak hanya sekadar memperhatikan masalah dengan perspektif yang sempit."

Dalam komentar lebih lanjut kepada *FORUM*, Wu menambahkan, "Malaysia telah mengambil tanggung jawab untuk memenuhi target pelaksanaan setidaknya 95 persen dari langkah-langkah yang ditetapkan dalam Cetak Biru MEA pada tahun 2015. Faktanya adalah bahwa, pada Agustus 2014, ASEAN secara kolektif baru melaksanakan 82,1 persen dari 229 hasil (deliverable) utama MEA yang ditargetkan selesai pada tahun 2013, [yang] menunjukkan bahwa hal ini sudah menjadi target yang ambisius. Jika Malaysia dapat memimpin ASEAN untuk mencapai ambang batas 95 persen, tidak diragukan lagi ASEAN akan mewujudkan MEA dengan mulus. Kepemimpinan Malaysia diperlukan untuk mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan pelaksanaan domestik mereka."

"ASEAN tidak perlu memperkenalkan upaya baru pada tahun 2015, tetapi sebenarnya berfokus pada pelaksanaan langkah-langkah yang tertunda di dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau MEA." - *Daniel Wu*

## TANTANGAN TIONGKOK

Tidak ada konsensus atau kesatuan di antara anggota ASEAN tentang berurusan dengan Tiongkok, termasuk tantangan teritorial Beijing di Laut Cina Selatan yang memengaruhi anggota ASEAN yaitu Indonesia, Kamboja, Brunei, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Malaysia, misalnya, telah mengusulkan agar negara-negara ASEAN membentuk pasukan penjaga perdamaian bersama. Ide tersebut dianggap secara luas sebagai gagasan yang tidak efektif karena kurangnya kepercayaan di antara anggota ASEAN mengenai masalah keamanan. Tiongkok, di sisi lain, percaya bahwa masalah agresi teritorialnya di wilayah tersebut terlalu dibesar-besarkan, diprovokasi oleh media berbahasa Inggris yang jelas-jelas memiliki

tendensi pro-Barat. Beijing telah lama bersikeras bahwa sengketa geografis perlu diselesaikan di antara negara-negara yang terkena dampak dan bukannya oleh lembaga multilateral.

"Kami mendukung pembangunan masyarakat ASEAN, tetapi ASEAN bukan merupakan pihak yang terkait dalam sengketa atas Laut Cina Selatan," kata Hong Lei, juru bicara Kementerian Luar Negeri, kepada wartawan saat siaran pers reguler pada Maret 2015. Lei menanggapi komentar kritis dari Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh mengenai sengketa Laut Cina Selatan. Tiongkok juga menolak usulan dari negara-negara ASEAN untuk membahas pelaksanaan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea) tahun 2002 dan menetapkan lebih lanjut pedoman perilaku formal pada pertemuan menteri pertahanan yang dijadwalkan pada November 2015 di Malaysia. Penolakan Beijing ini kembali menunjukkan kecurigaan strategis yang lebih dalam bahwa ASEAN telah dikooptasi oleh Amerika, negara-negara Barat lainnya, dan Jepang untuk membendung pengaruh teritorial dan ekonomi regional Tiongkok yang sedang berkembang.

Tiongkok dikenal berbicara dengan nada ganda ketika menegaskan hegemoninya atas masalah teritorial. Pimpinannya mempertahankan kepatuhan rutin terhadap protokol dan nuansa diplomatik. Pada saat yang sama, Tiongkok tidak ragu untuk mengerahkan persenjataan militernya secara besar-besaran, yang hanya bisa ditandingi oleh persenjataan militer Amerika Serikat, untuk mengirimkan pesan bahwa negara ini siap bertempur jika diperlukan.

"Persepsi Tiongkok tentang motif tersembunyi dari keterlibatan A.S., dan dalamnya kecemasan Tiongkok, menyudutkan dan mempermalukan Tiongkok secara terbuka terkait masalah Laut Cina Selatan berisiko secara politik dan bisa memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi kawasan ini," kata Mark J. Valencia, asisten peneliti senior di Institut Nasional untuk Studi Laut Cina Selatan di Haikou, Tiongkok. "Jika semua pihak tidak memetik pelajaran yang ada, penolakan untuk melakukan diskusi dapat menjadi pertanda datangnya kejadian yang buruk."

Akan tetapi, menurut Wu, Tiongkok pada umumnya telah mendukung upaya ASEAN dalam mencapai integrasi ekonomi, perdagangan, dan investasi yang lebih besar, meskipun ada perbedaan geopolitik yang mungkin dimilikinya dengan sasaran organisasi ini.

"ASEAN pada umumnya lebih menyukai keseimbangan kekuasaan sehubungan dengan keterlibatannya dengan mitra dialognya. Akan tetapi, Tiongkok sejauh ini telah mendukung upaya integrasi ASEAN. Baru-baru ini, Tiongkok dan ASEAN telah memulai negosiasi untuk "meningkatkan" Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Tiongkok guna mengkaji peluang liberalisasi tarif lebih lanjut dan memperbarui aturan negara asal agar lebih fleksibel."

Dalam KTT ASEAN ke-26 tentang akuisisi lahan di Laut Cina Selatan dan Pedoman Perilaku, anggota ASEAN juga "menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kebebasan navigasi di dan penerbangan di atas Laut Cina Selatan," demikian menurut artikel majalah *The Diplomat* terbitan 29 April 2015.

Hong mengatakan bahwa Tiongkok merasa "sangat prihatin" dengan pernyataan tersebut dan memandangnya sebagai contoh dari "beberapa negara menyandera seluruh ASEAN dan hubungan Tiongkok-ASEAN demi keuntungan pribadi diri mereka sendiri," tulis *The Diplomat*.

## MENGEMBANGKAN KERJA SAMA DENGAN INDIA

India, negara terpadat kedua di dunia, telah berupaya meningkatkan kerja sama dengan ASEAN. Bidang-bidang kerja sama ini meliputi keamanan maritim, kebebasan navigasi, anti-pembajakan, bantuan bencana, kontraterorisme, dan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Kunjungan Perdana Menteri Modi pada akhir Maret 2015 untuk menghadiri pemakaman bapak pendiri Singapura Lee Kuan Yew menggarisbawahi pentingnya Kebijakan Bertindak ke Timur dari India.

New Delhi telah terus mencermati sengketa wilayah di Laut Cina Selatan karena selalu mengkhawatirkan meningkatnya pengaruh Tiongkok di Asia Selatan, baik militer maupun ekonomi, baik di Nepal, Bangladesh, Sri Lanka atau Myanmar. India telah mendukung kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, mengutip prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Konvensi P.B.B. tentang Hukum Laut tahun 1982. Sengketa Laut Cina Selatan merupakan bagian dari pernyataan bersama India-A.S. yang

**Pria Indonesia berjalan melewati layar yang menampilkan harga saham di gedung bursa efek di Jakarta pada Maret 2015.** AFP/GETTY IMAGES

dikeluarkan dalam kunjungan Presiden A.S. Barack Obama ke New Delhi pada Januari 2015. Badan Usaha Milik Negara bidang minyak dan gas andalan India, Oil & Natural Gas Corp (ONGC) memiliki operasi di blok minyak di Laut Cina Selatan, suatu hal yang tidak disukai oleh Beijing.

Vietnam telah mendorong upaya eksplorasi lebih besar oleh perusahaan-perusahaan India. New Delhi telah memilih untuk mendukung upaya awal ONGC di Laut Cina Selatan karena perusahaan hidrokarbon India ini memiliki pengalaman dalam menghadapi strategi yang digunakan oleh entitas Cina untuk memenangkan hak atas aset energi di seluruh dunia, baik di Afrika, Myanmar atau Amerika Selatan. Perusahaan energi yang didukung oleh pemerintah Tiongkok dikenal menggunakan berbagai taktik, termasuk penawaran manis dan kekuatan keuangan dan politik untuk memuluskan bisnis mereka.

Perdagangan adalah fokus keterlibatan lain antara ASEAN dan India. Dua kawasan ini mewakili populasi agregat 1,8 miliar penduduk yang sebagian besar masih muda dan sangat aspiratif. Perjanjian Perdagangan Bebas Barang-Barang ASEAN-India yang ditandatangani pada tahun 2009 telah meningkatkan perdagangan, kata Anil Wadhwa dari Kementerian Luar Negeri India pada Maret 2015 dalam Dialog Delhi India-ASEAN VII. Dia mengatakan bahwa angka perdagangan antara kedua ekonomi ini meningkat dari 589 triliun rupiah (44 miliar dolar A.S.) pada 2009-2010 menjadi lebih dari 988 triliun rupiah (74 miliar dolar A.S.) pada tahun 2013-2014. "Tahun ini [2014-2015], angka tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 1,34 kuadriliun rupiah (100 miliar dolar A.S.)," tambah Wadhwa. "Cita-cita kami adalah untuk membawa perdagangan ASEAN-India menjadi 2,68 kuadriliun rupiah (200 miliar dolar A.S.) pada tahun 2022, dan negosiasi RCEP [kemitraan ekonomi komprehensif regional], yang saat ini sedang berlangsung, juga akan memberikan kontribusi untuk ini."

"Liberalisasi perdagangan antara ASEAN dan India, melalui Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India, menciptakan peluang tambahan untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas yang lebih kuat," tambah Wu. "Aliran perdagangan dan investasi menyebarkan ide-ide dan inovasi baru, yang mengarah ke perbaikan dalam barang dan jasa yang digunakan oleh masyarakat dan bisnis. Ini bagus untuk ASEAN dan India, karena kedua belah pihak berada dalam masa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang cepat, sehingga kerja sama perdagangan membantu untuk memastikan tetap terbukanya saluran bagi masyarakat dan bisnis mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi."

Pakar ekonomi dan analis setuju bahwa wilayah yang dicakup ASEAN merupakan kawasan dengan potensi dan dinamisme besar. Jika dimanfaatkan dengan baik, ada peluang besar untuk menyebarkan pendapatan dan kesejahteraan ke wilayah populasi yang lebih luas di seluruh Asia dan benua lainnya. Masih harus dilihat apakah tahun 2015 akan menjadi tahun diatasinya tantangan tersebut dan munculnya tatanan baru. □

# Klaim Laut

## *dan Pergeseran Kekuatan*

STAF *FORUM*

**PERUBAHAN HUBUNGAN DAN TINDAKAN TIDAK KONSISTEN TIONGKOK MENGUNGKAPKAN MOTIF YANG PATUT DIPERTANYAKAN**

ISTOCK

**Tiongkok telah melakukan klaim secara agresif untuk menjejakkan kakinya di Laut Cina Selatan sejak Agustus 2014. Citra satelit menunjukkan bahwa Tiongkok telah membangun pulau-pulau baru di atas beberapa terumbu karang di Kepulauan Spratly, termasuk Fiery Cross Reef, Gaven Reefs, Johnson South Reef, dan Hughes Reef, demikian menurut laporan *IHS Jane's Defence Weekly*.**

Di Fiery Cross Reef, proyek yang paling ekstensif, Tiongkok mulai membangun sebuah pulau dengan panjang 3.000 meter dan lebar sekitar 250 meter, cukup besar untuk menopang landasan udara, seperti yang dilaporkan *Jane's* pada November 2014. Karang tersebut sebelumnya terendam air.

Reuters melaporkan bahwa citra satelit pada Maret 2015 juga memperlihatkan bahwa Tiongkok telah mulai membangun landasan udara pertamanya di karang tersebut. Citra satelit yang diberikan kepada *IHS Jane's Defense Weekly* oleh Airbus Defence and Space menunjukkan bagian beraspal dari landasan pacu berukuran 505 meter kali 53 meter. Selain itu, pemerintah Tiongkok memulai reklamasi daerah di Subu Reef di Spratly yang juga bisa mengakomodasi landasan udara, kata Reuters.

Meskipun negara-negara lain, termasuk Malaysia dan Vietnam, telah melakukan pembangunan di atas atau memodifikasi daratan yang sama selama bertahun-tahun, aktivitas Tiongkok telah mengubah ukuran dan struktur fitur fisik tanah secara substansial, demikian menurut Mira Rapp-Hooper, direktur Asia Maritime Transparency Initiative dan anggota Program Asia di Center for Strategic and International Studies. "Hingga pembangunan di Fiery Cross, Tiongkok adalah satu-satunya pengklaim utama Spratly yang tidak memiliki landasan udara. Akan tetapi, apa yang membuat aktivitas Tiongkok berbeda adalah bahwa Beijing telah mengubah ukuran dan struktur fitur fisik tanah secara dramatis, sementara pengklaim lain telah membangun secara berangsur-angsur atau memodifikasi daratan yang ada."

Upaya Tiongkok "merupakan kampanye metodis yang direncanakan secara matang untuk menciptakan rangkaian benteng berkemampuan udara dan laut di sepanjang bagian tengah rangkaian Kepulauan Spratly," kata Editor Asia Pasifik *Jane's*, James Hardy, kepada surat kabar *The Wall Street Journal*.

Ekspansionisme tegas ini tampaknya menjadi contoh terbaru dari ketidaksesuaian nyata antara ucapan dan tindakan Tiongkok, ketika negara ini mengintensifkan upayanya untuk memperkuat posisi strategisnya sebagai penyedia keamanan di kawasan dan memperkuat posisinya di berbagai wilayah yang disengketakan. Beberapa analis mengkhawatirkan bahwa inkonsistensi tersebut dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian di kawasan Indo-Asia-Pasifik.

Selama tahun 2014, misalnya, Tiongkok menandatangani perjanjian dadakan dengan Bangladesh untuk mendorong hubungan ekonomi, strategis, dan bidang lainnya serta melakukan hal yang sama dengan negara-negara lain dan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

PASAR KREATIF

Meskipun sebagian besar negara — termasuk Amerika Serikat, India, Korea Selatan, Vietnam, Australia, dan Jepang — menyambut dengan baik peningkatan perdagangan bilateral dengan Tiongkok, beberapa negara mulai mempertanyakan beberapa niat dan inkonsistensi Tiongkok dalam upayanya untuk menyebarkan pengaruhnya dengan cepat. Selain kegiatannya di Spratly, Tiongkok tampaknya mendorong hubungan intelijen dan militer dengan membiayai dan mendukung jaringan pelabuhan di Pakistan, Sri Lanka, Maladewa, Bangladesh, dan Myanmar. Tiongkok juga membangun jalur kereta api melalui Tibet di dekat Sikkim yang tampaknya untuk

**Marinir Filipina berpindah dari perahu patroli ke perahu karet setelah menjalankan misi di Second Thomas Shoal yang disengketakan, bagian dari Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Mereka kembali ke kamp pasukan angkatan laut di provinsi Palawan, Filipina barat daya, pada Maret 2014.** REUTERS

**Seorang Kelasi Vietnam berjaga di Pulau Thuyen Chai, kepulauan Spratly** REUTERS

menciptakan akses militer logistik ke perbatasan India, demikian menurut surat kabar *The New Indian Express.* Selain itu, Tiongkok tampaknya telah memprovokasi negara-negara yang sedang memiliki sengketa wilayah dengannya. Pada awal Mei 2014, misalnya, Tiongkok mengerahkan anjungan minyak di zona ekonomi Vietnam di dekat kepulauan yang diklaim oleh kedua negara dan kemudian membongkarnya pada pertengahan Juli tahun itu.

Di saat yang sama, Tiongkok telah menyatakan secara terbuka bahwa negara itu menginginkan "gaya hubungan kekuatan besar baru" dengan A.S. dan kekuatan besar lainnya. Tiongkok mengatakan bahwa negara itu mempromosikan batas luar yang damai dan terintegrasi. Tiongkok mengatakan bahwa negara itu berusaha untuk meningkatkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran ketika negara itu semakin berkuasa.

Beberapa tindakan kebijakan luar negeri Tiongkok merusak tujuan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap niat Tiongkok dan ketakutan akan manipulasi Tiongkok di antara negara-negara tetangganya. Reuters melaporkan pada April 2015, Presiden Barack Obama mengatakan bahwa Tiongkok menggunakan "ukuran dan ototnya dengan sepenuhnya" untuk mendorong negara-negara Asia lain yang lebih kecil di sekitarnya dan memperingatkan tentang pengerahan kekuatan militer ke pulau-pulau yang disengketakan.

Cui Tiankai, duta besar Tiongkok untuk A.S., mengklaim bahwa merupakan hal yang "alami" bagi pembangunan itu untuk mencakup fasilitas pertahanan militer, demikian menurut Reuters. "Seharusnya tidak ada ilusi bahwa siapa pun bisa mengenakan status quo unilateral atas Tiongkok" atau "berulang kali melanggar kedaulatan Tiongkok tanpa konsekuensi."

Meskipun terjadi inkonsistensi, negara-negara regional tidak memiliki banyak pilihan selain mencari jalan tengah di antara kepentingan A.S. dan Tiongkok. Memang, kawasan ini tampaknya sudah terlibat dalam dilema keamanan. Tiongkok harus langsung mengatasi inkonsistensi antara retorika dan tindakannya, memperjelas niatnya,

dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kekhawatiran negara-negara di kawasan. Kegagalan untuk melakukannya tidak hanya meningkatkan ketidakstabilan regional tetapi juga merusak peluang kerja sama politik dan ekonomi.

Jenis hubungan baru di antara kekuatan besar dunia (NTGPR) yang dipromosikan oleh Presiden Xi Jinping menawarkan kerangka kerja untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan Tiongkok tidak menimbulkan gesekan yang tidak semestinya dengan negara-negara kuat lain di Indo Asia Pasifik. Meskipun kerangka kerja itu berlaku untuk hubungan Tiongkok dengan semua negara kuat (termasuk Jepang, Rusia, dan India), pemerintah Tiongkok sangat memusatkan NTGPR pada hubungan A.S dengan Tiongkok.

Tiongkok menawarkan tiga cara utama bagi NTGPR untuk mengurangi gesekan A.S.-Tiongkok, demikian menurut laporan National Bureau of Asian Research pada tahun 2013. Pertama, NTGPR berusaha untuk menghindari konflik dengan menekankan dialog dan mengomunikasikan tujuan strategis masing-masing pihak dengan jelas. Kedua, NTGPR menunjukkan pentingnya rasa saling menghormati terhadap kekhawatiran dan kepentingan nasional masing-masing pihak. Terakhir, masing-masing pihak harus mencari bidang kepentingan bersama yang dapat dicapai lewat kerja sama. Ketiganya merupakan sasaran yang patut dipuji, tetapi Tiongkok terus-menerus melemahkan sasaran ini melalui tindakan-tindakannya.

Tiongkok acap kali meremehkan kepentingan dan kekhawatiran A.S. di Indo Asia Pasifik. Hal ini terutama berlaku sehubungan dengan hukum internasional dan penyelesaian sengketa teritorial. Menurut laporan Departemen Luar Negeri A.S. tahun 2014, klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok atas wilayah di Laut Cina Selatan tidak hanya bersifat ambigu tetapi tampaknya juga tidak sesuai dengan aturan Konvensi P.B.B. tentang Hukum Laut. Tiongkok tidak menjelaskan secara tepat apa yang diklaimnya: tanah, air, kedaulatan atau zona ekonomi eksklusif, yang dibatasi pada koordinat tertentu. Meskipun sengketa teritorial Tiongkok tidak langsung terjadi dengan A.S., A.S. selalu memperhatikan hukum internasional dengan cermat, dan menjunjung tinggi hukum itu tetap menjadi kepentingan nasional Amerika. Ketika A.S. mengungkapkan keprihatinan atas tindakan Tiongkok dalam hal ini, Tiongkok memperingatkan A.S. untuk tidak terlibat dalam sengketa teritorial di Laut Cina Selatan. "Amerika Serikat, Jepang, dan Australia merupakan sekutu, tapi ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk campur tangan dalam sengketa teritorial, karena itu hanya akan membuat masalah tersebut menjadi lebih rumit dan merugikan kepentingan semua pihak," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada situs web kementerian pada Oktober 2013. "Kami mendesak negara-negara terkait untuk menghormati fakta, membedakan mana yang benar dan mana yang salah, berhati-hati, dan menghentikan semua kata-kata dan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi penanganan masalah dan merongrong stabilitas regional."

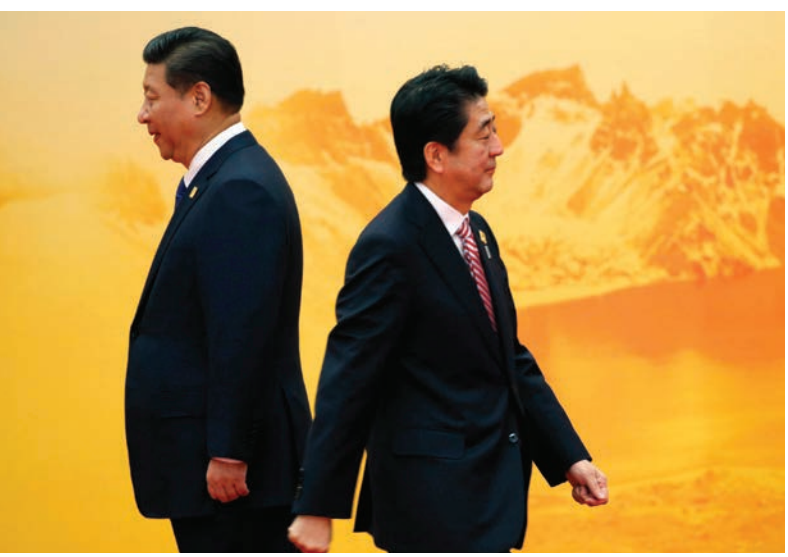

**Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kanan, berjalan melewati Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam upacara di forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik di Beijing pada November 2014.** REUTERS

Pernyataan ini muncul meskipun Xi menunjukkan bahwa A.S. adalah negara Pasifik dengan kepentingan keamanan yang nyata di Asia. "Tiongkok dan A.S. harus terus meningkatkan dialog dan koordinasi terkait urusan Asia Pasifik, dan menghormati serta mengakomodasi kepentingan dan keprihatinan satu sama lain di kawasan tersebut, dan mengembangkan koordinasi inklusif," kata Xi pada saat konferensi pers bersama dengan Presiden A.S. Barack Obama pada November 2014.

Selain itu, beberapa sengketa teritorial Tiongkok melibatkan negara-negara yang menandatangani perjanjian sebagai sekutu A.S. yaitu Jepang dan Filipina. Meskipun A.S. tidak mengambil posisi resmi mengenai negara mana yang memiliki wilayah apa, cara sengketa ini diselesaikan menjadi perhatian strategis yang mendalam bagi A.S.

Militer Tiongkok tampaknya sedang menguji banyak negara. Tiongkok memprovokasi Jepang di Laut Cina Timur pada tahun 2013 dan 2014 dengan meningkatkan patroli Penjaga Pantainya yang semakin besar jumlahnya di sekitar gugusan pulau yang diperebutkan, yang dikenal di Jepang sebagai Senkaku dan di Tiongkok sebagai Diaoyu. Pada tahun 2012, Tiongkok merebut Scarborough Shoal dari Filipina dan pada Mei 2014 mencegat kapal-kapal Filipina yang mendekati Second Thomas Shoal.

Tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Jepang dan Filipina sering kali muncul dalam bentuk pemaksaan dan tekanan militer terselubung. Menurut laporan di surat kabar *The New York Times*, Xi dan

**Pandangan udara dari pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Timur, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di Tiongkok**
REUTERS

Perdana Menteri Shinzo Abe dari Jepang bertemu di Beijing pada November 2014 untuk membahas berbagai topik yang salah satunya adalah mengidentifikasi perbedaan posisi mereka di Laut Cina Timur. Keamanan sekutu-sekutunya tetap menjadi kepentingan nasional utama A.S., dan setiap potensi ancaman terhadap negara-negara yang menandatangani perjanjian sebagai sekutu A.S. diperlakukan dengan sangat cermat.

Selain NTGPR, di forum kerja Partai Komunis Tiongkok pada Oktober 2013, Xi mengatakan bahwa salah satu sasaran kebijakan luar negeri Tiongkok adalah komunitas negara-negara yang damai dan terpadu di sepanjang pinggiran geografisnya. Laporan resmi Dewan Negara Tiongkok tahun 2011 "Pembangunan Damai Tiongkok" juga menyatakan bahwa Tiongkok berupaya untuk meningkatkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan itu. Akan tetapi, tindakan Tiongkok sekali lagi tampaknya melemahkan sasaran yang disebutkan ini, terutama di Laut Cina Selatan.

Tindakan tersebut tampaknya kontras dengan kebijakan Tiongkok sendiri untuk membangun kawasan yang stabil dan terintegrasi di sekitar batas luarnya. Kebijakan Jalur Sutera Baru dan Jalur Sutera Maritim Baru Tiongkok berusaha untuk lebih meningkatkan dan memperluas lingkup pengaruh Tiongkok dengan menciptakan lingkungan politik dan ekonomi yang stabil, terpadu, dan sejahtera yang kondusif bagi kerangka NTGPR yang diungkapkan Tiongkok, demikian menurut analisis yang diterbitkan dalam jurnal Hoover Institution *Chinese Leadership*

**Presiden Tiongkok Xi Jinping, kanan, memberi isyarat kepada Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyn Phu Trong di Aula Besar Rakyat, Beijing pada April 2015.** REUTERS

*Monitor* oleh pakar tentang Tiongkok dan Asia Timur, Michael Swaine, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace. Asia Tenggara merupakan bagian dari batas luar itu dan menyertakan negara-negara Asia Tenggara ke dalam kebijakan ini sangatlah penting bagi keberhasilan kebijakan tersebut. Akan tetapi, beberapa negara Asia Tenggara mengklaim daerah yang sama di Laut Cina Selatan tempat Tiongkok membangun pangkalan militernya. Membangun pulau buatan dan pangkalan militer di wilayah sengketa tentunya dapat meningkatkan ketegangan politik dan ketidakstabilan di kawasan itu, menurut komunike yang dikeluarkan oleh Filipina dan Vietnam pada tanggal 30 Januari 2015. Fokus komunike tersebut adalah untuk mengungkapkan keprihatinan yang mendalam "atas kegiatan reklamasi lahan besar-besaran yang sedang berlangsung yang menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan serta kehidupan banyak orang di berbagai negara pesisir," ungkap majalah *The Diplomat* pada Maret 2015.

Seperti yang mungkin ditemukan oleh Tiongkok, tidak ada insentif ekonomi yang akan dapat meyakinkan masyarakat Indo Asia Pasifik untuk mengabaikan masalah ini selagi Tiongkok membangun pangkalan Angkatan Laut dan Angkatan Udara di wilayah yang mereka klaim. Negara-negara di Laut Cina Selatan mungkin mulai menolak rencana ekonomi regional Tiongkok sebelum Tiongkok menanggapi kekhawatiran politik mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh perjanjian antara Vietnam dan Filipina, tidak diragukan lagi bahwa negara-negara ini memandang pembangunan pangkalan militer di wilayah sengketa sebagai suatu pemaksaan. Jika Tiongkok tidak mengubah tindakannya, tak lama lagi negara-negara ini akan menolak program seperti Jalur Sutera Baru dan Jalur Sutera Maritim Baru.

## JALAN UNTUK MENCAPAI STABILITAS

Jadi apa yang bisa dilakukan Tiongkok untuk mengatasi keprihatinan negara-negara tetangganya di Indo-Asia-Pasifik? Langkah pertama bisa mengikuti poin No. 1 dari NTGPR: Menekankan dialog dan mengomunikasikan tujuan strategis dengan jelas. Jika Tiongkok serius dengan upaya untuk mencapai tujuan yang dinyatakannya yaitu mempromosikan stabilitas, kemakmuran dan kerja sama regional, maka menguraikan pandangan dan tujuan Tiongkok secara diplomatis seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan menguraikan keinginannya secara jelas dan tepat, terutama mengenai klaim teritorial, Tiongkok dapat mengurangi kecemasan regional sehubungan dengan tindakannya.

Selanjutnya, Tiongkok bisa menunjukkan bagaimana kebijakannya mendukung stabilitas, kemakmuran, dan kerja sama regional. Jika Tiongkok memiliki rencana yang jelas tentang bagaimana tindakannya di Laut Cina Selatan dan Timur mempromosikan sasaran yang dinyatakannya, maka negara ini seharusnya menyampaikan landasan pemikiran itu kepada negara-negara lain di Indo Asia Pasifik. Meskipun negara-negara tetangga Tiongkok tidak setuju dengan penilaian Tiongkok, membahas topik tersebut secara langsung akan memungkinkan semua pihak untuk meningkatkan pemahaman bersama dan mengatasi ketidaksepakatan dengan cara yang berarti. Jika negara-negara Indo-Asia-Pasifik mempergunjingkan masalah ini satu sama lainnya, penting untuk menyadarinya dan mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah ini secepat mungkin untuk menghindari potensi konflik.

Tiongkok juga dapat mengambil langkah-langkah yang lebih konkret untuk menunjukkan niat baik dan kemauan untuk menciptakan kestabilan kawasan. Supaya membawa manfaat, langkah-langkah ini harus berhubungan secara langsung dengan topik keprihatinan regional. Misalnya, Tiongkok seharusnya menawarkan koordinat batas yang tepat untuk sembilan garis putus-putusnya di Laut Cina Selatan dan melengkapinya dengan deskripsi yang tepat dari isi klaim itu (tanah, laut berdaulat, dan zona ekonomi eksklusif). Hal ini akan memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa lainnya untuk memahami dengan jelas apa klaim Tiongkok, sehingga membantu mengurangi ketakutan mereka akan manipulasi.

Langkah lebih ambisius lainnya adalah membekukan pembangunan instalasi militer di Laut Cina Selatan. Upaya pembangunan berkelanjutan Tiongkok merupakan beberapa pendorong utama ketidakstabilan regional. Pembekuan konstruksi untuk memungkinkan dialog akan menjadi hal yang menyejukkan. Selain itu, oleh karena sifat dari beberapa klaim yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan, dialog diplomatik dapat dilakukan antara Tiongkok dan ASEAN. Tindakan ini dapat memberi kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk bertukar pandangan secara dinamis dan efektif.

## MENYELARASKAN TINDAKAN DAN UCAPAN

Kesenjangan antara niat yang diungkapkan dan tindakan aktual Tiongkok menimbulkan ketidakstabilan di Indo Asia Pasifik. Tiongkok mengklaim bahwa pihaknya berupaya membentuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini. Akan tetapi, tindakan Tiongkok di ranah politik dan keamanan tampaknya merusak sasaran ini.

**Konstruksi di Fiery Cross Reef di Kepulauan Spratly yang dipersengketakan** EPA

Mungkin Tiongkok memiliki rencana yang koheren tentang bagaimana hal yang tampak kontradiktif ini dapat diungkap secara harmonis, tapi selama Tiongkok tidak menunjukkan hal tersebut kepada kawasan ini, maka ketidakamanan dan ketidakstabilan regional akan terus tumbuh. Jika Tiongkok tidak bisa mengatasi keprihatinan politik dan keamanan negara-negara tetangganya, maka semua aspirasi ekonomi, politik, dan keamanannya akan gagal. □

# MENGURANGI ANCAMAN TEROR PEJUANG ASING

*Ekstremis militan yang kembali dari Suriah dan Irak harus direhabilitasi dan diintegrasikan kembali*

ILUSTRASI *FORUM*

STAF *FORUM*

*Ada berbagai alasan mengapa seseorang tertarik untuk menjadi pejuang asing dan bersedia bepergian ke luar negeri untuk berpartisipasi dalam pertempuran sengit yang sering kali ribuan mil jauhnya dari tanah air mereka.*

Tidak ada yang tahu tepatnya berapa banyak jumlah orang-orang yang telah memilih jalan untuk bertempur dalam konflik Suriah dan Irak. Diperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 20.700 orang, melebihi jumlah pejuang asing yang bergabung dengan mujahidin Afghanistan dalam perang 10 tahun melawan Uni Soviet. Akan tetapi, ahli keamanan setuju bahwa banyak dari pejuang asing ini pada akhirnya akan kembali ke tanah air mereka, dan terdapat bahaya nyata yang ditimbulkan oleh kembalinya pejuang asing tersebut.

Angka yang dirilis pada Januari 2015 oleh International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) dan Soufan Group menunjukkan rekrutan dari lebih dari 80 negara — termasuk lebih dari 11.000 pejuang dari Timur Tengah, 4.000 pejuang dari negara-negara Eropa Barat, dan 250 pejuang dari Australia, 100 pejuang dari Tiongkok dan Amerika Serikat, 60 pejuang dari Indonesia serta sejumlah kecil pejuang dari Selandia Baru, Jepang, Bangladesh, Malaysia, dan Filipina. Seiring terus berlanjutnya perang, aliran pejuang yang pulang ke kawasan Indo Asia Pasifik kemungkinan akan meningkat dan membawa serta potensi ancaman.

"Veteran pejuang asing lebih cenderung melihat operasi domestik sebagai tindakan yang sah daripada nonveteran," ungkap Thomas Hegghammer, direktur penelitian terorisme di Lembaga Penelitian Pertahanan Norwegia. Dalam penelitian terhadap 945 pejuang asing antara tahun 1990 dan 2010, dia memperkirakan bahwa 1 dari 9 "kembali untuk melakukan serangan" di tanah air mereka. Dia menerbitkan temuannya di jurnal *American Political Science Review* pada Februari 2013.

Selain itu, serangan domestik yang direncanakan oleh pejuang yang kembali dari medan perang

**DARI ATAS:**
**Anggota pasukan keamanan Irak menangkap tersangka militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Jurf al-Sakhar pada Maret 2014.**

**Polisi anti-teror menggerebek rumah terduga anggota ISIS di Jakarta, Indonesia, pada Maret 2015.**

**Petugas polisi Australia berjalan bersama dengan robot ke arah Kafe Lindt di pusat kota Sydney, tempat beberapa sandera ditahan di bawah todongan senjata pada Desember 2014.**

REUTERS

biasanya lebih efektif. Penelitian Hegghammer ini menemukan bahwa rencana serangan yang dibuat oleh pejuang asing tersebut 1,5 kali lebih mungkin untuk dieksekusi dan dua kali lebih mungkin untuk menyebabkan kematian. Penelitian lain menunjukkan bahwa keterlibatan pejuang asing dalam serangan domestik juga meningkatkan tingkat kebinasaan dan kemungkinan terjadinya rencana serangan teroris tersebut, menurut Direktur ICSR Peter Neumann.

Surat kabar *The Herald Sun* melaporkan pada Februari 2015 bahwa sudah ada sekitar 30 pejuang jihad yang kembali ke Australia setelah menjadi pejuang asing. "Jumlah pejuang asing meningkat, jumlah simpatisan dan pendukung ekstremis meningkat, dan jumlah calon teroris, termasuk banyak yang tinggal di tengah-tengah kita, juga meningkat," kata Perdana Menteri Australia Tony Abbott dalam pidato pada Februari 2015.

Akan tetapi, negara, militer, dan dinas keamanan memiliki kemampuan dan alat bantu untuk mengurangi ancaman tersebut di Indo Asia Pasifik, serta di tempat lain. Para ahli merekomendasikan untuk mengidentifikasi peluang untuk mendorong individu yang berpotensi berbahaya untuk memilih jalan tanpa kekerasan dan menggunakan tindakan seperti penangkapan, penolakan visa, penahanan preventif, dan bentuk gangguan lainnya ketika diperlukan.

Pendekatan itu mencakup meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk menasihati calon pejuang agar tidak pergi ke Irak atau Suriah sejak dini, mengganggu rute perjalanan, memperkuat kontrol perbatasan, dan meningkatkan program deradikalisasi untuk mereformasi pejuang yang kembali ke tanah air mereka, demikian menurut makalah kebijakan Brookings Institution yang dirilis pada November 2014 berjudul, "Be Afraid. Be A Little Afraid: The Threat of Terrorism from Western Foreign Fighters in Syria and Iraq."

Pemerintah di seluruh kawasan ini juga memperkuat upaya kontraterorisme yang lebih luas di berbagai bidang. Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengumumkan pada Februari 2015 bahwa Australia akan menunjuk koordinator kontraterorisme nasional dan menyusun strategi melawan ekstremisme kekerasan dan kontraterorisme nasional baru, dengan bekerja sama dengan negara bagian dan teritorinya, untuk lebih mengoordinasikan upaya untuk mengatasi ancaman seperti radikalisasi dan pelaku teror dalam negeri.

## MENGHENTIKAN JANGKAUAN TEROR

Meskipun jumlah pejuang asing yang kembali ke tanah air mereka mungkin agak dilebih-lebihkan, fenomena ini menimbulkan risiko keamanan yang luas, kata para ahli. "Sebagian besar pejuang

**Polisi anti-teror berjalan di depan petugas penjaga yang membawa kantong bukti dari penggerebekan pada Maret 2015 di rumah seorang pria yang dicurigai terlibat dengan Negara Islam Irak dan Suriah di provinsi Banten, Indonesia.** REUTERS

asing tidak akan kembali ke tanah air mereka untuk melakukan serangan teroris," kata Thomas Joscelyn, pakar kontraterorisme dan peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies kepada surat kabar *The Japan Times* pada Februari 2015. "Tapi beberapa dari mereka akan melakukannya. Risiko sebenarnya adalah bahwa ketika jumlah pejuang asing meningkat, kumpulan bakat yang dapat dimanfaatkan organisasi teroris menjadi semakin melimpah. Hal ini meningkatkan peluang bahwa kelompok teroris akan menemukan pejuang yang sangat terampil, cerdas, dan berkomitmen yang dapat digunakan untuk melakukan rencana serangan di negara asal mereka."

Kawasan Indo Asia Pasifik telah melihat beberapa tanda pengaruh membahayakan dari Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Ledakan kecil dari bom rakitan di pusat perbelanjaan di Jakarta, Indonesia, pada akhir Februari 2015 memicu kekhawatiran bahwa pengaruh ISIS sedang menembus wilayah tersebut.

Ahli terorisme, termasuk anggota Kepolisian Nasional Indonesia dan Sidney Jones dari Institute for Policy Analysis and Conflict, berpendapat bahwa bom yang menggunakan gas klorin bersama dengan baterai dan kaleng cat dan kabel, mungkin merupakan contoh ekstremis lokal yang mengadopsi taktik ISIS sebagaimana dibuktikan dengan ciri khas klorinnya, demikian menurut laporan media. Bom yang ditinggalkan di toilet umum itu gagal meledak dengan tepat dan tidak menyebabkan cedera. ISIS telah menggunakan gas klorin dalam serangannya di Timur Tengah, taktik yang sebelumnya tidak digunakan oleh kelompok radikal di Indonesia.

Pada umumnya, "ada dua kekhawatiran utama bagi Indonesia," kata Jones kepada surat kabar *The New York Times* pada Januari 2014. "Pertama adalah kembalinya pejuang asing dan hal itu bisa menyediakan kepemimpinan untuk gerakan jihad yang sangat lemah dan tidak kompeten di sini. Kedua, proses penggalangan dana untuk Suriah bisa memperkuat basis sumber daya dari kelompok-kelompok di Indonesia, seperti Jemaah Islamiyah [JI]," kelompok teror Asia Tenggara yang terkait dengan Al-Qaeda yang mengaku bertanggung jawab atas bom Bali pada tahun 2002. Kebangkitan JI bisa memberikan konsekuensi jangka panjang, katanya.

## REKRUTAN YANG KECEWA

Banyak pejuang asing tidak akan pernah kembali karena berbagai alasan. Alasan pertama adalah realitas suram yang dihadapi para pejuang asing di sana. ISIS biasanya menggunakan rekrutan asing untuk melakukan bom bunuh diri, serangan gelombang pertama, dan operasi mati syahid, menurut studi Brookings Institution yang dirilis pada Januari 2015 oleh Daniel Byman, direktur penelitian Center for Middle East Policy, dan Jeremy Shapiro, peneliti di Center on the United States and Europe. Banyak

rekrutan tewas dalam serangan bunuh diri atau baku tembak dengan pasukan musuh. Neumann dari ICSR memperkirakan bahwa 5 sampai 10 persen dari pejuang asing tewas tak lama setelah tiba di medan perang.

Jenderal Ali al-Wazir dari Angkatan Darat Irak mengatakan kepada *The Japan Times* bahwa dalam pertempuran melawan ISIS di provinsi Diyalla, "Kami sering melihat para pejuang asing dalam gelombang serangan pertama, dan kemudian para pejuang Arab akan datang setelah daerah itu diamankan." Ahli lain berspekulasi bahwa menempatkan pejuang asing di garis depan adalah bagian dari strategi jangka panjang ISIS untuk "berlanjut dan berkembang."

Namun, penulis penelitian Brookings menemukan bahwa calon pejuang asing lainnya ditangkap atau dicegat oleh dinas intelijen dan penegak hukum karena dalam banyak kasus pejuang asing itu mudah dilacak. Mereka yang tidak ditangkap di tengah perjalanan atau tidak terbunuh dapat terus berjuang di zona konflik. Akan tetapi, sejumlah besar pejuang asing tak lama kemudian merasa kecewa dan kembali ke tanah air mereka untuk melanjutkan kehidupan tanpa kekerasan.

Untuk mengurangi ancaman di luar zona perang, Ziad Akl, peneliti senior di Pusat Kajian Politik dan Strategis Al Ahram yang berbasis di Kairo, mengatakan kepada Voice of America pada Maret 2015 bahwa para ahli keamanan juga harus berfokus pada perjuangan yang diusung oleh ISIS. "Potensi ancaman dari pejuang asing yang kembali ke tanah air mereka dan melakukan tindakan yang sama di tempat mereka berasal, atau di tanah air mereka, tampaknya merupakan sesuatu yang tergantung pada strategi organisasi itu sendiri," ungkapnya. "Bagaimana tepatnya kelompok ini beroperasi bisa bervariasi dari satu negara ke negara lain."

## MENGATASI PEJUANG YANG PULANG

Petugas kontraterorisme dan penegak hukum serta petugas keamanan lainnya menghadapi banyak tantangan besar dalam mengelola aliran pejuang asing yang kembali ke tanah air mereka. Pertama, mereka harus melakukan penilaian terhadap pejuang yang pulang, mengidentifikasi, dan memonitor pejuang yang membutuhkan perhatian dan pejuang yang berniat untuk meluncurkan serangan. Kemudian mereka harus mengintegrasikan kembali pejuang yang telah meninggalkan jalan hidup ekstremis, seperti yang dirangkum Brookings dalam makalah kebijakannya pada November 2014.

Pemerintah harus mengaktifkan dialog terbuka dan

**Anggota Penjaga Sipil Spanyol membawa bukti di Pengadilan Nasional Spanyol di Madrid yang disita dalam penangkapan 10 orang pada April 2015 di Barcelona dan Tarragona. Mereka dituduh mencoba melakukan perjalanan ke Suriah dan Irak dan diduga memiliki hubungan dengan kelompok Negara Islam.** AFP/GETTY IMAGES

jujur dengan pejuang yang pulang ini, ungkap Jacob Bundsgaard, walikota Aarhus, Denmark, dan pemimpin program rehabilitasi pelaku jihad kota ini. Dia berbicara di sebuah forum Washington Institute for Near East Policy pada Februari 2015. "Jika ada alasan untuk percaya seseorang telah melakukan kejahatan, pihak berwenang harus jelas bahwa mereka akan melakukan segala daya upaya untuk menuntutnya. Namun, jika seseorang tidak melakukan kejahatan atau tidak dapat dibuktikan, mereka harus melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kembali orang itu."

Masing-masing negara harus menilai ancaman yang ditimbulkan oleh pejuang asing yang pulang atas dasar kasus per kasus, ungkap Gilles de Kerchove, koordinator kontraterorisme Uni Eropa, yang juga berbicara di forum itu. "Meskipun sangat sedikit pejuang yang besar kemungkinan melakukan serangan teroris, banyak pejuang mungkin merasa kecewa dan mengalami gangguan stres pasca-trauma." Pada umumnya, pihak berwenang perlu mengatasi bagaimana menghubungkan kembali pejuang asing yang pulang ini ke keluarga, teman, dan masyarakat dan bagaimana melepaskan ideologi ekstremis mereka, katanya. Para ahli sepakat bahwa mempromosikan kontranaratif dapat menjadi upaya efektif dalam membantu mengarahkan calon teroris ke jalan hidup antikekerasan. Keluarga dan anggota masyarakat dapat membantu menempatkan pejuang yang pulang itu pada jalan yang berbeda.

"Tidak setiap pejuang yang pulang atau mantan teroris dapat diintegrasikan kembali ke masyarakat, tetapi beberapa bisa," kata Matthew Levitt, direktur Program Stein mengenai Kontraterorisme dan Intelijen dari Washington Institute for Near East Policy. "Bahkan di antara mereka yang dapat dituntut dan dihukum, sebagian besar akhirnya akan dilepas," kata Levitt. "Satu pelajaran penting adalah bahwa program rehabilitasi dan reintegrasi harus memiliki beberapa jenis konektivitas terhadap penegakan hukum dan intelijen untuk mengurangi risiko mencoba mengintegrasikan kembali individu keras kepala yang berniat melakukan tindakan yang merugikan. Penilaian risiko tersebut diperlukan tidak hanya pada tahap penerimaan, tetapi juga di kemudian hari untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa seseorang bisa kembali teradikalisasi atau menjadi lebih radikal, seperti yang tampaknya telah terjadi dengan Kouachi bersaudara [teroris Islamis bersaudara di balik pembantaian majalah *Charlie Hebdo*] di Prancis."

Memenjarakan pejuang yang berisiko juga dapat menjadi bumerang. Di penjara, misalnya, pejuang asing bisa terpapar pada elemen radikalisasi dan ideologi jihad garis keras yang mendorong mereka untuk bergabung dengan jaringan teror.

Seperti halnya tidak ada jalur tunggal, tidak ada faktor tunggal, tidak ada latar belakang sosial ekonomi atau agama yang sama untuk memprediksi sejak dini siapa yang akan menjadi radikal atau pejuang asing, tidak ada cara tunggal untuk merehabilitasi ekstremis kekerasan. "Penelitian psikologis selama empat dekade tentang siapa yang menjadi teroris dan apa alasannya belum menghasilkan profil apa pun," kata John Horgan, direktur Center for Terrorism and Security Studies di Universitas Massachusetts Lowell pada majalah *The Atlantic* terbitan Maret 2015. Akan tetapi, para peneliti telah berhasil memahami jalur individu, yang dapat memberikan wawasan untuk rehabilitasi, kata para ahli.

## TINDAKAN WASPADA

Para ahli sepakat bahwa kerja sama antar dinas keamanan akan menjadi kunci untuk membantu memastikan keberhasilan program rehabilitasi dan reintegrasi serta untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya serangan secara lokal dan regional. Pembagian intelijen dari komunikasi pejuang asing, pengawasan sumber terbuka, dan informasi antar instansi khususnya dapat menjadi langkah penting untuk mengungkap jaringan transnasional, menurut penulis laporan Brookings. □

# 15

# PRAKTIK HUKUM YANG BAIK *untuk Mengatasi Terorisme*

Cara-cara untuk memperkuat sistem peradilan pidana nasional

**LETNAN KOLONEL FRANKLIN ROSENBLATT**/ANGKATAN DARAT A.S.

Bagi banyak orang, kata "kontraterorisme" memunculkan bayangan tentang pasukan komando bersenjata dan pesawat militer di zona perang yang jauh. Sekelompok pakar internasional ingin mengubah persepsi ini dan menyertakan penyidik pidana, jaksa, hakim, dan pejabat penjara.

Forum Kontraterorisme Global (Global Counterterrorism Forum - GCTF) muncul pada tahun 2011 untuk menanggapi permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara untuk berbagi praktik terbaik dan mengembangkan pelajaran tentang respons terhadap terorisme. Setahun kemudian, kelompok kerja GCTF menghasilkan Memorandum Rabat mengenai Praktik yang Baik untuk Praktik Kontraterorisme Efektif dalam Sistem Peradilan Pidana. Nama memorandum ini diambil dari lokasi konsultasi akhir kelompok tersebut. Memorandum tersebut mencakup diskusi 15 praktik tidak mengikat untuk membantu negara-negara dalam mengatasi ancaman terorisme (lihat kolom samping pada halaman 50).

Negara yang ingin menggunakan praktik ini harus sudah memiliki sistem peradilan pidana yang dapat menangani pelanggaran biasa dan juga melindungi hak-hak terdakwa. Setelah sistem ini ada, suatu negara memiliki berbagai cara untuk mengatasi teror.

Pertimbangkan, misalnya, ancaman pejuang teroris asing (FTF). Hal ini sering kali berlangsung dalam siklus empat langkah: pertama, radikalisasi menjadi ekstremisme kekerasan; kedua, perekrutan dan fasilitasi; ketiga, perjalanan dan pertempuran; dan keempat, kembali ke tanah air dan integrasi. Berbagai kegiatan, mulai dari menggunakan media sosial hingga perjalanan udara internasional dan penahanan, relevan dengan siklus hidup kegiatan FTF.

Sistem hukum yang efektif harus responsif terhadap setiap tahapan siklus ini dalam upaya untuk menangkap teroris selama masa persiapan, sebelum terjadinya serangan. Negara-negara harus membuat perundang-undangan yang mencakup sistem tindak pidana berbasis luas, termasuk pelanggaran yang dilakukan sebelum serangan, seperti konspirasi, memberikan bantuan materi, pelatihan, hasutan, dan ajakan (praktik 13, 14). Selanjutnya, beberapa teknik investigasi terbaik dalam melawan terorisme melibatkan investigasi penyamaran (praktik 3) dan pengintaian elektronik sah terhadap tersangka teror (praktik 4).

Tersangka teror yang tidak ditahan sebelum persidangan bisa saja mengintimidasi pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, melakukan serangan, melanjutkan perekrutan

**Polisi berpatroli di depan gedung pengadilan pada September 2014 tempat empat orang yang dituduh berpartisipasi dalam serangan di stasiun kereta api Kunming di Tiongkok barat daya diajukan ke meja hijau, didakwa dengan pembunuhan dan mengorganisir kelompok teror.** REUTERS

## 15 PRAKTIK YANG BAIK

dari Memorandum Rabat:
cetak biru untuk sektor peradilan pidana

1. Melindungi korban, saksi, informan, petugas penyamar, juri, penyidik, jaksa, pengacara pembela, dan hakim dalam kasus terorisme.
2. Mendorong kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah dalam negeri yang memiliki tanggung jawab atau informasi yang relevan dengan kontraterorisme.
3. Memberikan kerangka hukum dan langkah-langkah praktis untuk investigasi penyamaran terhadap tersangka atau organisasi teroris.
4. Memberikan kerangka hukum dan langkah-langkah praktis untuk pengintaian elektronik dalam investigasi kontraterorisme.
5. Mengadopsi insentif bagi tersangka teroris dan pihak lainnya untuk bekerja sama dalam investigasi dan penuntutan kontraterorisme.
6. Memberlakukan langkah-langkah untuk melindungi informasi penegak hukum dan informasi intelijen yang sensitif dalam kasus terorisme.
7. Menyediakan praktik hukum penahanan praperadilan terhadap tersangka teroris.
8. Menyediakan pengembangan profesional bagi penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani kasus terorisme.
9. Mengembangkan praktik dan prosedur untuk mendorong kerja sama internasional dalam masalah kontraterorisme.
10. Mengembangkan dan menggunakan bukti forensik untuk menentukan identitas orang-orang yang terlibat dalam tindak terorisme.
11. Memastikan bahwa terpidana teroris dihukum dengan tepat, dan mengembangkan kebijakan untuk penahanan dan reintegrasi mereka.
12. Mengkriminalisasi kejahatan terorisme sebagaimana dijabarkan dalam konvensi dan protokol internasional yang berlaku.
13. Mengkriminalisasi konspirasi, ajakan, dan tindakan persiapan terorisme lainnya.
14. Mengkriminalisasi upaya untuk melakukan, membantu, dan menghasut tindak teroris.
15. Mengkriminalisasi pembiayaan teroris.

Sumber: Memorandum lengkap tersedia di https://www.thegctf.org/documents/10162/38299/Rabat+Memorandum-English

atau meninggalkan negara tersebut. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana yang mampu mengatasi teror akan memungkinkan penahanan praperadilan tersangka teror tertentu (praktik 7) dan memberlakukan tindakan perlindungan bagi hakim, jaksa, pengacara pembela, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus ini (praktik 1). Undang-undang yang melindungi bukti pidana agar tidak dirilis secara prematur atau sembarangan sebelum persidangan harus membuat saksi merasa lebih percaya diri bahwa mereka bisa memberikan kesaksian tanpa takut adanya tindakan balas dendam (praktik 6). Sistem yang memungkinkan perjanjian kerja sama formal — juga dikenal sebagai tawar-menawar hukuman (*plea bargaining*) — dapat mendorong tersangka untuk memberikan informasi akurat yang membantu mendakwa teroris lain atau mengungkapkan rencana serangan dan jaringan teroris (praktik 5).

Pengalaman baru-baru ini dari beberapa bagian dunia mengajarkan bahwa beberapa tempat perkembangbiakan yang paling subur bagi terorisme dan radikalisasi adalah di dalam sistem penjara nasional. Reformasi sektor peradilan pidana yang bertanggung jawab tidak bisa mengabaikan kebijakan penahanan dan reintegrasi yang efektif (praktik 11). Kebijakan tersebut harus mengatasi cara untuk mencegah diarahkannya kegiatan teroris dan perekrutan pengikut teroris dari dalam sistem penjara, hukuman kurungan yang tepat yang diperlukan untuk mencegah kegiatan teroris lainnya, dan program deradikalisasi dan reintegrasi untuk mengurangi residivisme.

Karena terorisme merupakan ancaman global yang mudah menembus batas-batas negara, sistem peradilan pidana yang paling efektif akan saling terhubung dengan negara-negara lainnya. Untuk itu, negara-negara yang belum memberlakukan undang-undang untuk memudahkan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik harus segera melakukannya (praktik 9). Pengembangan profesional untuk hakim, jaksa, pengacara pembela, penyidik, dan pejabat penjara juga harus terhubung dengan baik sehingga praktisi dapat berbagi teknik-teknik yang efektif. Negara-negara harus berinvestasi dalam pemberian gaji, pengembangan profesional, keamanan kerja, dan perlindungan fisik untuk mempertahankan profesional berkualitas tinggi yang dapat

**Badri Hartono, terpidana pemimpin kelompok Muslim militan, terlihat di pengadilan Jakarta Barat, Indonesia, pada Juni 2013. Hartono, yang diyakini memiliki hubungan dengan Al-Qaeda, mendapatkan hukuman 10 tahun penjara.**
AFP/GETTY IMAGES

**Petugas polisi berpakaian preman membuka borgol tersangka teror yang diadili di Jakarta, Indonesia, pada November 2013 karena perannya dalam rencana untuk mengebom Kedutaan Besar Myanmar.**
AFP/GETTY IMAGES

menjalankan fungsi khusus penuntutan terorisme (praktik 8).

Memorandum Rabat tidak menyerukan diberlakukannya sistem undang-undang dan pengadilan kontraterorisme yang terpisah. Ada beberapa alasan mengapa hal ini tidak diberlakukan. Pertama, sistem peradilan pidana akan mendapatkan hasil yang lebih konsisten ketika didasarkan pada sistem yang sudah dikenal dan dipahami oleh para praktisinya, dan bukannya sistem baru yang terasa asing dan dipaksakan. Kedua, penggunaan sistem pengadilan kontraterorisme terbukti tidak populer di sektor masyarakat komersial, yang takut bahwa asosiasi suatu negara dengan terorisme akan menyebabkan hilangnya peluang pariwisata dan bisnis. Masyarakat sipil juga mungkin khawatir bahwa sistem pidana baru ini dapat mengganggu kebebasan sipil dan tidak sejalan dengan norma-norma nasional. Sebaliknya, negara-negara harus berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan sistem peradilan pidana yang sudah ada untuk mengatasi terorisme.

Upaya melawan terorisme tidak terbatas pada medan tempur nun jauh di sana. Terorisme semakin menjadi masalah global yang memerlukan solusi terkoordinasi antar negara. Respons terhadap terorisme dari sistem hukum nasional — berdasarkan aturan hukum, menghormati hak asasi manusia, menggabungkan praktik-praktik yang baik, dan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai nasional — akan semakin penting bagi upaya kontraterorisme. □

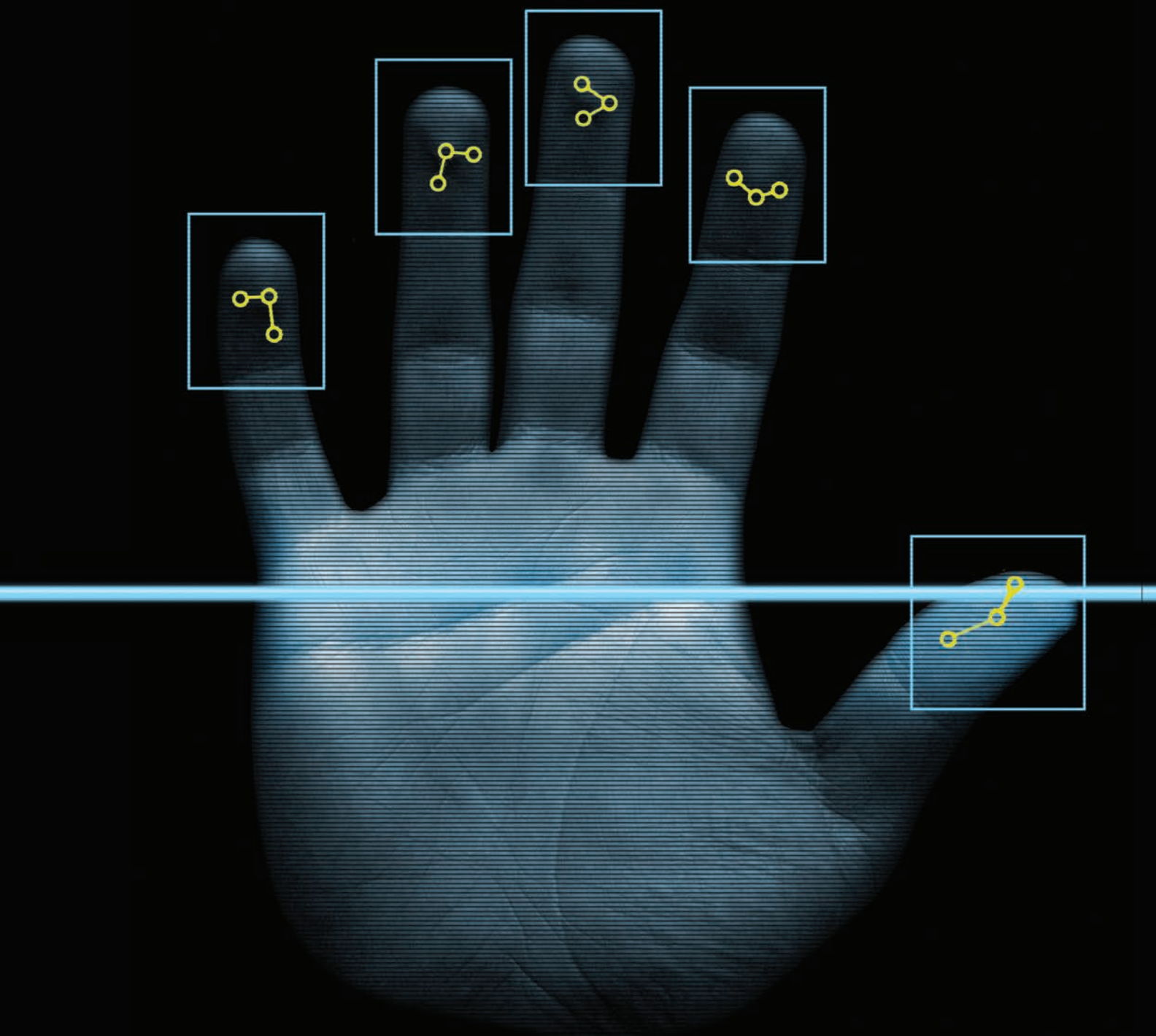

# BIOMETRIK
## MEMBANGUN KEAMANAN PERBATASAN

OLEH TOM ABKE DAN JIRI KOMINEK

ISTOCK

# PEMBAGIAN DATA MEMPERKUAT KEMAMPUAN PENINDAKAN

"Jihadi John" selalu mengenakan topeng hitam dengan hanya mata dan batang hidung yang terbuka di depan kamera agar tidak ada yang bisa mengenali dirinya. Akan tetapi, penyelidik dan analis berhasil mengidentifikasi dirinya pada Februari 2015 sebagai teroris dan juru bicara media dari Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang diketahui sebagai warga Inggris yang lahir di Kuwait, Mohammed Emwazi. Mereka menggunakan teknologi biometrik, termasuk perangkat lunak pengenalan wajah dan suara, untuk membuka kedok tersangka yang, dengan berpakaian serba hitam, muncul untuk memenggal kepala orang Barat di beberapa video ISIS.

Sejak serangan teroris 9/11, pemerintah di seluruh dunia telah mengakui perlunya mengadopsi berbagai bentuk teknologi biometrik untuk membuktikan identitas asli dari pemegang dokumen perjalanan, kartu identitas nasional, surat izin mengemudi, dan bentuk identifikasi pribadi lainnya yang bisa disalahgunakan oleh orang-orang untuk melakukan aksi teror atau kejahatan serius lainnya, seperti penyelundupan manusia, penipuan, atau pencucian uang.

Lebih dari 80 negara di seluruh dunia — termasuk Australia, Brunei, Tiongkok, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Maladewa, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Taiwan, Togo, dan Amerika Serikat — menggunakan program paspor elektronik yang menggabungkan data biometrik. Banyak negara lainnya mewajibkan pendaftaran biometrik bagi imigran. Sidik jari, pemindaian iris mata, dan karakteristik wajah adalah beberapa data yang membantu mengidentifikasi seseorang.

Seiring upaya negara-negara di seluruh Indo Asia Pasifik untuk mendorong percepatan integrasi yang lebih jauh, mereka menyadari perlunya menangani masalah-masalah umum seperti terorisme internasional dan kejahatan terorganisir yang pelakunya berusaha untuk mengeksploitasi proses integrasi ini dan merongrong keamanan kolektif dan kerja sama ekonomi yang efektif.

Negara-negara seperti Australia, India, Selandia Baru, dan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melihat teknologi biometrik sebagai alat bantu yang sangat diperlukan dalam membantu memerangi terorisme internasional dan kejahatan terorganisir baik dengan memastikan perbatasan yang lebih aman maupun melacak pergerakan uang dan barang.

## OTENTIKASI IDENTITAS

Teknologi biometrik memungkinkan otentikasi identitas seseorang melalui karakteristik fisiologis atau perilaku yang spesifik atau unik untuk setiap individu. Yang membuat identifikasi biometrik sangat efektif adalah bahwa karakteristik fisiologis ini tidak bisa hilang, lupa, dicuri atau dipalsukan. Dari miliaran orang di Bumi, tidak ada dua orang yang memiliki penanda biologis yang sama, seperti contohnya DNA, sidik jari atau pembuluh darah jari tangan.

Jenis otentikasi ini sangat penting. Contohnya, teroris diketahui menyamar sebagai pengungsi yang menyeberangi perbatasan. Identifikasi biometrik juga membantu pihak berwenang untuk mencegah perdagangan manusia dan mengenali paspor curian. Sistem perbatasan biometrik bahkan lebih berguna ketika negara-negara berbagi informasi dalam rangka memperluas jaring guna menangkap penjahat.

Selain memerangi kejahatan, sistem keamanan perbatasan biometrik mengurangi penundaan bagi wisatawan di bandara dan penyeberangan darat yang ramai. Pejabat perbatasan tidak perlu menggantungkan diri pada foto-foto yang tidak dapat diandalkan untuk memverifikasi identitas seseorang. Oleh karena itu keamanan dan efisiensi dapat ditingkatkan.

## EVOLUSI KEMAMPUAN SIDIK JARI

Lebih dari satu abad yang lalu, kriminolog menemukan manfaat teknologi sidik jari dalam membantu memecahkan kejahatan dan mengidentifikasi pelaku. Konsep membangun database atau katalog sidik jari penjahat yang dikenal dikembangkan untuk pertama kalinya pada tahun 1891 oleh Juan Vucetich, petugas polisi senior di Argentina.

**Peneliti Jepang menunjukkan teknologi pengodean biometrik baru untuk mengekstraksi dan mencocokkan kode biner dari citra pembuluh darah telapak tangan di kantor pusat Fujitsu, Tokyo.**
AFP/GETTY IMAGES

Kemampuan ini telah berkembang pesat sejak saat itu. Pemerintah Pakistan, misalnya, beralih ke data biometrik sidik jari ketika pada Maret 2015, memerintahkan semua perusahaan layanan seluler untuk memperoleh pemindaian sidik jari pelanggan mereka paling lambat 15 April 2015. Layanan seluler pelanggan akan dihentikan apabila pelanggan tidak mematuhinya.

Dengan lebih dari 103 juta kartu modul identifikasi pelanggan (SIM) seluler aktif yang beredar di dalam negeri, pemerintah Pakistan bertekad untuk menghubungkan kartu SIM ini dengan sidik jari pemiliknya dalam upaya untuk membendung meningkatnya gelombang serangan teroris, seperti insiden Desember 2014 di Peshawar. Anggota Taliban menyerang sebuah sekolah dan menewaskan lebih dari 140 orang, sebagian besar merupakan anak sekolah. Pakistan bertekad untuk mencegah teroris menggunakan akun ponsel yang tidak bisa dilacak untuk mengoordinasikan serangan.

Lima dari enam penyerang dalam insiden Peshawar berkomunikasi dengan ponsel yang tidak memiliki pemilik yang sah atau dapat dilacak, sementara penyerang keenam menggunakan telepon yang terdaftar atas nama wanita Peshawar tak bersalah yang tidak tahu bahwa namanya didaftarkan dengan nomor ponsel tersebut. Pakistan adalah salah satu negara pertama di dunia yang mengadopsi paspor biometrik pada tahun 2004.

Yang membuat identifikasi biometrik sangat efektif adalah bahwa karakteristik fisiologis ini tidak bisa hilang, lupa, dicuri atau dipalsukan. Dari miliaran orang di Bumi, tidak ada dua orang yang memiliki penanda biologis yang sama, seperti contohnya DNA, sidik jari atau pembuluh darah jari tangan.

Saat ini, semua negara anggota ASEAN, kecuali Laos dan Myanmar, telah memulai program untuk menggabungkan teknologi biometrik ke dalam dokumen perjalanan dan bagian identifikasi pribadi utama lainnya.

Sementara itu, pada tahun 2009, India mulai membangun database berbasis biometrik terbesar di dunia dalam bentuk program tanda pengenal nasional yang disebut Aadhaar. Program ini didasarkan pada teknologi sidik jari, pemindaian iris mata, dan foto wajah bersama dengan data demografis (nama, usia, jenis kelamin, alamat, nama orang tua/pasangan, dan nomor telepon seluler) seseorang. Program ini diikuti sekitar 550 juta penduduk dan telah memberikan 480 juta nomor Aadhaar hingga November 2013, menurut data terbaru yang tersedia. Program ini bertujuan untuk menerbitkan kartu tanda pengenal nasional untuk 1,25 miliar penduduk dalam beberapa tahun.

Program ini bersifat sukarela dan belum disetujui oleh Parlemen India menyusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa program ini tidak boleh diwajibkan sebelum semua kekurangan dan ilegalitas konstitusional telah diselesaikan demi melindungi kebebasan sipil warga negara. Akan tetapi, pemerintah ingin membuat teknologi ini diwajibkan bagi paspor dalam waktu dekat.

## MEMERANGI ANCAMAN INTERNASIONAL

Teknologi biometrik dan data terpusat yang kemudian dihasilkannya telah diakui oleh pemerintah di seluruh dunia sebagai instrumen utama dalam membantu memerangi terorisme internasional, dengan fokus khusus pada ISIS dan kelompok terkait yang telah menggunakan internet untuk merekrut anggota baru dari penduduk Muslim di seluruh dunia.

Bukti menunjukkan bahwa ISIS telah merekrut pendukung dari negara-negara anggota ASEAN yang memiliki populasi Muslim cukup besar, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, serta di negara-negara lain di kawasan ini, termasuk Australia. ISIS tidak hanya merekrut orang-orang untuk berperang atas namanya di Suriah dan Irak, tetapi juga untuk melakukan aksi teror di negara asal mereka.

Pemerintah negara-negara Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru merupakan pembelanja terbesar di wilayah ini untuk sistem keamanan dan infrastruktur berbasis teknologi biometrik seperti program tanda pengenal nasional dan kontrol perbatasan. Sektor publik berada jauh di depan sektor swasta, tempat teknologi tersebut juga diterapkan khususnya di sektor jasa keuangan dan perbankan. Akan tetapi, teknologi ini hanya efektif jika kompatibel dengan sistem yang diterapkan oleh negara-negara tetangga dan juga jika pemerintah bersedia dan mampu untuk bertukar data secara efisien.

"Saya yakin bahwa pemerintah nasional di seluruh Asia Tenggara dan kawasan yang lebih luas telah mengakui perlunya pembagian informasi [biometrik] dan pembagian intelijen," kata Nigel Phair, asisten profesor di Universitas Canberra, dan pakar yang diakui dalam bidang keamanan dunia maya. "Pemerintah tidak hanya telah menyadari bahwa sistem tersebut harus kompatibel untuk memfasilitasi pembagian informasi penting, mereka juga menyadari bahwa proses pembagian yang sebenarnya bersifat timbal balik ... pertukaran yang saling menguntungkan yang sangat penting untuk keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi mereka," tambah Phair.

Semakin banyak pemerintah menandatangani perjanjian bilateral untuk berbagi data yang diperoleh dari dokumen tanda pengenal pribadi dan perjalanan biometrik sebagai bagian dari upaya internasional untuk memerangi terorisme dan kejahatan terorganisir transnasional.

## MEMPERLUAS PEMBAGIAN DATA

Terlepas dari instansi pemerintah yang setuju untuk berbagi data penting, lembaga penegak hukum internasional Interpol pada tahun 2014 meluncurkan proyek percontohan yang disebut I-Checkit yang memungkinkan penerbangan komersial untuk melakukan

**Nasabah memberikan pindaian sidik jari untuk membuka rekening di sebuah bank di Mumbai, India.** AFP/GETTY IMAGES

**Seorang pelanggan memindai ibu jarinya untuk verifikasi biometrik pada modul identifikasi pelanggan telepon selulernya di kios seluler di Karachi, India.** REUTERS

skrining data paspor terhadap database Interpol untuk mencegah agar penjahat atau calon teroris tidak bepergian dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu atau yang diperoleh secara ilegal.

Qatar Airways dan Air Arabia adalah dua maskapai penerbangan komersial pertama yang menjadi sukarelawan untuk proyek percontohan tersebut. Pejabat Interpol mengatakan bahwa, jika berhasil, program dan pembagian data tersebut dapat diperluas ke maskapai penerbangan lain serta lembaga keuangan dan hotel.

"Karena keterbatasan akses oleh otoritas nasional, maka tidakkah kita seharusnya mempertimbangkan menyediakan akses ke maskapai penerbangan itu sendiri dengan cara yang sangat terkendali," ungkap Michael O'Connell, direktur direktorat dukungan polisi operasional Interpol, kepada media saat peluncuran proyek ini pada Maret 2014.

Interpol mengakui bahwa lembaga ini harus meningkatkan upaya untuk membantu anggotanya dalam memerangi terorisme internasional dan kejahatan terorganisir, khususnya di dunia maya.

Pada September 2014, lembaga ini membuka Interpol Global Complex for Innovation (IGCI) di Singapura. Pusat ini dirancang untuk melengkapi kantor pusat lembaga ini di Lyon, Prancis, dan meningkatkan kehadirannya di Asia dengan bertindak sebagai pusat kegiatan global untuk memerangi kejahatan dunia maya. Pusat ini akan mencakup lab forensik digital dan pusat pelatihan.

"Selain menyediakan dukungan forensik, pusat ini akan bertindak sebagai jaringan 24/7 untuk berbagai upaya koordinasi dan ... juga akan memberikan dukungan forensik untuk negara-negara anggota," kata Dr. Madan Mohan Oberoi, direktur inovasi dan penjangkauan dunia maya IGCI.

Bidang lain tempat teknologi biometrik digunakan untuk meningkatkan keamanan adalah di ranah pelatihan simulasi dan membantu mengoordinasikan respons instansi pemerintah dalam situasi waktu nyata.

Singapura sepakat untuk bertindak sebagai tempat uji coba untuk proyek Kota Aman (Safe Cities), sebuah inisiatif penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh NEC Corp., yang memungkinkan instansi pemerintah mengintegrasikan dan menganalisis data dari sistem jaringan dan sensor yang ada dengan menggunakan alat bantu pembagian informasi dan analitik canggih.

Sistem jaringan dan sensor tersebut meliputi perangkat lunak pengenalan wajah (biometrik visual) dan pengenalan gerak (biometrik perilaku) serta data dari dokumen tanda pengenal dan perjalanan biometrik.

"Sepanjang kemitraan dengan NEC dalam proyek Kota Aman (Safe Cities), kami berharap untuk membuat dan menguji solusi yang secara signifikan akan meningkatkan kemampuan operasional dan efisiensi instansi pemerintah kami," kata Anselmus Lopez, direktur Direktorat Pengembangan Kemampuan dan Kemitraan Internasional, Divisi Kerja Sama dan Kemitraan Internasional di Kementerian Dalam Negeri Singapura.

Proyek Kota Aman akan berfokus pada pengembangan integrasi, prediksi, pemodelan, dan simulasi sistem komando dan kontrol, yang akan memengaruhi cara informasi dibagikan di antara beberapa sumber, dan menjamin akses yang dapat diandalkan terhadap informasi waktu nyata untuk membantu mengidentifikasi tren dan ancaman keamanan potensial.

Secara keseluruhan, data biometrik, yang dikatalogkan dan dibagikan dengan tepat kepada negara-negara mitra, menjanjikan untuk menjadi salah satu alat bantu yang paling berguna untuk menggagalkan upaya teroris dan penjahat internasional. Orang-orang yang memiliki niat jahat yang menggunakan paspor palsu dan curian untuk menghindari penangkapan akan mengalami kesulitan saat melintasi titik perbatasan ketika negara-negara ini terus meningkatkan keamanan dengan menggunakan teknologi biometrik dan pembagian data. □

# *Bapak Pendiri Singapura Meninggalkan Warisan Stabilitas*

THE ASSOCIATED PRESS

Lee Kuan Yew, pendiri Singapura modern, ditakuti akan taktik otoriternya dan dikagumi di seluruh dunia karena berhasil mengubah negara kota ini menjadi salah satu negara terkaya di dunia saat berkuasa selama 31 tahun.

Perdana Menteri pertama dan terlama di negara itu, yang meninggal pada 23 Maret 2015, pada usia 91 tahun, memandu Singapura melewati perpecahan traumatis dengan Malaysia pada tahun 1965 dan memimpin transformasi yang pada saat itu merupakan kota pelabuhan sepi menjadi pusat perdagangan dan keuangan global. Meskipun dia bisa tetap menjabat lebih lama lagi, dia mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan partai yang berkuasa, dan negara itu, kepada generasi yang lebih muda pada tahun 1990. Namun, dia tetap menjadi tokoh yang berpengaruh di belakang layar selama bertahun-tahun sampai kesehatannya memburuk.

"Pada akhirnya, kepuasan terbesar dalam hidup saya berasal dari fakta bahwa saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan dukungan, menghimpun keinginan untuk membuat tempat ini meritokrasi, bebas korupsi, dan sama untuk semua ras — dan bahwa hal itu akan terus berlangsung meskipun saya telah tiada, seperti selama ini," kata Lee dalam bukunya tahun 2013, *One Man's View of the World*.

Presiden A.S. Barack Obama menyebut Lee "visioner" dan "raksasa sejarah sejati." "Pandangan dan wawasannya tentang dinamika dan manajemen ekonomi Asia dihormati oleh banyak orang di seluruh dunia," kata Obama dalam sebuah pernyataan. "Tidak sedikit pemimpin dunia generasi saat ini dan generasi masa lalu telah meminta nasihatnya tentang tata kelola dan pembangunan."

Sekretaris Jenderal P.B.B. Ban Ki-moon mengatakan bahwa dia "sangat sedih" dengan wafatnya Lee. Dia menyebutkan bahwa Singapura merayakan ulang tahun kemerdekaannya yang ke-50 pada tahun 2015, dan "bapak pendirinya akan dikenang sebagai salah satu pemimpin Asia yang paling inspiratif," demikian menurut pernyataan yang dirilis oleh juru bicara Ban.

Ban mengatakan bahwa Lee membantu Singapura melakukan "transisi dari negara berkembang menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia, mengubahnya menjadi pusat bisnis internasional yang maju dengan pesat."

Warisan Lee mencakup pemerintahan yang efisien dengan sedikit korupsi, skema perumahan rakyat yang sukses, tarif pajak yang rendah untuk menarik investasi asing, sekolah yang unggul, dan jalan-jalan yang bersih dan aman. Semua itu telah membantu Singapura untuk terus-menerus menduduki peringkat teratas survei kota yang paling layak huni untuk ekspatriat.

Meskipun demikian, Lee menghadapi kritik karena menggunakan taktik yang keras untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Lee memenjarakan beberapa rival politik tanpa persidangan selama beberapa dekade dan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap jurnalis dan politisi oposisi, yang menimbulkan efek jera bagi mereka yang memiliki perbedaan pendapat.

Lee bersikeras bahwa batasan ketat pada kebebasan berbicara dan protes umum diperlukan untuk menjaga stabilitas

AFP/GETTY IMAGES

di negara multietnis dan multiagama yang mengalami kerusuhan rasial pada tahun 1960-an. Stabilitas itu, tambahnya, diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan dan meningkatkan standar hidup di negara yang memiliki sedikit sumber daya alam.

"Saya harus melakukan beberapa hal buruk, memenjarakan rekan-rekan tanpa persidangan," kata Lee dalam wawancara dengan surat kabar *The New York Times* yang diterbitkan pada September 2010. "Saya tidak mengatakan bahwa semua yang saya lakukan adalah benar. Tapi semua yang saya lakukan adalah untuk tujuan mulia."

Lee, yang Partai Aksi Rakyatnya telah memerintah Singapura sejak tahun 1959, tetap menjadi penasihat berpengaruh dengan status menteri Kabinet setelah mengundurkan diri sebagai perdana menteri, dan banyak rakyat Singapura, terutama generasi tua, memandangnya sebagai figur ayah yang bijaksana dan tegas.

Lee mundur dari jabatan menteri Kabinet dan mengundurkan diri dari komite eksekutif Partai Aksi Rakyat setelah pemilihan parlemen tahun 2011 ketika partai yang berkuasa memenangkan persentase suara terendah secara keseluruhan sejak kemerdekaan.

Salah seorang putranya, Lee Hsien Loong, adalah perdana menteri Singapura saat ini. Lee juga meninggalkan seorang putra lain, Lee Hsien Yang, dan seorang putri, ahli saraf Lee Wei Ling. Istrinya selama lebih dari 60 tahun, Kwa Geok Choo, meninggal pada Oktober 2010.

Lahir pada 16 September 1923, Lee dibesarkan dalam lingkungan berbahasa Inggris di Singapura yang merupakan bagian dari kekuasaan kolonial Inggris, dan Lee dikenal dengan nama Harry selama sebagian besar awal kehidupannya. Pendidikan universitasnya terganggu oleh pendudukan Jepang selama tiga tahun di pulau itu saat Perang Dunia II. Lee mengatakan bahwa itulah saat ketika dia belajar bagaimana kekuasaan bisa dimanfaatkan.

"Tentara Jepang menuntut ketaatan total, dan mendapatkannya dari hampir semua orang," tulisnya dalam memoarnya. "Penghargaan saya terhadap pemerintah, pemahaman saya tentang kekuasaan sebagai sarana untuk perubahan revolusioner, tidak akan diperoleh tanpa pengalaman ini."

Setelah menyelesaikan studinya di Raffles College di Singapura, Lee pergi ke Inggris untuk belajar hukum di Cambridge University. Di sana, dia menikah dengan Kwa, rekan mahasiswinya, pada tahun 1947. Lee kembali ke Singapura pada tahun 1950 dan mulai membuka firma hukum Lee & Lee dengan istrinya pada tahun 1955.

Pada tahun 1954, Lee membantu mendirikan Partai Aksi Rakyat yang beraliansi dengan serikat buruh komunis — hubungan yang kemudian dia putuskan — dan dia menjadi perdana menteri pertama Singapura pada tahun 1959 ketika Inggris memberikan wewenang pemerintahan mandiri dalam segala hal, kecuali pertahanan dan urusan luar negeri.

Singapura mengumumkan kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1963, dan Lee, yang percaya pulaunya tidak bisa bertahan hidup sendirian, membawa negara ini ke dalam federasi negara bagian tetangga yang menjadi

**Rakyat Singapura menangis ketika peti mati yang membawa Lee Kuan Yew lewat pada 29 Maret 2015.** GETTY IMAGES

cikal bakal negara Malaysia. Tapi pemimpin Melayu meminta Singapura untuk keluar setelah bergabung selama dua tahun karena adanya perbedaan ideologi. Lee menangis di televisi nasional saat mengumumkan perpisahan tersebut, yang kemudian dia sebut sebagai salah satu penyesalan politik terbesarnya.

Lee kemudian beralih memerintah negara pulau kecil itu, memberlakukan kebijakan ketat yang dilihat oleh beberapa orang sebagai mengendalikan setiap aspek kehidupan sehari-hari warga Singapura. Lee mempromosikan bahasa Inggris dan Mandarin serta melarang dialek Tionghoa lainnya dari sekolah umum, radio, dan TV. Lee juga memberlakukan integrasi etnis dengan mengontrol susunan bangunan apartemen umum, tempat tinggal bagi 80 persen penduduk. Pengendalian setiap aspek kehidupan terus berlangsung bahkan di bawah penggantinya, Goh Chok Tong, yang melarang penjualan permen karet karena orang-orang akan menempelkannya pada pintu kereta bawah tanah.

"Saya katakan tanpa penyesalan sedikit pun bahwa kita tidak akan berada di sini, kita tidak akan membuat kemajuan ekonomi, jika kami tidak campur tangan pada hal-hal yang sangat pribadi — siapa tetangga Anda, bagaimana Anda hidup, kegaduhan yang Anda buat, bagaimana Anda meludah atau apa bahasa yang Anda gunakan. Kami memutuskan apa yang benar. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang-orang," kata Lee pada tahun 1987.

Lee juga menindak kejahatan terorganisir dan memberlakukan hukuman berat untuk pelanggaran kecil, sebuah kebijakan yang telah membantu Singapura mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara dengan tingkat kejahatan kekerasan terendah di dunia. Kurir narkoba pasti mendapatkan hukuman gantung, perusak kadang-kadang dicambuk — seperti remaja Amerika Michael Fay pada tahun 1994 meskipun adanya permohonan keringanan hukuman dari Presiden A.S. saat itu Bill Clinton — dan membuang sampah sembarangan harus membayar denda besar.

Lee masih aktif bekerja di masa tuanya, mengomentari urusan dalam negeri dan internasional serta sering kali mewakili Singapura pada kunjungan ke luar negeri.

# TIONGKOK + RUSIA

## *Persahabatan sekejap?*

Kedua negara memiliki kesempatan untuk memperkuat perjanjian kerja sama, tapi kekecewaan yang muncul sejak dulu kala dan perbedaan sasaran dapat menghambat hubungan mereka.

REUTERS

Latihan angkatan laut bersama baru-baru ini antara Rusia dan Tiongkok di laut Hitam dan Mediterania, serta pertukaran diplomatik dengan presiden mereka, menyoroti berkembangnya hubungan di antara dua kekuatan besar Eurasia ini. Meskipun kedua negara memiliki kepentingan ekonomi utama yang sama dan menentang apa yang mereka sebut sebagai tatanan dunia yang didominasi A.S., seiring berjalannya waktu hubungan kedua negara terbukti tidak mulus dan mengalami ketegangan.

Salah satu sumber perselisihan penting adalah bahwa Tiongkok merupakan kekuatan yang sedang bangkit, sedang Rusia tidak. Moskow mungkin tidak bersedia menerima kemitraan junior dengan Tiongkok, Tiongkok juga kecil kemungkinannya untuk memperlakukan Rusia dengan rasa hormat yang diinginkan oleh Moskow.

Akan tetapi, tidak diragukan lagi bahwa hubungan Sino-Rusia sedang tumbuh. Perdagangan di antara kedua negara bernilai sekitar 1,34 kuadriliun rupiah (sekitar 100 miliar dolar A.S.) per tahun (sekitar sepersepuluh dari perdagangan Rusia dengan dunia, dan satu per empat puluh perdagangan Tiongkok dengan dunia). Sebagai bagian dari prakarsa Jalur Sutera Tiongkok yang diungkapkan oleh Presiden Xi Jinping dalam pertemuan Mei 2015 dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Tiongkok dapat berinvestasi pada infrastruktur Rusia yang bisa meningkatkan transportasi barang-barang Tiongkok melewati Rusia ke Eropa dan Timur Tengah. Moskow dan Beijing juga telah sepakat untuk mengerjakan dua proyek besar yang akan menyalurkan gas Siberia ke Tiongkok, sehingga memungkinkan Beijing untuk menggantikan Eropa sebagai pembeli terbesar gas alam Rusia.

Namun, masih tetap ada ketidakpastian.

Proyek-proyek tersebut memakan biaya besar. Tiongkok menawar semurah mungkin ketika Rusia kehilangan pangsa pasar gas di Eropa, dan Tiongkok melihat Rusia sebagai investasi yang berisiko. Moskow tidak lagi mengharapkan bahwa pembiayaan Tiongkok akan menggantikan pasar modal Barat, yang kurang dimiliki aksesnya oleh Rusia sejak diberlakukannya sanksi akibat intervensi bersenjata yang didukung Rusia di Ukraina.

Kekhawatiran akan rekayasa balik membuat Rusia enggan menjual teknologi militer canggih ke Tiongkok. Sekarang saat mengalami kesulitan finansial, Moskow setuju untuk menawarkan sistem pertahanan udaranya yang paling canggih. S-400 akan memungkinkan Tiongkok untuk menyerang sasaran di Taiwan dan bahkan daerah-daerah penting di India.

Tiongkok dan Rusia mensponsori institusi regional baru yang dapat membantu sekaligus merusak hubungan mereka di masa depan. Organisasi Kerja Sama Shanghai yang dipimpin oleh Tiongkok berusaha untuk melawan terorisme, ekstremisme, dan separatisme, terutama di Asia Tengah. Semua anggotanya, termasuk Rusia, khawatir dengan infiltrasi pejuang ekstremis dari Afganistan dan Timur Tengah.

Perserikatan Ekonomi Eurasia yang dipimpin oleh Rusia dibangun atas dasar perserikatan pabean yang ditetapkan sebelumnya dan beranggotakan Armenia, Belarusia, Kazakstan, dan Rusia. Tingginya dinding tarif eksternal kelompok ini akan membuat Tiongkok khawatir. Dengan semakin banyaknya industri Tiongkok yang pindah ke pedalaman, ekspor darat di perserikatan Eurasia akan menjadi lebih penting. Bank Investasi Infrastruktur Asia yang dipimpin oleh Tiongkok merupakan daya tarik utama di Eurasia, dan sebagai anggota pendiri, Rusia berharap untuk mendapatkan pembiayaan dalam jumlah besar.

Beijing dan Moskow juga dihubungkan oleh komitmen terhadap sistem politik otoriter yang didukung oleh retorika nasionalis yang semakin sering dikumandangkan. Putin dan Xi tidak puas dengan perjuangan Washington untuk sistem politik yang lebih terbuka. Hal ini tercermin dari reaksi marah Beijing terhadap demonstrasi mahasiswa di Hong Kong, dan dalam klaim Moskow bahwa kekuatan luar telah memanipulasi politik Ukraina untuk mendorong permusuhan terhadap Rusia.

Meskipun memiliki kepentingan bersama, prospek jangka panjang bagi kerja sama antara Beijing dan Moskow kurang menjanjikan, seperti yang tercermin dalam sejarah. Selama tiga dekade keretakan hubungan Sino-Soviet, dari pertengahan tahun 1950-an hingga

**Embun beku menutupi masker wajah prajurit Tentara Pembebasan Rakyat yang berjaga di dekat perbatasan Tiongkok dan Rusia di Heihe, provinsi Heilongjiang, pada Desember 2014.** REUTERS

akhir tahun 1980-an, perbedaan ideologi, politik, dan kepemimpinan mengakibatkan permusuhan serius. Sekitar 30 tahun yang lalu, Presiden Soviet Mikhail Gorbachev dan pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping memiliki kebijaksanaan bersama untuk membalikkan tren yang muncul sebelumnya.

Menurunnya prospek ekonomi Rusia melemahkan kemampuannya untuk menghadapi Tiongkok pada tataran yang setara. Ekonomi Tiongkok empat kali lipat lebih besar daripada ekonomi Rusia, dan kesenjangan ini terus melebar. Jatuhnya harga energi, sanksi Barat, dan kontrol statisme memberikan beban berat pada ekonomi Rusia.

Tren populasi di timur jauh Rusia juga menjadi pertanda buruk untuk hubungan yang stabil dengan Tiongkok. Beijing sejak lama bersikeras bahwa perbatasannya dengan Rusia ditentukan secara tidak adil karena "perjanjian yang tidak setara" dari abad ke-19 dan sebelumnya. Ketimpangan populasi tampak jelas dengan keberadaan beberapa juta "pekerja tamu" Tiongkok di timur jauh Rusia, didukung oleh populasi ratusan juta lainnya di timur laut Tiongkok. Bandingkan angka-angka ini dengan sekitar 6 juta orang Rusia di sisi perbatasan Moskow.

Tiongkok dan Rusia menghadapi "jebakan pendapatan kelas menengah." Untuk menghindarinya, ekonomi mereka harus lebih mengandalkan inovasi dan produktivitas yang lebih tinggi dan tidak terlalu mengandalkan sumber daya alam dan tenaga kerja murah. Jika salah satu atau yang lainnya tidak dapat mengakomodasi meningkatnya harapan populer yang menyertai tingkat pendapatan lebih tinggi, kerusuhan yang timbul bisa menyebar masuk ke dalam wilayah mereka.

Tiongkok dan Rusia sedang memasuki periode kurang stabil dalam menghadapi negara tetangga mereka yang lain. Putin telah menggunakan kekerasan terhadap Ukraina dan Georgia serta berusaha mengintimidasi negara-negara Eropa di sekitar Laut Baltik. Tiongkok mendorong klaim teritorial di laut Cina Timur dan laut Cina Selatan. Langkah ini menyebabkan kebangkitan kembali Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan membuat sebagian besar negara Asia meminta tambahan dukungan militer dari A.S.

Rusia dan Tiongkok akan berusaha untuk menghindari gesekan prioritas strategis masing-masing negara, tetapi ada risikonya. Beijing tidak melihat banyak keuntungan untuk melibatkan diri dalam konflik Ukraina, meskipun tindakan Rusia bertentangan dengan kepentingan pribadi Tiongkok yaitu tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan yang diakui secara internasional dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain. Bagi Tiongkok, ini adalah pilar yang mendukung sikap Beijing terhadap Tibet, Taiwan, dan wilayah Xinjiang di Tiongkok. Hal ini juga menjadi dasar dari nasionalisme baru yang sedang dibangun Xi di bawah agenda "Impian Tiongkok". Rusia hanya memiliki sedikit kepentingan di laut Cina Timur dan laut Cina Selatan dan akan memberi jalan kepada Tiongkok.

Barat tidak memiliki kepentingan dalam mendorong permusuhan antara Tiongkok dan Rusia. Perluasan hubungan energi akan mendiversifikasi sumber pasokan global, dan kerja sama perdagangan akan meningkatkan peluang ekonomi. Pada saat yang sama, Barat memiliki kepentingan yang kuat agar Tiongkok dan Rusia tidak memaksa negara tetangga yang lebih kecil. Tekanan Rusia pada Ukraina dan tekanan Tiongkok di laut Cina Timur dan laut Cina Selatan mendorong Barat untuk memperkuat pertahanan dan mengintensifkan diplomasi demi menghindari konflik.

Amerika Serikat telah lama berupaya menjalin hubungan konstruktif dengan Tiongkok dan Rusia, meskipun banyak perbedaan di antara mereka. Hal ini seharusnya terus dilanjutkan, meskipun Washington dan sekutu serta teman-temannya mengambil langkah-langkah untuk melawan koersi. Amerika memiliki kepentingan dalam NATO yang kuat dan menjadi kekuatan Indo-Asia-Pasifik dengan jaringan hubungan bilateral dan multilateral yang erat, termasuk Kemitraan Trans-Pasifik, kesepakatan perdagangan besar yang sekarang ini dalam tahap negosiasi akhir.

Jika Rusia tidak dapat menemukan sumber pertumbuhan ekonomi baru, negara ini akan kehilangan klaimnya sebagai kekuatan besar. Melalui pragmatisme, terutama di bidang energi dan perdagangan, Tiongkok dan Rusia memiliki opsi untuk memperkuat hubungan yang didasarkan atas kerja sama. Pada saat yang sama, keterbatasan kemitraan mereka dapat tumbuh dari waktu ke waktu, mengingat jalan berbeda yang diambil oleh kedua negara dan kekecewaan yang muncul sejak dulu kala.

Moskow dan Beijing harus membuat keputusan penting. Sikap anti-A.S. tidak membantu kedua negara itu dalam mencapai sasaran nasionalnya yang paling penting.

# *Ledakan* surat kabar regional *di India*

KISAH DAN FOTO OLEH **THE ASSOCIATED PRESS**

**Penjual surat kabar mengikat surat kabar di sepedanya pada dini hari di daerah kota tua New Delhi, India.**

Rewatiraman Shukla, pekerja kantor muda yang tinggal di daerah kumuh di pinggiran New Delhi, tidak ingat kapan keluarganya tidak mendapatkan surat kabar yang dikirim ke rumah mereka. Meskipun rumahnya hanya memiliki satu kamar di rumah petak padat tanpa saluran air ledeng dalam ruangan. Meskipun ayahnya bekerja berjam-jam sebagai pencari nafkah tunggal untuk menyediakan kebutuhan hidup dasar.

Ayah Shukla meyakini bahwa surat kabar akan membuka dunia peluang bagi ketiga anaknya. Dan sekarang, keluarga seperti ini memicu pertumbuhan surat kabar regional yang luar biasa di India.

Pada saat sejumlah surat kabar Amerika melakukan perampingan atau beralih ke edisi online, industri surat kabar India sedang meledak. Analis media mengatakan bahwa surat kabar bahasa daerah diperkirakan mencapai pangsa pasar dua digit dalam dekade mendatang ketika jutaan aksarawan baru memilih surat kabar sebagai sumber informasi utama mereka.

"Surat kabar, terutama dalam bahasa daerah, merupakan bisnis yang berkembang pesat di India sekarang. Kami sedang menikmati ledakan bisnis ini, jadi kami merasa sangat antusias," kata Pradeep Dwivedi dari *Dainik Bhaskar*, atau *Daily Sun*, surat kabar bahasa Hindi paling populer di negeri ini, dengan sekitar 3,57 juta eksemplar terjual setiap harinya.

India yang demokratis memiliki sejarah panjang berita cetak; surat kabar pertama didirikan lebih dari 230 tahun yang lalu. Lembaga Pendaftaran Surat Kabar pemerintah di India mencatat lebih dari 82.000 surat kabar. Hampir 33.000 di antaranya adalah surat kabar berbahasa Hindi, bahasa yang digunakan oleh 41 persen dari 1,2 miliar penduduk India. Ribuan surat kabar lainnya menggunakan banyak bahasa daerah India, dan banyak juga memiliki oplah jutaan eksemplar. Jumlah pembaca bahkan lebih besar, karena satu eksemplar surat kabar sering kali dibaca bersama-sama oleh banyak pembaca.

Secara keseluruhan, surat kabar regional akan tumbuh 12 hingga 14 persen per tahun selama beberapa tahun ke depan, demikian menurut perkiraan perusahaan konsultan KPMG India.

**Rewatiraman Shukla, 24 tahun, membaca surat kabar pagi di rumahnya di New Delhi, India.**

Pakar media mengatakan ledakan surat kabar di kota-kota kecil didorong oleh para penduduknya yang aspiratif dan berusia muda. Dorongan besar untuk pendidikan selama lima dekade terakhir telah meningkatkan tingkat melek huruf, yang tumbuh dari 65 persen menjadi 74 persen pada dekade yang berakhir pada tahun 2011. Tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dan pemerintah memprediksi keaksaraan universal baru akan dicapai pada tahun 2060.

Di dunia Barat, Internet telah mengikis pendapatan iklan dan sirkulasi surat kabar, tetapi di India, hal itu masih belum terjadi. Meskipun akses internet meningkat pesat di India, sekitar 80 persen dari negara ini masih belum mendapatkan akses internet. Surat kabar India, yang dapat diperoleh dengan harga kurang dari 120 rupee (2 dolar A.S.) per bulan, jauh lebih mudah diakses.

Banyaknya saluran berita televisi dalam bahasa daerah secara mengejutkan ternyata malah meningkatkan jumlah pembaca surat kabar, kata P.N. Vasanti, direktur Pusat Studi Media di New Delhi. "Kami menyebutnya 'efek pembangkit selera.' Dalam penelitian tentang kebiasaan media masyarakat, kami menemukan bahwa semakin banyak masyarakat menonton berita televisi, semakin banyak pula mereka beralih ke surat kabar untuk memeriksa fakta-fakta yang ada," katanya. "Di India, kredibilitas surat kabar dan berita tertulis jauh melebihi kredibilitas saluran berita televisi."

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi India, pendapatan iklan juga meningkat. Sampai saat ini, surat kabar berbahasa Inggris menguasai sebagian besar anggaran iklan pelaku usaha. Tapi, hal itu hanya terbatas di kota-kota terbesar di India.

Sekarang, pengiklan telah menemukan tersebar luasnya media cetak berbahasa daerah dan kemampuannya untuk menjangkau pelanggan di kota-kota berukuran menengah yang sedang berkembang. Didorong oleh pertumbuhan pembaca, dan meningkatnya kekuatan ekonomi kelas menengah yang menggunakan bahasa daerah, pembuat barang-barang kebutuhan sehari-hari melihat kota-kota kecil dan pedesaan India sebagai pasar yang berpotensi berkembang dengan pesat, kata Dwivedi.

"Pertumbuhan riil surat kabar regional terjadi di kota-kota kecil, tempat aksarawan baru muncul dan masyarakatnya masih menjalani kehidupan dengan kecepatan yang lebih lambat, memberi mereka cukup waktu untuk membaca surat kabar harian dengan cermat," kata Dwivedi.

Cakupan surat kabar juga telah berubah dengan suplemen berwarna dan halaman tambahan mengenai makanan, mode, dan gaya hidup mewah yang diperuntukkan untuk masyarakat dengan pendapatan berlebih dan penduduk muda yang sedang berkembang.

Ketika urbanisasi yang cepat mengikis jaringan keluarga tradisional, surat kabar juga melayani tujuan lain. Peran mak comblang yang ada sejak dulu kala untuk menemukan pasangan bagi pria atau wanita muda untuk pernikahan yang diatur secara adat kini dilayani oleh iklan baris di surat kabar setempat.

Di negara tempat asal-usul kasta memainkan peran besar dalam menentukan aliansi pernikahan, masyarakat melihat surat kabar regional sebagai cara yang mudah untuk menjangkau anggota komunitas mereka. Pada setiap akhir pekan, iklan baris pernikahan yang memenuhi beberapa halaman di banyak surat kabar berbahasa daerah masih menjadi penghasil pendapatan utama.

Ayah Rewatiraman, Ved Prakash Shukla, telah berlangganan surat kabar berbahasa Hindi selama 15 tahun demi anak-anaknya, meskipun kesulitan keuangan yang dialaminya membuat surat kabar ini menjadi suatu barang mewah.

"Memang sulit. Istri saya memarahi saya dan berkata, 'Mengapa kamu membuang-buang uang untuk membeli surat kabar ketika kita tidak punya uang untuk membeli makanan?'" kata Shukla pada suatu pagi saat duduk di tangga di luar rumah kecilnya sambil membaca surat kabar dan meminum secangkir teh pagi.

"Tapi saya melihat surat kabar sebagai investasi bagi masa depan anak-anak saya. Saya bekerja sebagai sopir dan saya melihat bagaimana anak-anak orang kaya menggunakan bahasa Inggris dan mengetahui semua hal yang terjadi di dunia."

Investasi Shukla tampaknya terbayarkan. Rewatiraman baru-baru ini mendapatkan promosi, dan mulai berhasil mendaki tangga karier di perusahaannya. "Tidak sia-sia bertahun-tahun membaca surat kabar. Sekarang saya merasakan manfaatnya," katanya.

# BENCANA DI MASA LALU *menginspirasi* ALAT INOVATIF UNTUK RESPONS DI MASA DEPAN

KISAH DAN FOTO OLEH THE ASSOCIATED PRESS

Manusia tak mampu mencegah bencana seperti angin topan dan gempa bumi. Akan tetapi, di Jepang, tempat masih terlihatnya sebagian besar kehancuran akibat bencana tsunami tahun 2011, sedang tumbuh pesat industri yang merancang cara-cara untuk mengatasi bencana.

Beberapa produk yang dipamerkan di konferensi bencana Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Maret 2015 di kota Sendai yang terletak di timur laut Jepang menampilkan inovasi teknologi tinggi dan bahan-bahan baru. Banyak produk merupakan solusi yang benar-benar praktis dan inventif untuk mengatasi tantangan menyelamatkan orang-orang dari bahaya dengan cepat.

Produk-produk itu termasuk Jinriki buatan Masayoshi Nakamura — pegangan yang dibuat sesuai pesanan yang dirancang agar lebih mudah menggerakkan kursi roda melewati puing-puing dan naik ke atas bukit. "Saya hanya ingin melakukan sesuatu untuk membantu," kata Nakamura, sambil naik ke kursi roda dan mengajak pengunjung untuk mencobanya.

Pegangan tinggal colok dan sekrup, yang mengubah kursi roda menjadi becak versi modern seperti yang terlihat di film-film lama, memungkinkan seseorang untuk mendorong atau menarik kursi roda di atas pasir dan salju, dan naik turun tangga dengan relatif mudah.

Nakamura tahu sejak awal bahwa mendorong kursi roda bisa membutuhkan kerja keras, karena ketika masih anak-anak dia sering mendorong kursi roda saudara laki-lakinya yang cacat ke lingkungan sekitar saat bermain dengan teman-teman. Dia memperoleh ide untuk menciptakan Jinriki saat bekerja di sebuah proyek pariwisata, tapi dia baru mampu mengubahnya menjadi kenyataan setelah bencana Maret 2011.

Mampu melarikan diri dengan cepat ke tempat yang lebih tinggi menentukan hidup atau matinya seseorang ketika tsunami yang tingginya mencapai 40 meter menghancurkan pesisir timur laut Jepang, termasuk pelabuhan dan pinggiran kota pesisir Sendai, dan menewaskan lebih dari 18.500 orang.

Banyak orang lanjut usia yang tinggal di desa-desa pinggir pantai Jepang tidak bisa melarikan diri tepat pada waktunya. Rangka angkut orang buatan Pioneer Seiko Co., yang merupakan perpaduan antara ransel balita dan kursi ukuran dewasa, dapat digunakan oleh orang dewasa untuk menggendong orang dewasa lainnya.

Sulit memperkirakan berapa jumlah uang yang dihabiskan untuk pembelanjaan dan manufaktur terkait bencana. Pasarnya mencakup pembelanjaan pemerintah dan swasta serta termasuk berbagai macam barang mulai dari terpal dan wadah air hingga sistem peringatan dini canggih untuk tsunami dan angin topan.

Secara global, pembelanjaan terkait bencana meningkat ketika kerugian akibat bencana yang berhubungan dengan cuaca melonjak. Pengamat memperkirakan bahwa pembelanjaan senilai 13.300 rupiah (sekitar 1 dolar A.S.) untuk pencegahan dapat menghasilkan penghematan kerugian hingga 485 ribu rupiah (sekitar 36 dolar A.S.), Bank Dunia

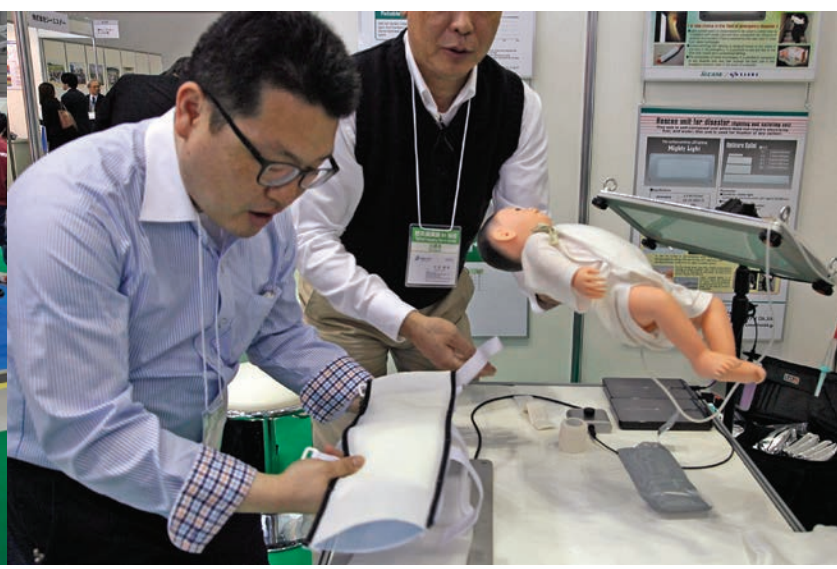

mengalokasikan 18,9 triliun rupiah (sekitar 1,4 miliar dolar A.S.) pada tahun 2012-2014 untuk kesiapsiagaan bencana, hampir setengah dari 40,4 triliun rupiah (sekitar 3 miliar dolar A.S.) dialokasikan untuk pembangunan kembali pasca bencana.

Takahisa Kishimoto dari Teijin Frontier Co., anak perusahaan raksasa tekstil Teijin, menjajakan selimut dengan lubang seukuran tangan yang dapat digunakan untuk mengangkut orang yang terluka keluar dari zona bencana ketika tidak tersedia tandu.

Banyak peserta pameran di Sendai berasal dari pusat industri bagian barat Jepang yaitu Osaka, berusaha memperluas bisnisnya ke Jepang bagian utara dan berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah Takashi Torano, ahli bencana di Fujiwara Industry Co., pembuat menara untuk melarikan diri saat terjadi tsunami, salah satu dari banyak jenis peralatan bencana. Fujiwara juga membuat tempat tidur yang dilengkapi dengan lempengan baja di atas kepala yang mampu melindungi tiga orang dewasa dari puing-puing yang berjatuhan.

"Idenya adalah untuk menciptakan ruang yang aman di rumah," kata Torano. Penawaran lainnya termasuk perlengkapan darurat untuk membantu mengeluarkan orang dari rumah yang runtuh dan topi keras yang dirancang agar terlihat seperti topi bisbol. "Anda bisa berkeliling kota dan tidak perlu khawatir dengan gempa yang menyebabkan reruntuhan jatuh mengenai kepala Anda," kata Torano.

Pada skala yang lebih besar, Nippon Steel & Sumitomo Metal Products Co. dan kontraktor Shimizu Corp. telah mengembangkan "lantai bedah anti-seismik" untuk menjaga keseimbangan meja operasi seandainya terjadi gempa.

Pemerintah gencar menjajakan teknologi yang terkait dengan bencana sebagai upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi yang lesu. Pada konferensi P.B.B., Japan Bosai Platform Bureau, yang didirikan dengan dukungan dari Kementerian Pertanahan dan Perhubungan, menawarkan pusat layanan online satu atap bagi perusahaan bahan konstruksi dan bangunan utama yang ingin mengekspor produk dan keahlian mereka.

Pada April 2015, pemerintah Jepang mengumumkan rencana strategi manajemen risiko 10 tahun yang dimaksudkan untuk mengurangi separuh jumlah kematian dan kerusakan yang diperkirakan terjadi di wilayah Tokyo yang rawan gempa. Selain memperkuat bangunan dan mengurangi kemacetan di daerah pinggir sungai yang rawan kebakaran, pemerintah berniat untuk menyediakan 72 juta makanan, 6 juta selimut, dan 54 juta toilet portabel siap pakai.

Meskipun simulator gempa, kendaraan segala medan, dan barang-barang mahal lainnya menarik perhatian sebagian besar pengunjung di Sendai, beberapa produk yang lebih inovatif berada pada skala yang lebih kecil. Salah satu contohnya adalah Opticure Splint, terbuat dari resin yang, bila terkena lampu LED, akan mengeras menjadi cetakan ringan namun kuat untuk menghentikan pergerakan anggota tubuh yang patah atau bahkan seluruh tubuh bayi.

"Penanganan bayi yang punggung atau lehernya patah selalu menjadi masalah besar karena tidak ada penyangga leher yang sesuai dengan ukuran mereka," kata Yoshikazu Matsumoto dari Laboratorium Teknik Medis Alcare Ltd., perusahaan rintisan yang berbasis di Tokyo.

Pada skala yang lebih kecil, Icomes Lab Co. dari Iwate, salah satu daerah yang terkena dampak terparah akibat tsunami tahun 2011, menampilkan pompa mikro untuk memberikan cairan infus kepada pasien tanpa harus menjaga ketinggian kantong larutan infus yang mengandalkan gravitasi.

Salah satu peserta pameran terbesar di Sendai adalah militer Jepang, yang memamerkan berbagai kendaraan, tenda, klinik udara terbuka, dan dapur portabel yang dikembangkan untuk digunakan saat bencana.

Wajah prajurit Kazuma Kita tampak berseri-seri saat menjelaskan penggunaan kamar mandi umum besar di udara terbuka yang dikerahkan selama krisis tahun 2011 untuk membantu korban dan regu penolong membersihkan diri sehingga menenangkan jiwa dan raga. "Kami membantu 120.000 orang untuk bersantai," jelasnya.

**DARI KIRI:**
**Staf Teijin Frontier Co., pembuat tekstil khusus, mendemonstrasikan di pameran produk bencana di Sendai, Jepang, bagaimana selimut dengan lubang seukuran tangan buatan mereka dapat digunakan sebagai tandu dalam situasi darurat.**

**Staf di pameran menunjukkan cara menggunakan Opticure Splint. Cetakan darurat ini akan mengeras bila terkena lampu LED.**

**Masayoshi Nakamura, kiri, pendiri Jinriki Co., menjelaskan cara menggunakan penemuannya untuk memindahkan orang-orang di kursi roda melewati lahan yang tidak rata, pasir, salju, dan naik turun bukit.**

AFRIKA

ISTOCK

# PEMBURU ALBINO WASPADALAH

Malawi telah memerintahkan polisi untuk menembak "penjahat berbahaya" yang menyerang orang-orang albino untuk menjual bagian tubuh mereka untuk ilmu sihir. "Tembak setiap penjahat kejam yang tertangkap tangan menculik penderita albinisme," kata kepala polisi Malawi, Lexen Kachama, kepada para petugas.

Enam orang albino tewas di negara Afrika bagian selatan yang miskin ini antara Desember 2014 dan April 2015, demikian menurut Asosiasi Penyandang Albinisme di Malawi.

Kachama memberi tahu para petugas di distrik Machinga di bagian selatan negara ini, tempat sebagian besar serangan terjadi, bahwa "kita tidak bisa melihat saja sementara teman-teman kita penderita albinisme dibunuh seperti binatang setiap hari." Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin "mendengar aparat polisi mengejar penjahat berbahaya, terutama penjahat yang menculik orang-orang albino dengan membawa gas air mata atau senjata ringan lainnya."

"Itu sebabnya saya memerintahkan polisi untuk menggunakan senjata secara proporsional sesuai dengan beratnya pelanggaran. Kita harus aman dari penjahat," tambahnya.

Orang-orang albino telah menjadi korban gelombang serangan di seluruh Afrika dalam beberapa bulan terakhir. Perserikatan Bangsa-Bangsa (P.B.B.) telah memperingatkan bahwa situasi itu sangat akut di Tanzania, Burundi, dan Malawi.

P.B.B. mengatakan lonjakan kekerasan terhadap orang-orang albino di Tanzania mungkin terkait dengan pemilihan umum dan pemilihan presiden pada Oktober 2015, ketika juru kampanye politik berusaha mendapatkan dukungan dari ahli-ahli sihir yang berpengaruh. Agence France-Presse

POLANDIA/RUSIA

## MENJAWAB PANGGILAN TUGAS

Pesawat terbang Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memekik di langit Eropa Timur, dan kendaraan lapis baja Amerika bergemuruh di dekat perbatasan dengan Rusia pada misi untuk meyakinkan warga bahwa mereka aman dari agresi Rusia.

Akan tetapi, saat ini masyarakat awam tidak mau mengambil risiko.

Di Polandia, dokter, pemilik toko, anggota parlemen, dan warga lain memenuhi panggilan untuk menjalani pelatihan militer seandainya terjadi invasi. Negara tetangga, Lituania, memberlakukan kembali wajib militer dan mengajari warga tentang apa yang harus dilakukan apabila terjadi perang. Tahun depan Latvia berencana memberikan pelatihan militer kepada mahasiswa.

Dorongan untuk mengajari masyarakat awam tentang cara menggunakan senjata dan berlindung dari tembakan mencerminkan lonjakan kecemasan di antara masyarakat di kawasan tempat kenangan dominasi Moskow — yang berakhir pada tahun 1990-an — masih tertanam dengan erat. Masyarakat khawatir bahwa keamanan dan kemerdekaan yang diperoleh dengan susah payah terancam ketika perselisihan antara Barat dan Rusia menjadi semakin intensif akibat konflik di Ukraina yang menyebabkan tewasnya lebih dari 6.000 orang.

**Mateusz Warszczak, kiri, mengikuti pelatihan militer dengan sukarela di Warsawa, Polandia.**
THE ASSOCIATED PRESS

Di Polandia, generasi tertua mengingat invasi Tentara Soviet pada tahun 1939, pada awal Perang Dunia II. Generasi yang lebih muda masih mengalami trauma akibat penindasan rezim komunis yang berlangsung selama lebih dari empat dekade. Bahaya ini dirasakan di seluruh negara-negara pendatang baru Uni Eropa yang berbatasan dengan Rusia.

The Associated Press

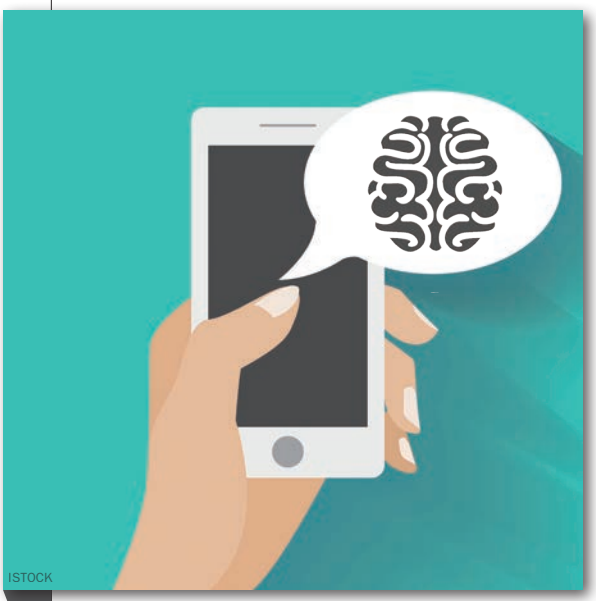

ISTOCK

# PONSEL CERDAS MENGUBAH interaksi otak dan ibu jari

REUTERS

Mengetik pesan teks, menggulir halaman Web, dan memeriksa email pada ponsel cerdas dapat mengubah cara interaksi ibu jari dan otak Anda. Demikian ungkap peneliti dari Universitas Zurich, ETH Zurich, dan Universitas Fribourg.

Dr. Arko Ghosh dari Universitas Zurich dan ETH Zurich memimpin penelitian yang melibatkan penggunaan elektroensefalografi (EEG) untuk mengukur aktivitas korteks otak pada 37 orang yang dominan menggunakan tangan kanan. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Cell Press *Current Biology* pada Desember 2014 ini mencakup 26 orang pengguna ponsel cerdas layar sentuh dan 11 orang pengguna ponsel kuno.

Subjek mengenakan topi EEG yang dilengkapi dengan 62 elektrode untuk merekam bagaimana otak memproses sentuhan dari ibu jari, telunjuk, dan jari tengah mereka. Para peneliti kemudian membandingkan aktivitas otak dengan perintah yang direkam oleh catatan telepon masing-masing individu.

"Kami mengukur aktivitas otak seseorang dengan menggunakan sekelompok elektrode pada kulit kepala, dan apa yang ditunjukkan peta ini pada dasarnya adalah berapa banyak perbedaan di antara orang-orang itu yang bisa kita jelaskan dengan hanya melihat catatan telepon, jadi berapa banyak aktivitas otak yang dapat dijelaskan dengan melihat riwayat penggunaan ponsel seseorang semata," kata Ghosh.

Sambil menunjukkan pemindaian otak di komputernya, dia menambahkan: "Misalnya, bintik-bintik merah di sini menunjukkan, ketika Anda mengukur sinyal elektrode ini, banyak perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain dapat dijelaskan hanya dengan berapa banyaknya mereka menggunakan ponsel dalam 10 hari sebelumnya."

Aktivitas listrik dalam otak pengguna ponsel cerdas terbukti meningkat ketika ketiga ujung jari itu tersentuh. Aktivitas di korteks otak yang berhubungan dengan ujung ibu jari dan jari telunjuk berbanding lurus dengan intensitas penggunaan telepon, seperti yang diukur dengan catatan baterai terpasang, menurut mahasiswi peneliti Magali Chytiris.

"Aktivitas ini terkait dengan jumlah penggunaan telepon dalam beberapa hari terakhir," kata Chytiris. "Jadi kami menggunakan catatan tersebut, catatan baterai, dari telepon dan kami menemukan bahwa jika perekaman EEG dilakukan tepat setelah puncak penggunaan intensif yang tinggi, maka aktivitas otak akan menjadi lebih tinggi."

Ghosh mengatakan hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa gerakan berulang di atas permukaan layar sentuh membentuk kembali pengolahan sensorik dari tangan, dengan pembaruan harian dalam representasi otak dari ujung jari tangan. Dia percaya bahwa pengolahan sensorik korteks di otak kontemporer terus dibentuk oleh teknologi digital pribadi.

"Sebagian besar hal yang muncul dari apa yang kami temukan adalah bahwa pengguna ponsel cerdas memiliki otak yang memproses sentuhan secara berbeda dari orang-orang yang tidak menggunakan ponsel pintar layar sentuh," kata Ghosh. "Akan tetapi, jika Anda menggali data tersebut sedikit lebih dalam, apa yang Anda lihat pada dasarnya adalah bahwa penggunaan terbaru yang diakumulasikan orang-orang pada ponsel cerdas mereka yang mencerminkan cara otak memproses informasi dari ujung jari tangan mereka. Jadi pada dasarnya fluktuasi sehari-hari yang kita hadapi melalui kehidupan kita sehari-hari menanamkan pada otak tentang cara otak memproses informasi dari tangan Anda."

Ghosh mengatakan bahwa penggunaan ponsel cerdas adalah cara yang ideal untuk menjelajahi plastisitas sehari-hari otak manusia. "Ini memberi kita alasan yang sangat baik untuk kembali dan melihat ke dalam catatan telepon secara lebih rinci untuk memahami bagaimana riwayat digital kita dapat digunakan untuk memahami fungsi otak dan mengembangkan solusi dunia nyata dengan mempelajari contoh plastisitas otak dalam dunia nyata," ungkapnya.

REUTERS

## *Waktu berhenti berdetak di* DESA ORANG-ORANGAN SAWAH *di Jepang*

Tsukimi Ayano membuat orang-orangan sawah pertamanya 13 tahun yang lalu untuk menakut-nakuti burung yang mematuki benih di kebunnya. Boneka jerami seukuran manusia itu mirip dengan ayahnya, sehingga dia membuat lebih banyak lagi. Kemudian dia tidak bisa berhenti membuatnya.

Saat ini, desa kecil Nagoro di bagian selatan Jepang penuh dengan kreasi jahitan tangan Ayano, membeku dalam waktu untuk pertunjukan lakon tanpa gerak yang menangkap gerakan kehidupan sehari-hari.

Orang-orangan sawah berpose di rumah, ladang, pohon, jalanan, dan di halte bus yang penuh sesak — tempat mereka menunggu bus yang tidak pernah datang. "Di desa ini, hanya ada 35 orang," kata Ayano. "Tetapi ada 150 orang-orangan sawah, sehingga jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak dari jumlah penduduk."

Nagoro, seperti banyak desa di pedesaan Jepang, telah terpukul keras oleh penduduk yang pindah secara berbondong-bondong ke kota-kota untuk bekerja dan yang tertinggal hanyalah sebagian besar pensiunan. Masyarakatnya yang menua adalah mikrokosmos Jepang, yang jumlah populasinya mengalami penurunan selama satu dekade dan diproyeksikan turun dari 127 juta menjadi 87 juta pada tahun 2060.

Masing-masing dari 350 orang-orangan sawah yang dibuat oleh Ayano selama bertahun-tahun itu dibuat di atas landasan kayu, dengan bahan pengisi dari kertas koran dan kain. Orang-orangan sawah ini sering kali mengenakan pakaian bekas, dan orang-orangan sawah yang dipasang di luar ruangan dilapisi dengan plastik agar tetap kering. Namun, faktor cuaca merusak keindahannya, dan Ayano sering kali harus mengganti orang-orangan sawah yang terpapar udara terbuka.

Kadang-kadang, orang-orangan sawah yang baru dibuat sesuai dengan pesanan, biasanya dalam bentuk serupa dengan anak muda yang telah meninggalkan Nagoro atau warga yang telah meninggal. "Orang-orangan sawah diciptakan sebagai permintaan bagi mereka yang telah kehilangan kakek atau nenek mereka," kata Osamu Suzuki, warga berusia 68 tahun. "Jadi memang sesuatu untuk membawa kembali kenangan."

Wisatawan juga sudah mulai datang, tertarik oleh dua penjaga tak bernyawa yang menjaga jalan menuju ke desa itu, di samping papan yang mengidentifikasi Nagoro sebagai "Desa Orang-orangan Sawah." Reuters

## PERAMPOK MELAKUKAN OPERASI PLASTIK UNTUK MENGHINDARI PENANGKAPAN

Polisi di Korea Selatan mengatakan bahwa seorang pria yang dipenjara untuk kasus pencurian satu dekade lalu menjalani operasi plastik untuk mengaburkan identitasnya dan terlibat dalam perampokan besar-besaran selama sembilan bulan dimulai pada April 2014 dan berhasil mencuri uang tunai dan barang senilai lebih dari 6,4 miliar rupiah (sekitar 479.000 dolar A.S.).

Pria berusia 35 tahun itu ditangkap pada Maret 2015 untuk 87 kasus perampokan di berbagai pelosok negara ini, kata perwira polisi di kota Incheon melalui telepon.

Perwira polisi itu mengatakan bahwa tersangka, yang telah dipenjara untuk kasus perampokan pada tahun 2005, menjalani operasi untuk mengubah struktur rahang dan juga menjalani prosedur untuk meregangkan anggota tubuhnya dan menambah tinggi badannya.

AFP/GETTY IMAGES

Tersangka mengakui perampokan tersebut namun mengatakan bahwa dia menjalani operasi karena tidak menyukai penampilannya, kata perwira tersebut.

Korea Selatan adalah surga bagi lebih dari 4.000 klinik operasi plastik dan memiliki tingkat prosedur bedah kosmetik tertinggi di dunia.

Tersangka merancang alatnya sendiri untuk menonaktifkan kunci digital agar bisa membobol rumah, kata polisi. Reuters

# PENAMPILAN PENGHORMATAN

Barisan kehormatan Angkatan Udara Republik Korea menunjukkan keterampilan akrobatik mereka dalam sebuah acara di Monumen Peringatan Perang Korea di Seoul pada awal April 2015. Penampilan ini menandai dimulainya kembali acara mingguan oleh barisan kehormatan yang ditangguhkan selama musim dingin. Monumen peringatan ini, yang dibuka pada tahun 1994 di bekas lokasi markas besar Angkatan Darat, memiliki enam ruang pameran dengan lebih dari 13.000 objek memorabilia perang dan peralatan militer, termasuk sekitar 100 senjata besar di lapangan sekitarnya, demikian menurut situs web monumen peringatan tersebut.

Foto oleh: **JUNG YEON-JE** | AFP/Getty Images

APAKAH ANDA INGIN FOTO FAVORIT ACARA LATIHAN ATAU KEMITRAAN TERBARU ANDA DITAMPILKAN DALAM KOLOM KATA TERAKHIR? SILAKAN KIRIMKAN FOTO ANDA KE **EDITOR@APDF-MAGAZINE.COM** UNTUK KAMI PERTIMBANGKAN.

# RELEVAN.
# BERWAWASAN.
# ONLINE.

www.apdforum.com

## BERLANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA

*Asia Pacific Defense FORUM* adalah majalah militer yang disediakan secara CUMA-CUMA bagi siapapun yang berhubungan dengan masalah keamanan di wilayah Indo-Asia Pasifik.

**UNTUK LANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA:**

http://apdf-magazine.com/id/berlangganan/

surat: APD FORUM Program Manager
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

**MOHON SERTAKAN:**

- Nama
- Pekerjaan
- Gelar atau jabatan
- Alamat surat
- Alamat email (opsional)

Pindai gambar ini dengan pembaca kode telepon Anda untuk dibawa ke jaringan situs kami.